



MAJALAH

# Parlementaria

EDISI 196 • TH. 2021

## BASMI SINYAL TERORISME

Terorisme kembali muncul ke permukaan. DPR dorong pemerintah habisi terorisme hingga ke akar. Program deradikalisasi harus ditingkatkan.



7 25272 73070 6



## PENGANTAR REDAKSI

**A**ksi teror agi-lagi menghantui negeri. Dua kasus beruntun pada maret lalu ang menyasar Gereja Cathedral dan Mabes Polri kembali membuka mata kita bahwa teroris itu masih ada, mengintai siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Aksi ini kembali menghidupkan sinyal darurat sebagai bentuk perlawanan terhadap terorisme.

Tak cukup hanya dengan penegakan hukum kepada pelaku teror, sinyal-sinyal atau cikal bakal ideologi terorisme harus segera dipadamkan. Kalau tidak, ia akan menyebar dan menyasar generasi muda yang seharusnya menjadi tonggak penerus bangsa.

Pada **Majalah Parlementaria edisi 196** mengangkat tema "**Basmi Sinyal Terorisme**". Tim Redaksi berupaya mengulas strategi dalam memberangus cikal bakal teroris. Salah satu diantaranya adalah melalui literasi digital. Sebagaimana diketahui, sebaran informasi hoaks bersliweran di berbagai platform di media sosial. Masyarakat harus diedukasi, dan pemerintah perlu bertindak menertibkan informasi-informasi yang mengarah pada radikal.

Kemudian di Rubrik Pengawasan, Tim Redaksi menurunkan berita menenai pembentukan Holding Ultra Mikro yang diharapkan menjadi tonggak kebangkitan sektor UMKM dan Usaha Ultra Mikro (UMI).

Di Rubrik Anggaran, Tim Redaksi mengulas terkait keharusan dan upaya-upaya pemerintah dalam mengembalikan batasan defisit akan kembali normal di angka 3 persen. Sementara di Rubrik Legislasi, mengupas tentang RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) salah satunya adalah perlunya lembaga otorita yang independen yang mengurus perlindungan data pribadi

Masih banyak lagi yang disajikan **Tim Redaksi Parlementaria** seperti rubrik Sorotan, Liputan Khusus, kemudian berita mengenai kegiatan Anggota DPR RI di dapilnya dalam rangka melaksanakan amanat konstitusinya sebagai wakil rakyat. Semuanya disajikan secara komprehensif sehingga sangat layak untuk dibaca.

Selamat membaca!

*Parlementaria*



Ikuti Akun Media Sosial DPR RI  
Follow, Like & Subscribe

medsos@dpr.go.id



w w w . d p r . g o . i d



# Parlementaria

**PENGAWAS UMUM**  
Pimpinan DPR RI

**KETUA PENGARAH**  
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

**WAKIL KETUA PENGARAH**  
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

**PIMPINAN REDAKSI**  
Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

**W.K PIMPINAN REDAKSI**  
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)  
Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisist)  
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

**REDAKTUR**  
Erman Suhendri, S.Sos.I, Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretno, S. Ikom,  
Sofyan Efendi

**REDAKTUR FOTO**  
M. Andri Nurdiansyah  
Sekretaris Redaksi  
Guntur Dewanto, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

**ANGGOTA REDAKSI**  
Rizka Arinindya, S.Sos, Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretno, S.I.Kom,  
Ridwan Budiman, S.I.P, Agung Hidayat, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal,  
S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne  
Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan  
Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbari, Siti Nadiah, Nafisa Hanum  
Alaydrus

**FOTOGRAFER**  
Prima Danutirto, A.Md, Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R.  
Kresno PD, Moempoeni, Azka Restu Afdhillah,  
Geraldii Opie, Hasri Mentari

**ANALIS MEDIA**  
Supian, S.E, Natasya Annanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan,  
S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya,  
Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayawati, Rosnita

**INFOGRAFIS**  
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia,  
Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama

**ADMINISTRASI**  
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

## PENERBITAN

**PIMPINAN PENERBITAN**  
Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

**PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**  
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

**STAF PRODUKSI**  
Subadri, S.E, Barliansyah

**DESAIN GRAFIS**  
Dito Sugito

**PHOTOGRAFER ART**  
Friederick Munchen

**IT MEDIA DIGITAL**  
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom

**PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI**  
Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

**KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Siti Nur Aidah S.A.P., M.AP, Isfandi Mulyana, Yudi Kresna,  
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunnisa

**ADMINISTRASI**  
**STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**

Arif, Lamin, Yuliana Puspita  
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421  
Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO**  
**DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**  
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL  
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

# Parlementaria

EDISI 196 • TH. 2021



7



20



54



56

4 PROLOG  
Antisipasi Dini Terorisme  
LAPORAN UTAMA

7 Bersihkan Narasi Terorisme dengan Literasi Digital

10 Sinyal Darurat Hadapi Terorisme

12 Tingkatkan Pemahaman Moderasi Beragama

14 Pendidikan Pancasila Merupakan Pondasi Toleransi Beragama

15 Kerapuhan Sosial Pangkal Terorisme

16 SUMBANG SARAN  
Terorisme Kekerasan dan Kebhinekaan

18 PENGAWASAN  
Holding Ultra Mikro, Harapan Kebangkitan Sektor UMKM dan UMi

20 ANGGARAN  
Tahun Penentu Bagi Pemerintah Kembalikan Defisit ke Ambang Batas Normal

24 LEGISLASI  
Otoritas Independen Jamin Perlindungan Data Pribadi

26 FOTO BERITA

28 PROFIL  
Sepak Terjang Sihar Sitorus, Dari Urusan Bola Hingga Terjun Kompetisi Pilkada

32 KUNKER

54 SOROTAN  
Perketat Prokes Saat Sekolah Tatap Muka

56 LIPUTAN KHUSUS  
Akademisi dan Pemda Perlu Terlibat dalam Diplomasi Internasional

58 DAPIL

68 TOKOH  
Irene Sukandar : Sukses di Catur, Lancar di Akademik

70 PERNIK  
Asesmen Ukur Kompetensi ASN untuk Promosi dan Mutasi

72 PARLEMEN DUNIA  
Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC)

74 KIAT SEHAT  
Apa yang harus Dilakukan Setelah Positif Covid-19

76 WISATA  
Berdiri di Belahan Utara dan Selatan di Tugu Khatulistiwa

78 HOBI  
Ahmad Sahroni : Berharap Olahraga Sepeda Makin Digemari

79 POJOK PARLE  
Komisi VIII Panjatkan Doa Bagi Korban Bencana NTT

Antisipasi Dini

# Terorisme



Lagi-lagi teror menghantui negeri. Seperti tak ada habisnya, teror selalu mengintai kapan dan di mana saja. Dua kasus beruntun terjadi pada Maret lalu. Gereja dan markas besar Polri jadi sasaran. Teror ini menghidupkan sinyal darurat perlawanan terhadap terorisme.

**K**utukan dan apresiasi memenuhi pemberitaan media. Mengutuk aksi teror dan mengapresiasi langkah penegak hukum. Hal yang selama ini luput dari perhatian publik adalah masuknya gender dalam isu terorisme di Tanah Air. Mayoritas pelaku teror memang pria. Tapi tidak sedikit wanita masuk ke lingkaran terorisme.

Keterlibatan wanita dalam aksi teror, apalagi dilakukan di Mabes Polri, telah menyalakan sinyal darurat melawan terorisme. Audit atas sistem pengamanan baik di Mabes Polri maupun nasional perlu dilakukan. Padahal, UU Terorisme juga sudah direvisi dengan membolehkan tentara ikut masuk memberantas terorisme.

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin dalam keterangan persnya, mendesak agar strategi penanganan terorisme ditinjau ulang. Ia menyampaikan, pentingnya membangun digital literasi tentang bahaya radikalisme. Penyusunannya bisa melibatkan para tokoh agama, pesantren, dan dua organisasi besar Islam, NU dan Muhammadiyah sebagai jangkar deradikalisasi.

“Pengaruh kuat radikalisme dan ekstremisme harus dihentikan. Ikhtiar ini tentu tidak sebatas edukasi kepada pelajar dan keluarga secara langsung. Tapi penting pula membatasi mesin *browsing* yang selama ini memberikan pengaruh paling dominan,” jelas Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu. Merespon tragedi teror di Makassar dan Mabes Polri, ia juga mendorong percepatan implementasi pelaksanaan amanat

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021.

Perpres ini harus berjalan di semua sektor dengan mempercepat implementasi pelaksanaan amanat Perpres tersebut. Tujuannya meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman warga negara dari aksi terorisme. “Di tengah bencana pandemi Covid-19 saat ini, masyarakat dan negara membutuhkan rasa aman untuk bekerja dan bangkit dari keterpurukan,” seru Azis.

Pemerintah, lanjutnya, haus segera menyusun rencana aksi pencegahan dan penanggulangan terorisme dan mengimplemantasikannya secepat mungkin. Polri harus mengusut tuntas jaringan terorisme di Tanah Air. Saat yang sama, fungsi intelijen harus terus ditingkatkan. Polri dan BNPT harus mampu menggandeng semua elemen memberantas terorisme yang sudah lama mengusik ketenangan warga.

Berdasarkan data yang dirilisnya, Azis menyebut jumlah teroris mencapai 6.000 lebih. Angka ini tentu sangat meresahkan dan mengganggu keamanan. “BNPT sebagai *role model* dalam pencegahan terorisme harus mampu menunjukkan kelasnya. Tentu tidak hanya sebatas penindakan, tetapi pencegahan lebih penting,” harap Azis.

Parlementaria juga mendapat pernyataan pers Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery, Maret lalu. Ia mengatakan peristiwa penyerangan yang dilakukan seorang perempuan di Mabes Polri menjadi sinyal darurat bagi Polri, BNPT, dan BIN. “Oleh sebab itu, saya mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas jaringan terorisme di Indonesia,” seru Herman.

Apapun alasan aksi teror tersebut, tetap tidak dibenarkan oleh agama mana pun. Politisi PDI Perjuangan itu mengapresiasi kesigapan para petugas pengamanan di Mabes Polri yang langsung menindak wanita pelaku teror. Sebetulnya sudah banyak teroris yang ditangkap, tapi tak mengurangi ancaman teror atau membawa efek jera. BNPT pun dituntut mencari formulasi baru mengatasi terorisme di negeri ini.

Herman mendesak, fungsi intelijen terus diperkuat untuk mendeteksi sedini mungkin aksi-aksi terorisme. “Saya Ketua Komisi III DPR RI meminta kepada Polri dan BNPT sebagai mitra kami untuk memperkuat fungsi intelijen dalam mendeteksi kejadian serupa di kemudian hari. Kejar dan tangkap pelaku teror ini hingga akarnya,” tegas legislator asal dapil Nusa Tenggara Timur II itu.

Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha saat menjadi pembicara pada acara Dialektika Demokrasi di DPR, mengatakan, keterlibatan TNI dalam operasi memberantas terorisme belum sepenuhnya bisa dilakukan, lantaran belum ada Perpres yang mengaturnya. Sepanjang Perpres tentang keterlibatan TNI itu belum ada, maka selama itu pula TNI belum bisa terlibat sepenuhnya.

Semua badan intelijen di semua institusi pasti sudah mengetahui kelompok yang terpapar paham radikal. Namun, belum bisa menangkap karena belum ada aksi teror. UU Terorisme yang ada sekarang sudah mengalami kemajuan. Kelompok-kelompok teroris sudah bisa ditangkap dengan dugaan awal yang cukup kuat.

“Saya yakin semua jajaran intelijen, sudah mengetahui jaringan itu, yang sudah terpapar paham radikalisme dan terorisme. Pencegahan terhadap tindak pidana terorisme bisa dilakukan sedini mungkin, tanpa terlebih dahulu mereka melakukan teror,” jelas politisi PPP itu. ● mh/er



Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri.

- Soekarno



“Jatuh bangunnya negara ini, sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntaian pulau di peta.”

- Mohammad Hatta



**Abdurrahman Wahid**

“Semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin besar rasa toleransinya.”



**Ahmad Dahlan**

“Kasih sayang dan toleransi adalah kartu identitas orang islam.”

# Bersihkan Narasi Terorisme dengan **Literasi Digital**

Dua aksi teror terakhir di Makassar dan Jakarta ternyata melibatkan generasi milenial. Ini jadi sisi menarik lainnya di balik isu terorisme. Sumbernya berasal dari literasi digital. Berbagai paham radikal masuk mengintersep literasi digital di Tanah Air. Pemerintah pun didesak membersihkan berbagai narasi radikal di media sosial (Medsos).



**KETUA DPR**  
RI Dr. (H.C.)  
Puan Maharani  
April lalu,  
menyampaikan  
keprihatinannya  
atas tragedi teror  
yang melibatkan  
kaum muda  
potensial. Peran

keluarga menjadi krusial dalam konteks ini. Penguatan ketahanan keluarga jadi keniscayaan untuk mencegah penyebaran paham radikal di kalangan anak muda. Disebutkan, dua aksi teror di dua kota besar itu ternyata kelahiran tahun 1994 dan 1995.

“Ada pelaku teror dari kalangan muda, generasi milenial, dan keluarga. Ini sangat mengkhawatirkan dan menyedihkan. Interaksi keluarga dan interaksi sosial warga dengan tetangga harus diperkuat dalam konsep ketahanan sosial masyarakat,” seru Puan dalam keterangan persnya.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu, mendesak pemerintah melakukan pencegahan konkret atas aksi terorisme, khususnya di ranah digital. Ia mengingatkan bahwa paham radikal tersebar luas di jejaring Medsos. Media internet jadi lahan subur paham radikal tumbuh dan diserap kaum milenial.

“Perlu ada pemantauan konten-konten di sosial media yang

Ketua DPR RI  
Dr. (H.C.) Puan Maharani.  
Foto: Kresno/rvl



mengandung materi-materi radikal dan ekstremisme. Semua pihak harus saling mengingatkan dan mencegah tersebarnya paham-paham radikal di media sosial. Pasalnya, banyak pelaku teror terpapar paham radikal dari media sosial,” kata politisi PDI Perjuangan tersebut. Selain menggencarkan patroli siber Medsos, penting pula meningkatkan edukasi nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme kepada generasi muda.

Di sinilah literasi digital mesti dibenahi. Puan menyarankan konten-konten positif harus dimasifkan sebagai literasi digital di berbagai jejaring Medsos. Misalnya, moderasi, toleransi, inklusifitas, dan keberagaman Bangsa Indonesia. Tujuannya menguatkan jiwa toleransi dan persatuan sesama anak bangsa. “Edukasi literasi digital juga penting,” imbuhnya singkat.

Sementara itu kritik dilontarkan Anggota Komisi I DPR RI Farah Puteri

Nahlia kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) atas serangan teror ini. Pasalnya, serangan teror itu menunjukkan bahwa indoktrinasi paham radikal sudah mengancam seluruh generasi, termasuk milenial. Paham itu masuk melalui literasi digital di Medsos yang diakses generasi milenial.

“Pendekatan seperti Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) yang melibatkan kalangan pelajar yang telah dilakukan BNPT, perlu diperkuat dengan inovasi-inovasi pendekatan kreatif kontra radikal,” kata Farah kepada pers beberapa waktu lalu. BNPT perlu melibatkan sekolah dan perguruan tinggi untuk menyelaraskan komitmen kebangsaan di lingkungan

generasi muda.

Kemkominfo juga perlu memasifkan perannya dalam menangkal terorisme khususnya untuk kaum muda. Menurut politisi PAN ini, Kemkominfo harus mencegah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang destruktif. Literasi digital dan optimalisasi patroli siber perlu dimaksimalkan. Farah berharap, para tokoh agama harus mengambil peran dalam mencegah penyebaran paham radikal di kalangan generasi milenial.

“Peran lembaga-lembaga negara tentu penting, namun tidak berarti meninggalkan peran-peran aktor lain. Saya kira di negara kita dengan mayoritas penduduk muslim, peran kiai masih sangat vital,” kata legislator dapil Jabar IX. Ruang digital perlu

dimanfaatkan untuk menangkal paham radikal yang memapar kaum muda. Para tokoh agama bisa dilibatkan oleh Kemkominfo.

BNPT pun harus membuat berbagai strategi mencegah aksi terorisme di internet dengan melakukan perlawanan narasi. Narasi berkonten positif ini diharapkan mampu membentengi masyarakat dari pengaruh ideologi terorisme dan doktrin kelompok teroris di ruang digital. BNPT juga harus mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk menolak paham terorisme melalui kegiatan literasi Medsos.

### PRIORITASKAN PEMBINAAN KERUKUNAN

Pendidikan kebhinekaan juga perlu ditingkatkan. Sebab, bentuk pendidikan inilah yang mengenalkan berbagai macam perbedaan dan menjadikan perbedaan tersebut sebagai modal dan potensi untuk saling mengisi dan melengkapi kekurangan, sehingga tercipta suasana hidup yang lebih indah, lebih lengkap, hidup rukun, toleran, dan harmoni.

Oleh sebab itu, Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin memberikan perhatian pada peningkatan kualitas pendidikan yang menguatkan nilai-nilai kebangsaan dan kerukunan dalam keberagaman. “Tentu saja peran lembaga pendidikan termasuk lembaga dakwah di daerah-daerah harus lebih difokuskan. Tentu saja parameter-nya adalah kualitas mutu pendidikan yang harus kita tingkatkan,” jelasnya.

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini pun beranggapan, maraknya aksi terorisme akhir-akhir ini terjadi karena salah dalam memaknai arti dari sebuah keberagaman terhadap perbedaan dalam menganut keyakinan. *Mindset* tentang yang bukan Islam mereka adalah kafir, serta begitupun sebaliknya, terorisme dicap sebagai agama Islam.

Azis menegaskan, Bangsa Indonesia harus bersyukur dengan keberagaman yang dimiliki. “Mengingat, keragaman

Wakil Ketua DPR RI  
M. Azis Syamsuddin. Foto: OjjiMan





merupakan warisan leluhur dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi sebuah ciri bangsa yang mengedepankan toleransi umat beragama, adab dan perbedaan,” ujar Azis.

Politisi Partai Golkar ini menekankan, pembinaan kerukunan umat beragama merupakan sebuah prioritas yang harus dikedepankan oleh pemerintah. Tujuannya, sambung Azis, untuk mencegah terjadinya konflik yang berangkat dari isu agama dan perbedaan keyakinan, serta pandangan dan upaya menghentikan stigma terorisme yang dikaitkan dengan agama.

“Teroris bukanlah agama tertentu. Masyarakat Indonesia harus dapat mensyukuri, memelihara, menjaga keragaman dengan selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sosial keseharian,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Azis menegaskan agar pihak-pihak tertentu jangan memanfaatkan perbedaan dan keberagaman untuk memecah belah bangsa Indonesia demi kepentingan jangka pendek untuk merusak suasana yang telah aman, damai, tenang dan kondusif di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Memelihara dan menjaga keberagaman merupakan tugas seluruh lapisan masyarakat. Toleransi umat beragama yang telah terwujud sejak dulu harus kita pertahankan, demi terciptanya rasa aman dan damai serta toleransi umat beragama di Indonesia,” pungkas Azis.

Sementara itu di waktu yang sama, Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar meminta agar seluruh aparat keamanan dan pemerintah, terutama Polri, BIN dan TNI bahu-membahu Jaga Keamanan Nasional.

Muhaimin menjelaskan, negara harus hadir dan membela masyarakat dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sehingga tak kalah oleh serangan atau teror apapun. Dia juga mendesak TNI-Polri untuk mengusut tuntas dan menangkap

jaringan teroris hingga ke akar-akarnya serta menangkap dalang di balik bom Makassar tersebut.

“Saya meminta kepada aparat keamanan, Polri dan TNI untuk bahu membahu bergerak cepat mengintersep, menangkap dan mengikis habis jaringan dan dalang dibalik bom bunuh diri Makassar. Tunjukkan bahwa keamanan nasional dan ketertiban umum di Indonesia tidak

akan pernah tergoyahkan hanya karena ulah biadab bom bunuh diri,” tegasnya.

“Kita harus menunjukkan bahwa Bhineka Tunggal Ika tidak akan bisa dikoyak hanya karena ulah bom bunuh diri. Kebhinekaan bangsa Indonesia tidak akan pernah tergoyahkan karena kita semua yakin, terorisme adalah musuh kita semua dan bom bunuh diri musuh dunia,” papar politisi yang akrab disapa Gus Ami. •mh,eko/er

Wakil Ketua DPR RI  
Abdul Muhaimin Iskandar



# Sinyal Darurat Hadapi Terorisme

Aksi teror Maret lalu menyalakan sinyal darurat. Perang melawan terorisme sudah ditabuh sejak lama. Teror seperti tak bertepi untuk terus dihadapi. Polri harus mengaudit sistem keamanan yang selama ini ada. Fungsi intelijen pun didesak untuk diperkuat.



**DUA** rentetan aksi teror memantik kembali semangat bangsa ini menghadapi terorisme. Aksi kutuk terhadap terorisme

memenuhi dunia maya dan ruang publik, seraya mempertanyakan peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan fungsi intelijen negara. Mengapa selalu kecolongan?

Tak ketinggalan berbagai keterangan pers berdatangan ke redaksi

**Parlementaria** dari para anggota DPR RI. Isinya kutukan terhadap terorisme dan seruan memperkuat otoritas aparat menghadapi para teroris. Sudah banyak rumah ibadah di Tanah Air dibom oleh para teroris. Tapi, ketika teroris mengintersep Markas Besar Polri di Jakarta, ini jadi pertanyaan mendalam. Bahkan, yang meneror adalah seorang perempuan bersenjata.

Audit atas sistem keamanan pun jadi keniscayaan untuk segera dilakukan. Mengapa sistem keamanan Polri begitu lemah? Padahal, teroris datang

silih berganti, tak mengenal waktu. Korban berjatuh begitu banyaknya. Teror telah meninggalkan trauma bagi masyarakat. Kepedulian pun bermunculan antarsesama pemeluk agama. Simpati kepada para korban

dan kutukan kepada para teroris berkumandang.

**Parlementaria** mendapat keterangan pers dari Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery, Maret lalu. Isinya kutukan atas tragedi tersebut. Katanya, ini merupakan sinyal darurat atas penanggulangan terorisme selama ini. Ya, darurat karena sang teroris yang menyerang Mabes Polri adalah wanita. Tentu ini darurat bagi Polri, BNPT, dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Peristiwa ini pasti melukai rasa kemanusiaan. Agama mana pun tidak membenarkan



Ketua Komisi III DPR RI  
Herman Hery.  
Foto: Dok/ivi

aksi tersebut. “Oleh sebab itu, saya mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas jaringan terorisme di Indonesia,” seru Herman. Di sisi lain, ia masih mengapresiasi kesigapan Polri dalam menghalau serangan teror di Mabes Polri yang dilakukan seorang wanita dengan menodongkan senjata. Tindakan Polri dinilainya sudah terukur.

“Petugas pengamanan telah melakukan tindakan yang terukur untuk mencegah eskalasi aksi teror tersebut,” ujar politisi PDI-Perjuangan itu. Dua aksi teror di Makassar dan Jakarta terjadi berdekatan waktunya. Ini sekali lagi seperti menyalaakan sinyal darurat untuk perang melawan terorisme. Polri, BNPT, dan BIN pasti tidak bisa berdiam saja. Penyelidikan atas tragedi teror tersebut pasti sudah pula dilakukan.

Dalam rilisnya, Herman menulis, sudah banyak teroris yang ditangkap dan diadili, bahkan dieksekusi mati. Namun, seperti tak jera dan tak ada habisnya teroris baru bermunculan dengan modus dan sasaran yang berbeda. Penangkapan itu belum berujung efektif dalam memberantas aksi terorisme di Tanah Air. Maka menurutnya, fungsi intelijen harus diperkuat untuk mendeteksi sedini mungkin rencana aksi-aksi terorisme sekaigus menyusun pencegahannya.

“Saya Ketua Komisi III DPR RI meminta kepada Polri dan BNPT sebagai mitra kami untuk memperkuat fungsi intelijen dalam mendeteksi kejadian serupa di kemudian hari. Kejar dan tangkap pelaku teror ini hingga akarnya,” harap legislator dapil Nusa Tenggara Timur II itu. Masyarakat harus dilindungi dari bahaya teror. Apalagi umat Islam segera menghadapi hari raya Idul Fitri.

Mungkin setelah ini masih akan ada teror-teror lain yang menghantui. Tapi, seperti disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, negara tidak boleh kalah dengan terorisme. Semua menyerukan agar BNPT dan Densus 88 segera memberantas terorisme hingga ke akar-akarnya. Mereka yang terpapar

**SUDAH BANYAK TERORIS YANG DITANGKAP DAN DIADILI, BAHKAN DIEKSEKUSI MATI. NAMUN, SEPERTI TAK JERA DAN TAK ADA HABISNYA TERORIS BARU BERMUNCULAN DENGAN MODUS DAN SASARAN YANG BERBEDA. PENANGKAPAN ITU BELUM BERUJUNG EFEKTIF DALAM MEMBERANTAS AKSI TERORISME DI TANAH AIR. MAKA MENURUTNYA, FUNGSI INTELIJEN HARUS DIPERKUAT UNTUK MENDETEKSI SEDINI MUNGKIN RENCANA AKSI-AKSI TERORISME SEKAIGUS MENYUSUN PENCEGAHANNYA.**

Herman Hery. Foto: Dok/mt



paham radikal harus segera diluruskan dengan pendekatan yang pas.

BNPT memang dituntut profesional menyelidiki sarang-sarang terorisme hingga ke sel-selnya yang terkecil. Pendekatan dan metode penanggulangan terorisme di Tanah Air mungkin perlu dibenahi. Ketika menghadapi aksi teroris yang sudah melenyapkan banyak nyawa manusia tak berdosa, memang harus keras tanpa kompromi. Namun, menghadapi keluarga dan lingkungan tempat tinggal teroris

mungkin butuh pendekatan lain yang lebih lembut.

Pendekatan persuasif dibutuhkan untuk menggugah keluarga teroris agar menjauh dari paham radikal dan lebih toleran terhadap perbedaan. Menghadapi teroris tak melulu dengan kekerasan. Ada saatnya kelembutan menjadi senjata pamungkas melawan aksi terorisme selama ini. Sinyal darurat sudah menyala. Metode penanggulangan pun harus berjalan beriringan dengan ketegasan dan kelembutan. ● mh/er

# Tingkatkan Pemahaman Moderasi Beragama

Dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk, kedamaian, harmonis dan serta kerukunan menjadi suatu hal yang diidam-idamkan. Namun, di samping itu gesekan-gesekan dalam kehidupan keagamaan juga harus diselesaikan.



**TAK** jarang, ada pihak-pihak yang mencoba untuk memaksakan kehendak, membenturkan keyakinan keagamaannya dengan keyakinan

ideologi kebangsaan. Ada pihak-pihak yang merasa dirinya paling benar keagamaannya, sehingga rela dan secara tega dia melakukan tindakan yang menyalahi nilai-nilai kemanusiaan.

Salah satu upaya dan sikap yang perlu dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat adalah mengubah cara pandang dalam konteks hubungan keagamaan dengan hubungan sosial. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily ketika diwawancarai oleh salah satu media swasta nasional.

“Aksi

terorisme itu telah mencoreng dan menciderai nilai-nilai keagamaan yaitu nilai-nilai yang mengedepankan kedamaian dan toleransi. Terorisme acap kali berbasis pada pemahaman agama yang salah, padahal tidak ada satu agama pun yang membolehkan adanya tindakan kekerasan apalagi sampai menimbulkan korban jiwa,” sebutnya.

Ada satu hal penting yang menurutnya patut dikedepankan dalam kehidupan beragama, yaitu pandangan tentang moderasi beragama. Moderasi sendiri berasal dari kata moderatio yang berarti sedang. Moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI  
Ace Hasan Syadzily. Foto: Tim/ni



agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan.

“Pandangan moderasi beragama kita itu bukan berarti bahwa kita ragu-ragu sebagai orang yang beragama, bukan. Pandangan moderasi beragama itu sejatinya adalah nilai-nilai keislaman itu sendiri. Moderasi beragama atau moderasi dalam beragama Islam merupakan salah satu prinsip dari ajaran agama Islam itu sendiri,” urai Ace.

Ace menjelaskan, secara terminologi, moderasi atau moderat itu adalah sikap pandangan yang tidak ekstrim kiri dan tidak ekstrim kanan. Pandangan yang selalu berada di tengah-tengah. Tidak Eekstrimistis, karena pada prinsipnya memang ajaran agama Islam itu mengajarkan kepada kita untuk selalu berada pada posisi di tengah-tengah.

“Oleh karena itu penting sekali kita memiliki pandangan yang moderat di dalam kehidupan keagamaan kita. Bukan suatu pandangan yang berlebih-lebihan. Kenapa, karena pandangan yang berlebih-lebihan tersebut itu kecenderungannya bisa mengarah kepada ekstrimitas. Sehingga dengan demikian, kita bisa dengan mudah terjerumus ke dalam pandangan yang menghalalkan segala cara tanpa mengindahkan nilai-nilai agama itu sendiri dan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri,” terangnya.

Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama ini diniscayakan oleh Ace akan menghindarkan sikap ekstrem berlebihan, fanatik dan sikap revolusioner dalam beragama. Seperti telah diisyaratkan sebelumnya, moderasi beragama merupakan solusi atas hadirnya dua kutub ekstrem dalam beragama, kutub ultrakonservatif atau ekstrem kanan di satu sisi, dan liberal atau ekstrem kiri di sisi lain.

#### UPAYA DERADIKALISASI

Pandangan moderasi beragama yang dijelaskan Ace sejalan dengan

## PENTING SEKALI KITA MEMILIKI PANDANGAN YANG MODERAT DI DALAM KEHIDUPAN KEAGAMAAN KITA. BUKAN SUATU PANDANGAN YANG BERLEBIH-LEBIHAN.

Ace Hasan Syadzily. Foto: Tim/vml



program pemerintah yang sedang mengupayakan deradikalisasi. Dimana, deradikalisasi harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang konkrit dan menjangkau semua kalangan. Terutama kalangan yang selama ini rentan sekali untuk terpapar radikalisme atau orang-orang yang memiliki pengetahuan keagamaan yang belum sepenuhnya mendalam, lalu mereka terpenetrasi oleh nilai-nilai yang justru bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Dalam sebuah wawancara dengan salah satu media nasional, Politisi Fraksi Partai Golkar ini mencontohkan tindakan radikal yang berawal dari pemahaman nilai-nilai agama yang salah.

“Misalnya melakukan tindakan bom bunuh diri sebagai bentuk upaya mencapai tiket ke surga, Saya kira itu pemahaman yang salah. Oleh karena itu, upaya deradikalisasi ini menurut saya tidak boleh dilakukan secara formalitas, hanya sebatas mengadakan pelatihan-pelatihan saja.

Tetapi harus bisa menjangkau semua kalangan terutama kalangan yang selama ini mereka sedang mengalami proses masa pertumbuhan psikologis, terutama anak-anak muda,” urai Politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Pemerintah juga perlu melibatkan organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, PGI, KWI serta organisasi keagamaan lainnya yang selama sudah menunjukkan suatu sikap yang jelas mengajarkan sikap toleransi beragama yang inklusif, beragama yang moderat.

“Saya kira di organisasi-organisasi itu nampak jelas bahwasanya mereka memang sudah teruji,” tegas Ace yang juga merupakan Dosen UIN Jakarta ini.

Selain pelibatan organisasi keagamaan, yang tak kalah pentingnya menurut Ace adalah melakukan counter terhadap isu-isu radikalisme dengan memanfaatkan media sosial. Karena selama ini, media sosial juga merupakan salah satu instrument yang dipakai untuk menyebarkan paham radikal.

“Counter terhadap radikalisme atau deradikalisasi itu harus juga menggunakan media sosial yang tepat. Misalnya, kalau selama ini berbagai berita hoaks atau berbagai macam pengetahuan keagamaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur agama itu disebarkan melalui media sosial, maka sebaliknya semangat agama yang toleran, semangat agama yang moderat, itu juga harus dilakukan oleh instrumen-instrumen itu,” tuturnya.

Ace mengimbau, agar masyarakat memanfaatkan media sosial sebagai instrumen untuk menyemai tentang beragama yang moderat atau mengenalkan Islam rahmatan lil ‘alamin. “Nah, cara-cara seperti ini menurut saya belum ditempuh secara masif. Jadi Counter terhadap radikalisme dengan deradikalisasi melalui instrumen media sosial, atau melalui even-even yang disitu diisi oleh anak-anak muda yang bisa berinteraksi satu sama lain belum dilakukan secara maksimal,” pungkasnya. ● es

# Pendidikan Pancasila Merupakan Pondasi Toleransi Beragama

Bangsa Indonesia tengah menghadapi tantangan berat terkait serbuan ideologi transnasional seperti ekstrimisme agama. Berbagai survei menunjukkan makin merosotnya pengetahuan dan keyakinan pelajar dan mahasiswa tentang nilai-nilai Pancasila. Maka, perlu adanya benteng pertahanan yaitu pelajaran Pancasila dalam pendidikan di Indonesia.



**SEJAK** dulu, bangsa Indonesia dikenal dengan keberagaman. Menghormati keberagaman suku bangsa merupakan upaya untuk menjaga

persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar terhindar dari macam persoalan yang mengancam disintegrasi bangsa yang salah satunya melalui terorisme.

Adanya aksi terorisme menunjukkan bahwa persoalan kebangsaan saat ini

masih menemui banyak tantangan. Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengungkapkan, penanaman nilai-nilai kebangsaan melalui pendidikan pancasila sangat dibutuhkan, agar masyarakat bisa menjunjung tinggi toleransi, menghormati perbedaan dan anti kekerasan.

Syaiful menerangkan, Komisi X DPR RI mendesak agar pemerintah segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dimana, beleid yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 30 Maret 2021 itu tidak memuat Pendidikan Pancasila sebagai pelajaran wajib untuk siswa maupun mahasiswa.

“Kami meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) segera mengajukan draf revisi atas PP 57/2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Revisi itu harus memastikan jika Pendidikan Pancasila merupakan mata

pelajaran wajib yang harus diikuti oleh peserta didik baik di tingkat dasar, menengah, dan perguruan tinggi,” ujar Syaiful.

Pendidikan Pancasila merupakan salah satu pilar pendidikan untuk membentuk karakter cinta Tanah Air peserta didik. Karena, di dalam Pancasila terkandung banyak konten penting dalam pengembangan toleransi beragama, saling menghormati, etika, dan integritas bagi peserta didik.

Pancasila juga berperan penting untuk menginspirasi generasi muda di Tanah Air jika Indonesia dibangun atas nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah mufakat, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini sangat penting. Terlebih dewasa ini banyak nilai-nilai yang datang dari luar yang ingin membawa Indonesia sebagai negara sekuler atau negara berbasis agama.

Dalam konsep pluralisme agama, mestinya yang paling utama adalah mengedepankan kepentingan sosial-kemasyarakatan, bukan berdasar keyakinan. Dengan demikian, Pancasila menjadi landasan teologis bagi agama-agama yang bertujuan untuk menjaga sikap saling menghargai perbedaan, menjaga kesantunan dan keramahan dalam kehidupan sosial keagamaan. Selain itu, dengan kesadaran beragama serta ber-Pancasila visi kebangsaan akan terwujud secara kolektif melibatkan semua elemen bangsa. ●

es,pun/es



Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. Foto: Tim/vml

# Kerapuhan Sosial Pangkal Terorisme

Aksi terorisme yang memecah-belah konsentrasi bangsa harus diselami dan digali hingga ke akar-akarnya agar dapat memberantas tuntas tindakan yang bertentangan dengan rasa kemanusiaan serta tidak dibenarkan oleh ajaran agama manapun.



## MEMBERANTAS

terorisme ibarat mendaki sebuah jalan terjal. Sebab, menentukan latar belakang dan alasan orang melakukan

terorisme bukanlah urusan mudah. Mendeteksi kapan, di mana, dan bagaimana mereka melakukan aksi teror juga tidak gampang. Hal ini merupakan pandangan yang dituangkan oleh Anggota Komisi X DPR RI Hasannudin Wahid dalam rilisnya.

“Yang jelas, teroris tak mungkin menjadi sukarelawan atau sebagai subjek percobaan. Namun, memeriksa aktivitas mereka dari jauh dapat menyebabkan kesimpulan yang salah. Apalagi, teroris biasanya memiliki kepentingan atau tujuan ideologis dan politik yang bias,” terangnya.

Politisi Fraksi PKB ini menilai, pendekatan terbaik berhadapan dengan fenomena terorisme adalah memastikan bahwa keterlibatan seseorang dalam kelompok terorisme berakar pada kerapuhan sosial dan psikologisnya.

“Langkah selanjutnya adalah mengenali apa saja iming-iming yang biasa dijanjikan oleh pemimpin teroris ketika melakukan perekrutan. Setelah itu, baru dilakukan pendampingan kemanusiaan, berdialog dengan kaum terpapar dalam suasana cinta kasih yang tulus. Melalui pendekatan itu,

orang yang terpapar akan kembali berpikir secara akal sehat dan menyadari bahwa iming-iming dari pemimpin teroris adalah sebuah pepesan kosong belaka,” urainya.

Upaya untuk memberantas terorisme tidaklah mudah. Namun, dalam situasi yang tak mudah seperti itu, Hasan menyarankan untuk sebaiknya mengutamakan upaya pencegahan. Memang PP 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan, telah memuat banyak upaya pencegahan terorisme, di antaranya melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.

“Namun, dalam praktiknya, aparat antiteror Indonesia terdiri dari BNPT, Densus 88, Detasemen Penanggulangan Teror, dan intelijen, tak bisa leluasa mengambil tindakan terhadap mereka yang terpapar radikalisme dan paham terorisme. Sebelum ada bukti yang mengarah ke aksi teror. Penindakan terhadap mereka yang belum menjalankan aksi teror sering ditentang dengan alasan hak asasi manusia,” tandasnya.

Situasi tersebut tentu akan menjadi kendala upaya pemberantasan terorisme. Oleh



Anggota Komisi X DPR RI Hasannudin Wahid

karenanya, negara diharapkan segera menyediakan payung hukum yang lebih memadai lagi. Tujuannya agar aparat antiteror lebih leluasa melakukan upaya pencegahan. Untuk kemudian bertindak mendampingi siapapun yang terindikasi terpapar ideologi radikal dan terorisme. ● es



# Terorisme, Kekerasan, dan Kebhinnekaan

Oleh: **Haikal Kurniawan**

Editor pelaksana website [Suarakebebasan.id](http://Suarakebebasan.id)

Tindakan bom bunuh diri kali ini dilakukan oleh pasangan suami istri. Berdasarkan berita yang dilansir oleh [detik.com](http://detik.com), pelaku perempuan dalam serangan tersebut dalam keadaan hamil ketika melakukan tindakan biadabnya ([Detik.com](http://Detik.com), 31/3/2021).

Serangan ini tentu merupakan hal yang sangat mencoreng toleransi dan kebhinnekaan di Indonesia. Tanah air kita merupakan negara yang direkatkan oleh gagasan Pancasila, dan bukan hanya milik satu agama saja, dan karena itu segala tindakan kekerasan, terlebih lagi terhadap kelompok agama minoritas, harus dapat kita selesaikan

agar tidak terjadi kembali.

Untuk itu, nilai-nilai toleransi merupakan hal yang wajib kita tanamkan kepada generasi penerus bangsa sedini mungkin. Bila kita tidak mampu menanamkan kesediaan untuk menerima perbedaan di bawah payung Indonesia kepada anak-anak kita, tentu akan sangat sulit untuk menangkal kebencian, tindakan kekerasan, hingga serangan terorisme terhadap kelompok-kelompok yang berbeda.

Sekolah sebagai lembaga tempat para penerus bangsa menimba ilmu tentu harus memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-

**P**agi hari, tanggal 28 Maret 2021 lalu, Indonesia kembali berduka. Sebuah serangan teroris bom bunuh diri kembali terjadi di tanah air. Serangan kali ini menimpa Gereja Katedral di Makassar, ketika tengah mendekati Hari Besar Paskah.





nilai toleransi dan kebhinnekaan. Lembaga pendidikan tidak boleh justru menjadi tempat yang diskriminatif dan mengajarkan prasangka hingga kebencian kepada saudara-saudara sebangsa kita yang berbeda.

Sayangnya, berbagai kejadian diskriminatif tersebut merupakan hal yang masih terjadi di berbagai tempat di tanah air. Pada tahun 2019 lalu misalnya, sebuah Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri di Yogyakarta mewajibkan para siswanya untuk mengikuti kegiatan kemah pada hari Paskah (kompas.com, 26/1/2021). Di awal tahun ini, kita juga dikejutkan dengan kabar sebuah sekolah negeri di kota Padang yang mewajibkan siswi non-muslim untuk mengenakan hijab (kompas.com, 24/1/2021).

Kejadian ini tentu merupakan sesuatu yang mencoreng kebhinnekaan kita, dan harus kita cegah agar hal yang sama tidak kembali terulang. Tidak hanya itu, kita juga harus mampu membangun program dan materi pengajaran yang sejalan dengan nilai-nilai kebhinnekaan dan keberagaman.

Program tersebut bisa diberlakukan dan diimplementasikan dalam berbagai bentuk. Sekolah misalnya, harus mampu menjadi tempat agar siswa-siswi dari berbagai agama dan keyakinan dapat berkumpul dan saling mengenal. Anak-anak kita harus mampu untuk berinteraksi dengan saudara-saudara sebangsa mereka yang berbeda, dan tidak hanya berteman dengan mereka yang memiliki keyakinan dan agama yang sama.

Bila kita berhasil menanamkan nilai-nilai toleransi dan pluralitas kepada anak-anak kita, yang merupakan penerus bangsa, maka mereka terbiasa dengan perbedaan dan keragaman. Dengan demikian, kita dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian ditengah keberagaman, dan memperkuat persatuan kita sebagai bangsa.

Kerukunan dan pluralitas antar umat beragama di Indonesia sendiri bukanlah nilai-nilai asing yang berasal dari luar.

## BILA KITA BERHASIL MENANAMKAN NILAI-NILAI TOLERANSI DAN PLURALITAS KEPADA ANAK-ANAK KITA, YANG MERUPAKAN PENERUS BANGSA, MAKA MEREKA TERBIASA DENGAN PERBEDAAN DAN KERAGAMAN

Hal tersebut merupakan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dari tanah air kita, dan merupakan cita-cita dari para Bapak Pendiri negara kita.

Presiden Pertama Republik Indonesia, dan Bapak Proklamator kita, Ir. Soekarno, dalam pidato Beliau di depan Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945, menyampaikan gagasan Beliau mengenai kerukunan umat beragama di Indonesia. *“Apakah cara yang berkeadaban, ialah hormat menghormati satu sama lain. Nabi Muhammad telah memberi bukti yang cukup tentang menghormati agama lain. Nabi Isa pun demikian.”* Ucapan Ir. Soekarno dalam pidato Beliau (wartakota.tribunnews.com, 1/6/2018).

Untuk menciptakan kerukunan di tengah perbedaan agama yang sangat beragam di negara kita tentu bukan hanya menjadi tugas satu pihak saja, seperti lembaga pendidikan. Setiap elemen bangsa, seperti organisasi masyarakat, komunitas, hingga lembaga pemerintahan, harus mampu saling membantu dan bekerjasama agar pluralitas dan kebhinnekaan dapat tercipta di tengah masyarakat.

Selain itu, sangat penting untuk memiliki kerangka hukum untuk melindungi keberagaman, dan

menangani mereka yang ingin mencederai nilai-nilai kebhinnekaan yang kita miliki. Aparat penegak hukum harus mampu untuk menindak kelompok-kelompok yang gemar menyebarkan gagasan kebencian terhadap mereka yang berbeda, hingga mengadvokasi tindakan-tindakan kekerasan dan terorisme. Pencegahan adalah langkah yang sangat penting, dan jangan sampai kita kembali kebobolan sehingga pihak-pihak dan kelompok intoleran tersebut berhasil melakukan tindakan biadabnya dengan melukai dan membunuh orang-orang yang tidak bersalah.

Penanganan bagi mereka yang sudah terlanjur terjerumus ke dalam lubang hitam ekstrimisme juga tidak kalah pentingnya. Jangan sampai, ketika dipenjara, mereka justru menyebarkan ajaran kebencian mereka kepada penghuni lembaga permasyarakatan lainnya. Untuk itu, sangat penting untuk memisahkan mereka yang terjerat pidana menyebarkan kebencian hingga terorisme untuk dipisahkan dari warga binaan lainnya.

Setelah itu, kita juga harus mampu membantu mereka melalui berbagai program, seperti program pendidikan dan pelatihan kerja. Para pemuka agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan kebhinnekaan juga sangat penting untuk dilibatkan agar mereka yang terjerumus ke dalam pemahaman ekstrimisme untuk dapat keluar dan menjadi warga negara yang baik.

Bila kita berhasil melakukan hal tersebut, mulai dari pendidikan yang menjunjung tinggi kebhinnekaan, melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kerukunan, dan memiliki aparat penegak hukum yang kuat, serta program deradikalisasi yang efektif, maka perang kita melawan intoleransi, radikalisme, dan terorisme akan semakin memiliki dampak positif. Dengan demikian, semoga Indonesia dapat menjadi negara yang semakin damai dan rukun di masa yang akan datang. ●

# Holding Ultra Mikro, Harapan Kebangkitan Sektor UMKM dan UMi



Kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini telah membuat perubahan besar dalam *landscape* ekonomi digital dunia. Tentu hal ini menciptakan sebuah tekanan yang luar biasa terhadap pasar-pasar sektor usaha ultra mikro (UMi). Terlebih Indonesia saat ini memiliki 60 juta lebih usaha ultra mikro yang masih berjuang terhadap dampak pandemi.

**D**emi mendorong kebangkitan sektor UMKM serta UMi, pemerintah telah menggagas program privatisasi

untuk pembentukan ekosistem ultra mikro yang kemudian populer disebut dengan holding ultra mikro. *Holding* ini melibatkan tiga entitas BUMN, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia, PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani.

Gagasan pembentukan *holding* ultra mikro oleh Kementerian BUMN telah mendapat persetujuan dari berbagai pihak termasuk dari DPR RI. Tujuan dari sinergi ekosistem BRI, Pegadaian, dan PNM ini sendiri adalah untuk mempermudah akses pelaku usaha ultra mikro agar dapat menjangkau layanan keuangan formal yang selama ini sulit digapai.

Hal tersebut persis seperti yang diungkapkan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima yang menyebut bahwa mayoritas dari total 60 juta pelaku sektor UMi belum mendapatkan akses terhadap fasilitas keuangan dari sektor formal. Sehubungan dengan itu, pembentukan ekosistem Holding BUMN Ultra Mikro yang berkualitas dinilai menjadi sangat penting. Terutama dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional, mengurangi kesenjangan, serta pemberdayaan pelaku sektor usaha tersebut.

"Pembentukan ekosistem Holding Ultra Mikro yang kuat membutuhkan dukungan dari BUMN, yang nantinya akan dilakukan melalui integrasi tiga BUMN yaitu Bank BRI yang akan fokus mikro banking, Pegadaian pada pembiayaan gadai dan PNM yang akan fokus pada pembiayaan kelompok," kata Aria Bima dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pertengahan Maret lalu.

Melalui integrasi Holding Ultra Mikro, politisi PDI-Perjuangan itu berharap, sektor usaha ultra mikro akan lebih mendapatkan kemudahan akses pendanaan kepada lembaga keuangan formal sehingga akan berdampak



PEMBENTUKAN  
EKOSISTEM HOLDING  
ULTRA MIKRO YANG  
KUAT MEMBUTUHKAN  
DUKUNGAN DARI  
BUMN

Aria Bima. Foto: Azka/mv

pada peningkatan daya saing yang mendukung penguatan ekonomi nasional. Meski begitu, Komisi VI DPR RI masih memiliki sejumlah catatan terkait pembentukan holdingisasi tersebut.

“Catatan terkait akses data pelaku sektor UMKM yang *database* keuangan nonBank-nya bisa bersifat atau akan terbuka melalui berbagai integrasi data yang ada. Melalui kolaborasi ini, dunia internasional akan mengerti persis kekuatan ekonomi Indonesia akan terlihat entitas yang spesifik di pelaku usaha UMKM, yang bisa memberi penguatan mewujudkan gagasan-gagasan besar pemerintah untuk memajukan sektor usaha tersebut, atau malah justru sebaliknya,” ungkapnya.

Ditargetkan oleh Wakil Menteri

BUMN Kartika Wirjoatmodjo, integrasi BUMN pada holding akan menciptakan efisiensi biaya dana (*cost of fund*) dari BUMN terlibat. Lalu, sinergi jaringan, sehingga ekspansi usaha bisa dilakukan dengan biaya yang lebih murah, sehingga *cost of serve* dan *acquire customer* bisa menjadi lebih murah.

“Selanjutnya, kehadiran *holding* BUMN untuk UMI diproyeksi menghasilkan sinergi digitalisasi dan platform pemberdayaan pelaku usaha kecil di Indonesia. Sinergi ini akan menghadirkan pusat data UMKM yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber data UMKM dalam skala nasional,” terang Tiko di Gedung DPR RI, pertengahan Maret.

**Dorong Diversifikasi Pembiayaan**

Kehadiran *holding* ultra mikro nantinya juga diharapkan dapat mendorong inklusivitas ekonomi nasional. Dengan demikian tidak hanya keuangan inklusif yang didorong, namun juga mendorong ekonomi inklusif. Melalui kehadiran *holding* ultra mikro, maka pelaku usaha ultra mikro akan dilibatkan dalam kegiatan perekonomian secara komprehensif dan menyeluruh.

Dengan kata lain, roda perekonomian Indonesia tidak lagi bertumpu atau dijalankan oleh segelintir kelompok pelaku usaha tertentu, melainkan seluruh lini pelaku usaha mulai dari angkatan kerja baru yang mulai merintis ultra mikronya sampai kepada pengusaha menengah dan besar yang notabene berasal dari pelaku ultra mikro lama yang berhasil naik kelas dan turut menggerakkan perekonomian nasional.

Bicara mengenai inklusi perekonomian nasional, Anggota Komisi VI DPR RI Supratman Andi Agtas mendorong agar capaian inklusi ekonomi nasional yang saat ini berada di angka 70 persen, dapat segera menyentuh target 90 persen dengan memanfaatkan *holding* ultra mikro tersebut. Ia mendorong diciptakan diversifikasi terkait sistem pembiayaannya.

“Saat ini hanya kurang lebih sekitar

70 persen dan targetnya menjadi 90 persen, mungkin ada baiknya jika lembaga-lembaga, katakanlah perbankan di luar BRI umpamanya, atau juga Pegadaian terkhusus juga Permodalan Nasional Madani, mungkin bisa melakukan diversifikasi terkait dengan pembiayaan dalam rangka untuk mencapai target inklusi keuangan kita sampai 90 persen,” imbuhnya.

Politisi Partai Gerindra ini melanjutkan pengembangan berbagai macam fitur-fitur keuangan untuk para pelaku usaha sektor UMi yang sifatnya efisien dan inovatif sangat dibutuhkan saat ini. Sebab, ketiga entitas tersebut memiliki target market yang berbeda dan dinamis. Pegadaian dan BRI penyalurannya bersifat pinjaman. Sementara PNM sifatnya *mobile* karena melakukan pendampingan pada UMKM.

“Itu bisa menjadi *venture capital* atau juga mungkin membuat *platform* dalam pengertian ada semacam *platform equity crowd funding* yang bisa dilakukan, dimana memungkinkan PNM itu bisa masuk sebagai *sale holder* di dalam unit UMKM. Kalau kemudian itu bisa dilakukan, tentu akan jauh lebih baik karena tanggung jawabnya tidak hanya sekedar untuk menyalurkan pinjaman, tetapi juga bertanggung jawab terhadap pengembangan dunia usaha apalagi di sektor ultra-mikro ya,” ungkapnya.

Dengan adanya *holding* dan peta jalan (*roadmap*) yang dibuat oleh pemerintah, DPR RI benar-benar berharap ada keberpihakan kepada rakyat kecil. Artinya rakyat kecil semakin mudah dan murah mendapatkan akses modal. Aktivitas ini juga akan berdampak pada *market* yang semakin luas bagi tiga entitas BUMN ini. Yang kedua, jaminan tidak adanya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Performa masing-masing entitas yang memang selama ini sudah baik, harus didorong menjadi lebih baik. Hal ini merupakan tantangan penggabungan entitas BUMN yang memiliki *market* dan fungsi yang berbeda. DPR tentunya akan terus mengawasi praktik tersebut di lapangan. ● er/sf

# Tahun Penentu bagi Pemerintah Kembalikan Defisit ke Ambang Batas Normal

Pembahasan APBN 2022 akan sangat strategis dalam menentukan arah keberlanjutan pembangunan nasional di masa mendatang. APBN 2022 akan menjadi masa transisi pemerintah untuk memasuki APBN 2023 dimana ambang batas defisit maksimal akan kembali ke angka 3 persen dan rasio utang negara bisa kembali diturunkan, sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

**S**ebenarnya pemerintah telah diberi kewenangan dalam Perppu 1 Tahun 2020, dan disempurnakan dalam UU Nomor 2 Tahun 2020, untuk menetapkan batas defisit anggaran melampaui 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan pandemi. Skema stabilitas sistem keuangan itu, akan berlangsung

sampai akhir tahun anggaran 2022 dan pada tahun 2023 batasan defisit akan kembali normal di angka 3 persen.

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Mohamad Said mengatakan bahwa pemerintah dan DPR sepakat untuk menempuh langkah di luar kebiasaan atau langkah *extra ordinary* dalam penanganan pandemi Covid-19. Berbagai upaya

dilakukan, salah satunya dengan cara melebarkan defisit anggaran sebesar Rp1.039,2 triliun atau setara 6,34 persen PDB pada ABPN 2020. Sampai dengan akhir tahun lalu, realisasi defisit telah mencapai sebesar Rp 956,3 triliun atau 6,09 persen dari PDB.

"Pemerintah memang sudah mengalokasikan pembiayaan anggaran mencapai Rp1.190,9 triliun yang sumber utamanya berasal dari pembiayaan utang yang mencapai Rp1.226,8 triliun, untuk memenuhi kebutuhan defisit yang besar. Sayangnya kondisi ekonomi 2021 belum sepenuhnya pulih, walaupun pertumbuhan ekonomi sudah dipatok 5 persen, tetapi profil APBN 2021 masih menunjukkan beban yang cukup berat," kata Muhidin dalam rapat kerja Banggar DPR RI dengan



Wakil Ketua Banggar DPR RI Muhidin Mohamad Said. Foto: Jaka/mv

## APBN Dari Tahun Ke Tahun



Masa transisi RAPBN tahun 2021, defisit anggaran diperkirakan mencapai **Rp971,2 triliun** atau setara **5,5 persen** dari PDB yang masih akomodatif terhadap proses pemulihan ekonomi.

Dari angka tersebut, namun menurun dibandingkan defisit anggaran di tahun **2020 sekitar 6,34%** dari PDB atau sebesar **Rp1.039,2 triliun**.

Arah kebijakan defisit anggaran di tahun 2021 tersebut sejalan dengan **Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020** yang menetapkan **Perppu Nomor 1 Tahun 2020**.

**Dibutuhkan kebijakan countercyclical** yang kuat untuk akselerasi pemulihan ekonomi nasional dalam situasi ketidakpastian berakhirnya pandemi COVID-19.

Sumber: Data KEMENKEU dan Pidato Presiden 2020

### Defisit Anggaran:

#### ● Pendapatan Negara

**Rp1.776,4 T**  
RAPBN 2021

**Rp1.699,9 T**  
Outlook 2020

#### ● Belanja Negara

**Rp2.747,5 T**  
RAPBN 2021

**Rp2.739,2 T**  
Outlook 2020

#### ● Pembiayaan Anggaran

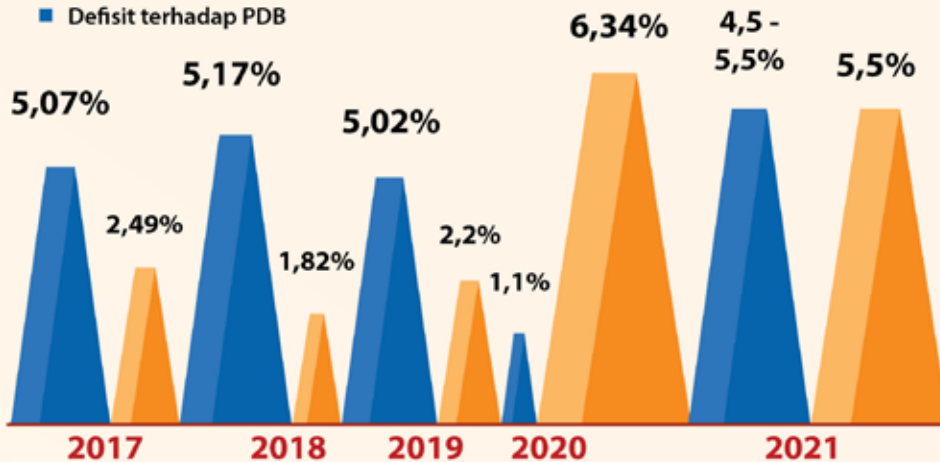
**Rp971,2 T**  
RAPBN 2021

**Rp1.039,2 T**  
Outlook 2020



### RAPBN dari tahun ke tahun

- Pertumbuhan ekonomi
- Defisit terhadap PDB





SEKTOR INDUSTRI  
MULAI MENGGELIAT,  
TERLIHAT DARI  
PMI YANG SUDAH  
BERADA DI ATAS  
ANGKA 50. PROSPEK  
PERTUMBUHAN  
2021 LEBIH BAIK  
DARI PROYEKSI  
SEBELUMNYA.

Muhidin Mohamad Said. Foto: Jaka/rvi

pemerintah, awal April lalu.

Defisit APBN 2021 diprediksi akan mencapai 5,7 persen PDB atau sebesar Rp1.006,4 triliun. Politisi Partai Golkar itu menjelaskan, untuk menutupi defisit, perencanaan pembiayaan utang direncanakan sebesar Rp1.177,4 triliun. "Saat ini, pemerintah dan DPR akan memasuki pembahasan pendahuluan RAPBN 2022. *Roadmap* pada tahun tersebut menjadi tahun terakhir dimana pemerintah memiliki kewenangan untuk melampaui defisit di atas 3 persen," imbuh Muhidin.

Ekonom sekaligus Rektor Unika Atma Jaya Agustinus Prasetyantoko, saat hadir dalam rapat Banggar itu sempat

menyampaikan pandangannya terkait strategi pengurangan stimulus ekonomi. Menurutnya, arah kebijakan fiskal harus mampu memastikan pemulihan ekonomi tetap berlanjut tetapi pemerintah dihimbau untuk jangan terlalu cepat mengurangi stimulus. Meski situasi pandemi mulai terkendali, risiko terhadap adanya gelombang baru tetap perlu diwaspadai.

"Sektor industri mulai menggeliat, terlihat dari PMI yang sudah berada di atas angka 50. Prospek pertumbuhan 2021 lebih baik dari proyeksi sebelumnya. OECD memproyeksi pertumbuhan perekonomian Indonesia di tahun 2021 akan meningkat dari 4,0 persen ke 4,9 persen sebagai optimisme pemulihan ekonomi. Untuk itu kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif masih diperlukan guna menunjang pemulihan," ungkap Prasetyantoko.

Stimulus fiskal 2022, dinilai Prasetyantoko, harus dilakukan secara *timely, temporary* dan *targeted*. *Timely* berarti harus ada *exit strategy*, khususnya skenario fiskal terkait pengurangan subsidi. *Temporer* berarti baru bisa dikurangi jika momentum pemulihannya sudah solid, yang mana peran fiskal akan digantikan oleh konsumsi, investasi dan aktivitas ekspor. Sementara *Target* berarti fokus transformasi dalam rangka pemulihan ekonomi. "Indikator pengurangan stimulusnya akan bisa dilakukan jika pertumbuhan ekonomi tahun 2021 di atas 4,5 persen, maka stimulus berpotensi dikembalikan pada level 3 persen pada 2023," pungkasnya.

Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad. Menurutnya proses *recovery* tahun 2021 di Indonesia tidak akan berjalan terlalu signifikan jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Meski begitu, sejumlah negara termasuk Indonesia masih termasuk dalam level moderat. Perkiraan postur APBN 2022 skenario defisit dinilai INDEF masih dalam level optimis, dengan skenario defisit moderat di batas bawah Rp-770,75

triliun (-4,6 persen PDB).

"Utang kita cukup realistis, jika dibandingkan dengan berbagai negara memang tidak mungkin terelakkan karena sumber penerimaan pajak alami penurunan. Risiko yang akan terjadi dengan perkiraan APBN 2022, adanya risiko stagnasi pendapatan negara. Tahun 2021 memang diprediksi akan terjadi *recovery*, tetapi sejauh mana *recovery* akan terjadi karena itu akan mendorong seberapa besar rasio belanja dan pendapatan negara," jelas Tauhid.

**2021 HARUS JADI MOMENTUM  
AKSELERASI PEMULIHAN EKONOMI**

Akselerasi pemulihan ekonomi nasional harus terus dilakukan untuk menjaga momentum optimisme berjalan dengan baik pada tahun 2021 ini. Upaya percepatan tersebut memerlukan sinergi dari semua sektor pemerintah terkait. Keberlanjutan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tahun 2021, selain fokus terhadap penanganan di bidang kesehatan, juga membantu menciptakan lapangan kerja melalui program prioritas dan dukungan kepada dunia usaha. Tahun 2021, anggaran pemulihan ekonomi dialokasikan sebesar Rp699,43 triliun atau naik sebesar 21 persen dari realisasi sementara Program PEN 2020.

Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto mendorong akselerasi PEN dilakukan melalui program vaksinasi secara gratis kepada masyarakat, akselerasi program PEN, dan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, kebijakan Peningkatan Pembiayaan Dunia Usaha dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi oleh KSSK berkesinambungan memberikan daya ungkit sehingga momentum pemulihan ekonomi terjadi di Kuartal II 2021.

"UU Cipta Kerja menjadi instrumen utama dalam mengatasi berbagai tantangan nasional, seperti penyediaan lapangan pekerjaan, pemberdayaan UMKM, dan reformasi regulasi, untuk



Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto. Foto: Geraldi/mvi

mendorong transformasi ekonomi dan pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, implementasi dari UU Cipta Kerja dan peraturan turunan yang telah terbentuk tersebut dapat langsung memberikan geliat ekonomi melalui penciptaan demand dan supply dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional,” kata Dito saat menghadiri ‘Sarasehan Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional’ di Bali, awal April lalu.

Sarasehan yang juga dihadiri Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Kehormatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), itu menjadi komitmen bersama DPR dan Pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Dito optimis bahwa dengan fundamental dan geliat ekonomi yang terakselerasi dan tercipta di Kuartal I 2021. Terlebih dari berbagai kebijakan yang dirumuskan oleh Komisi XI DPR RI dengan Kemenkeu, BI, OJK, dapat mendukung keseluruhan baik di sisi *demand* dan *supply* sehingga ekonomi akan *rebound* sesuai harapan.

“Sinergitas kebijakan bersama-sama tersebut, perekonomian Indonesia tahun 2020 tidak mengalami pemburuan yang sangat dalam. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia secara *year-on-year* terkontraksi minus 2,07 dan menjadi yang terkecil diantara negara-negara G20 dan ASEAN. Melihat tren pemulihan ekonomi ini, *confidence* dan optimisme menjadi kunci agar keseluruhan kebijakan di

tahun 2021 dapat menjadi daya dorong keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional,” tegasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku optimis tahun ini terjadi akselerasi pemulihan ekonomi. Kementerian Keuangan menyatakan akan terus melakukan sinergi dengan OJK dan Bank Indonesia untuk terus mendorong percepatan pemulihan ekonomi yang fokus pada sektor kesehatan, bantuan sosial untuk masyarakat dan bantuan pada dunia usaha.

Senada dengan hal tersebut, Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan pihaknya sebagai otoritas moneter akan terus *all out* untuk pro terhadap pertumbuhan ekonomi. Berbagai kebijakan sudah dikeluarkan bank sentral dan akan terus bersinergi dengan Pemerintah, OJK, dunia usaha dan dunia perbankan untuk mempercepat upaya pemulihan ekonomi nasional.

Di sisi sektor jasa keuangan, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso juga telah mengeluarkan kebijakan stimulus untuk menjaga stabilitas pasar keuangan. Mulai dari pelarangan *short selling*, *buyback saham*, *asymmetric auto rejection*, *trading halt* dan sebagainya. Selain itu, kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan juga sudah diperpanjang hingga Maret 2022 untuk menjaga sektor usaha tetap bertahan dan menjaga stabilitas sektor keuangan dari dampak pelemahan ekonomi. ● atw/sf

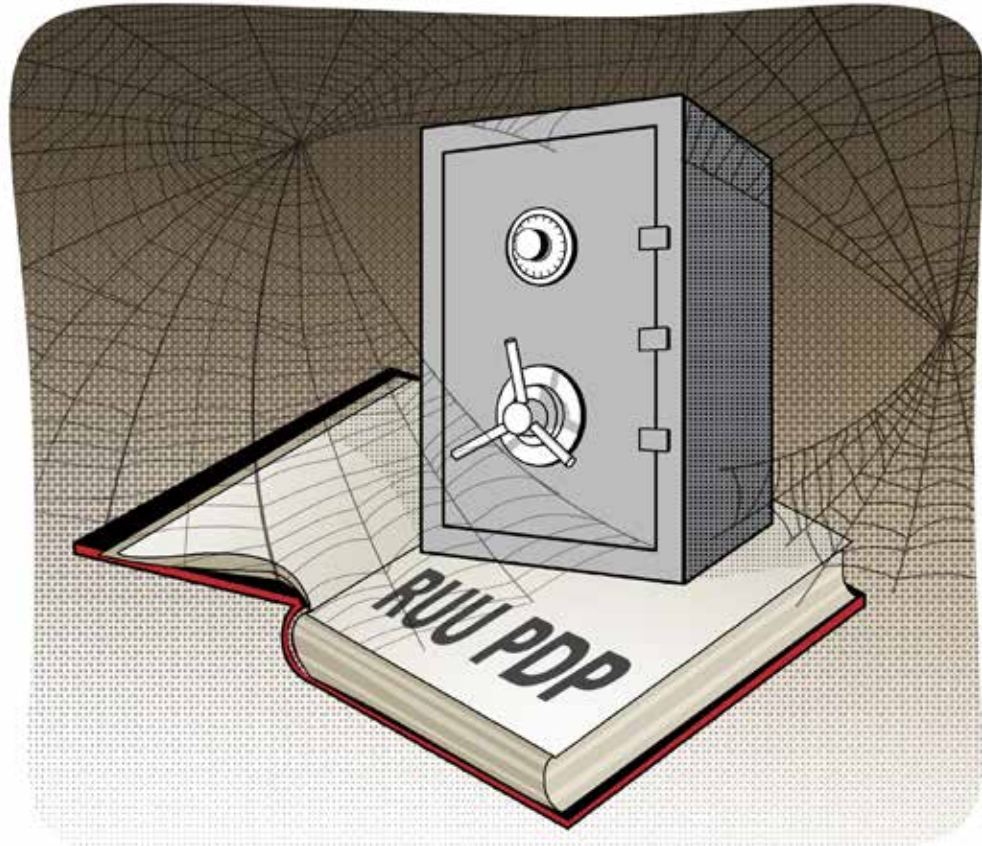


## UU CIPTA KERJA MENJADI INSTRUMEN UTAMA DALAM MENGATASI BERBAGAI TANTANGAN NASIONAL

Dito Ganinduto. Foto: Geraldi/mvi

# Otoritas Independen Jamin Pelindungan Data Pribadi

Sepanjang Mei hingga November 2020, muncul rentetan kasus kebocoran data baik yang dialami pemerintah maupun perusahaan swasta, seperti platform *e-commerce*. Dalam kasus kebocoran tersebut, peretas mencuri data pengguna lalu menjualnya ke forum gelap. Adapun data yang tersebar di antaranya seperti nama akun, alamat e-mail, tanggal lahir, nomor telepon, dan beberapa data pribadi lainnya yang tersimpan dalam sebuah file (dump) database.



**R**ancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) menjadi suatu upaya dalam memperkuat perlindungan keamanan data pribadi masyarakat, terlebih pada saat ini sangat rawan terjadi kebocoran maupun penyalahgunaan yang tidak jarang juga merugikan masyarakat. Pembahasan RUU PDP masih berlangsung antara Komisi I DPR RI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Salah satu perdebatan hakiki yang bergulir mengenai status kelembagaan otoritas pengawas pelindungan data pribadi.

Mengacu pada instrumen perjanjian internasional seperti *EU General Data Protection Regulation* (GDPR), pembentukan otoritas independen

pengawas pelindungan data pribadi merupakan ketentuan penting yang perlu dimuat dalam RUU PDP. Dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU PDP pada awal April lalu, pemerintah maupun DPR belum menemui kesepakatan apakah otoritas pengawas pengelolaan data itu berada di bawah naungan pemerintah ataukah bersifat independen.

Dalam beberapa pertemuan rapat panja, draf pemerintah menginginkan badan pengawas pelindungan data berada di bawah Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kominfo, sementara semua fraksi di Komisi I DPR RI sepakat agar otoritas itu bersifat

independen. Dalam pasal 58 dan 59 RUU PDP, pemerintah berperan menjadi pengawas pelindungan data pribadi. Hal ini menjadi perdebatan dalam rapat Panja. Sebab, RUU ini memberikan pemerintah kewenangan sebagai pengendali dan prosesor data pribadi.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menilai ketika fungsi regulator dan pengawasan ada di tangan pemerintah menjadi rancu. Sebaliknya, diperlukan desain lembaga pengawas yang independen dalam rangka menjamin pelindungan data pribadi. "Saya kira pangkal permasalahannya ada disini, kian



banyak permasalahan data pribadi akan diselesaikan dari isu ini,” kata Ketua Panja RUU PDP itu saat memimpin rapat Panja.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, sebelum melanjutkan ke pembahasan teknis lainnya dalam RUU PDP, status lembaga pengawas harus disepakati bersama, agar pembahasan RUU ini menjadi optimal. Ia mengatakan, seluruh fraksi di Komisi I DPR RI sepakat agar otoritas pengawas tersebut harus bersifat independen karena mengikat bagi sektor publik dan privat. Independen yang dimaksud yakni mandiri secara kelembagaan, birokrasi, manajemen, komisioner dan sumber daya manusia, hingga kontrol keuangan.

Apalagi, data pribadi saat ini sudah menjadi komoditas strategis baik oleh publik, swasta, bisnis maupun pemerintah. Karenanya, lembaga pengawas independen, menjamin tidak ada konflik kepentingan, non intervensi, serta memberikan kesetaraan hukum perlindungan data pribadi dan transparansi jika ada penyalahgunaan data pribadi. “Kita membayangkan permasalahan big data ini semakin besar ke depannya, bagaimana mungkin ketika urusan sebesar ini ada di bawah Kementerian yang dia juga mengatur menteri,” jelas Kharis.

Selain itu, pengawas independen menjamin prinsip *good governance* yaitu pemisahan antara regulator, pengawas dan pengelola/pengguna data pribadi, serta memberi jaminan penyelesaian perkara yang efektif. Sebab, pemerintah sebagai salah satu bagian pengendali data akan menjadi objek dalam pengawasan tersebut. Otoritas perlindungan data pribadi ini memiliki tugas melakukan sosialisasi, mengawasi, menangani sengketa administrasi.

Kharis juga mengharapkan otoritas independen ini dapat berwenang menyelesaikan sengketa melalui mediasi yang diajukan subjek data pribadi sesuai dengan landasan UU. “Hal ini diperlukan agar ada afirmasi yang lebih akomodatif terhadap perkembangan teknologi, sehingga di satu sisi tidak

## KITA MEMBAYANGKAN PERMASALAHAN BIG DATA INI SEMAKIN BESAR KE DEPANNYA, BAGAIMANA MUNGKIN KETIKA URUSAN SEBESAR INI ADA DI BAWAH KEMENTERIAN YANG DIA JUGA MENGATUR MENTERI

Abdul Kharis Almasyhari. Foto: Andri/nvl



menghambat karena sedikit – sedikit langsung berhadapan dengan hukum dan pengadilan,” terang legislator dapil Jawa Tengah V itu.

Hadirin otoritas independen menentukan kesetaraan atau *adequacy* UU PDP suatu negara EU GDPR. Bentuk otoritas tunggal diterapkan di beberapa negara di Eropa seperti Jerman, Swiss, dan Inggris. Model tunggal ini menggabungkan otoritas dalam perlindungan data pribadi dengan otoritas terkait keterbukaan informasi. Di Asia, baru Jepang yang memiliki UU Pelindungan Data Pribadi yang setara dengan EU GDPR. Sementara, Korea Selatan dalam proses memperoleh pernyataan kesetaraan dari Komisi Eropa.

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Rizaldi menyampaikan jika merujuk pada regulasi perlindungan data umum milik Uni Eropa, sebagai salah satu acuan

untuk menyusun hukum perlindungan data pribadi di berbagai negara saat ini, maka perlu dibentuk lembaga khusus yang mengawasi pelaksanaan perlindungan data pribadi. Diketahui, Indonesia tidak memiliki satu lembaga khusus yang mengawasi perlindungan data pribadi secara menyeluruh.

Hal ini karena pengaturan perlindungan data pribadi masih tersebar di masing-masing sektoral. “Kalau di GDPR itu ada ICO atau Independent Commissioner, jadi kalau ada yang salah, dia yang menentukan pinalti dan sanksi. *Nah*, di kita itu merujuk ke undang-undang yang mana, siapa yang bertanggung jawab menentukan dia pinalti, menentukan setiap data *compliance officer* itu siapa,” tanda politisi Partai Golkar itu.

Bobby menilai, UU PDP akan menjadi acuan untuk masalah data pribadi yang lebih luas, yang menyebabkan kerugian besar bagi negara, termasuk melindungi data publik yang ada rahasia negara. “Jadi yang berbahaya itu bukan hanya soal platform komersil. Karena yang kita atur ini bukan hanya perilaku konsumen melakukan jual-beli saja, tapi bagaimana (melindungi) data perbankannya, bagaimana nomor telepon bisa dilacak, bukan hanya soal data yang bocor-bocor di platform, itu hanya sebagian kecil,” jelas legislator dapil Sumatera Selatan II itu.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Samuel A Pangerapan mengusulkan agar pengawasan perlindungan data pribadi berada di bawah Kominfo. Menurut Samuel, pemerintah saat ini sudah memiliki sistem tata kelola pengawasan yang baik. Ia mencontohkan ada lembaga Ombudsman yang bertugas mengawasi pelaksanaan pelayanan publik. “Jadi *check and balance*-nya sudah tercover semuanya. Legislatif bisa memanggil eksekutif dan bila eksekutif sebagai penyelenggara layanan publik bisa melakukan pelanggaran itu bisa juga ditegur oleh Ombudsman,” ucap Samuel.

● ann/sf



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani saat meresmikan perubahan nama Bandar Udara Pekonserai menjadi Bandar Udara Muhammad Taufiq Kiemas di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, Sabtu (10/4/2021).  
Foto: Eno/Man



Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin meninjau lokasi peledakan bom di Gereja Katedral, Makassar, Sulsel, Kamis (1/4/2021). Foto: Mario/Man



Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar saat mengunjungi sekaligus meresmikan Nangkula Park di Desa Kendalbulur, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Senin (5/4/2021). Foto: Ist/Man

# Sepak Terjang Sihar Sitorus, Dari Urusan Bola Hingga Terjun Kompetisi Pilkada



Sihar Pangihutan Hamonangan Sitorus Pane merupakan nama yang tak asing bagi panggung politik Indonesia. Ya, Anggota Komisi XI DPR RI periode 2019-2024 dari Fraksi PDI-Perjuangan dan dapil Sumatera Utara II ini telah malang melintang di kancah perpolitikan nasional. Berawal dari pengusaha, jadi pengurus organisasi sepak bola, ditunjuk sebagai Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara, hingga akhirnya 'merumput' di Senayan. Ditemui di ruang kerjanya baru-baru ini, berikut cuplikan wawancara **Parlementaria** dengan putra kedua pengusaha D. L. Sitorus ini.

## BAGAIMANA ANDA MENJALANI MASA KECIL?

Saya lahir di Jakarta. Waktu kecil saya tinggal di daerah Tomang, daerah Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat. Masa kecil cukup bahagia, masa kecil yang berbeda dengan anak-anak sekarang. Dulu ya *kayak* anak-anak umumnya kita main bola, terus keliling kampung sama *temen-temen*. Anak kecil zaman dulu ya, adu main bola, terus mancing juga di kali tuh. Kalau latihan bola di Lapangan Trisakti. Sekarang udah *nggak* ada kayaknya Lapangan Trisakti.

Terus dulu kan daerah Grogol ada *empang*, *deket* situ ada kali. Nah di situ *tuh* saya naik getek (*rakit*) ke sekolah di Bunda Hati Kudus. TK-SD-SMP saya di Bunda Hati Kudus, di belakang rumah sakit jiwa (RSJ Dr. Soeharto Heerdjan) Jakarta. Saya dulu SD suka main bulutangkis.

Rumah di Tomang, jadi kalau latihan jalan kaki. Berangkat *nebang* temen, pulang kadang-kadang jalan kaki. Nah di situ lah kita belajar ngerokok, sambil jalan, kan *nggak* ada yang lihat. Gitu ya (*rasanya merokok*) *nggak* enak, *nggak* suka ngerokok akhirnya saya.

## DULU PERNAH BERCITA-CITA JADI ATLET BADMINTON?

Kalau zaman dulu semua anak kecil *pengen* jadi atlet badminton. Waktu itu zaman-zaman jayanya badminton kita. Dulu ada Liem Swie King, terus Lius Pongoh. Kita besar dan tumbuh dengan legenda-legenda bulu tangkis, dan bulutangkis juga jadi olahraga (*favorit*) kita waktu itu. Zaman dulu *mah* main (*bulutangkis*) *aja* begitu di kampung-kampung. Siapa ya dulu atlet bulu tangkis? Waktu zaman SD tahun 80 itu ada Lius Pongoh, Liem Swie King. Kalau (*pemain*) *double* kita masih lihat ada Candra sama Tjun Tjun (Johan Wahyudi), ada Candra Wijaya, sama lie Sumirat.

## AJARAN APA YANG PALING DITEKANKAN ORANG TUA KEPADA ANDA?

Saya lihat orang tua saya kerja *melulu*, jadi otomatis yang kerekam adalah kerja keras. Ajaran Batak salah satunya pendidikan, sekolah. Tiap (orang tua) mau *ngambil* raport, pasti kita panik, takut ada (nilai) merah *nggak* gitu. Kalau ada (nilai) merah, aduh jangan-jangan uang jajan dipotong, di-*strap*. Tapi untung saya naik kelas *melulu*, dan (nilai) merah *nggak* pernah. Jadi enggak terlalu- tapi tetep aja deg-degan. Ya, apalagi orang tua Batak ya, Batak kan narsis ya. *Hahaha*.

Kita lihat dari muda (orang tua) itu kerja-kerja, menekankan pendidikan, (dan) jangan lupa asal-usul gitu. Saya Betawi-Batak, lahir besar di (Jakarta) sini, terus yang diajarin orang tua saya, *hmm* apa ya, Batak kehidupannya begitu *sih*, ya paling yang diajarin yang hal yang berkaitan dengan adat istiadat. Zaman dulu, kita anak kecil juga disuruh ikut (acara-acara adat), jadi (kadang) *ngeselin*. Masa kecil suruh (ikut acara) adat berjam-jam, *nungguin*, *kagak ngerti* bahasanya. Terus Minggu *nggak* absen kita gereja. Disiram (air) kita kalau *nggak* bangun (pagi) *gitu* (buat ibadah ke gereja).

**Dalam dunia pendidikan, pada tahun 2005 Sihar memperoleh gelar Doctor of Business Administration dari Manchester Business School - Manchester, Inggris. Pada tahun 1998 dia lulus S2 dari program Diploma Business dari Strathclyde University, Glasgow. Pada 1993 ia mendapatkan gelar Master of Business Administration dari Creighton University, Omaha. Pada tahun 1991 lulus sarjana dengan gelar Bachelor of Science in Business Administration, University of Arizona - Amerika Serikat.**

**USA! MENJALANI PENDIDIKAN HINGGA SMA DI JAKARTA, ANDA MELANJUTKAN PENDIDIKAN KE AMERIKA SERIKAT. SAAT ITU, APA YANG MEMOTIVASI ANDA KULIAH DI LUAR NEGERI?**

Karena *nggak* diterima di mana-mana di sini (Indonesia). *Hahaha*. *Nggak gitu* juga *sih* ya, kita *ngalir* aja waktu itu. *Temen-temen* juga ada yang (sudah



Sihar Sitorus bersama Djarot Syaiful Hidayat saat kampanye Pilgub Sumatera Utara. Foto: dok/wnl

di sana, kayak seru juga gitu kan. Tapi setelah *nyampe* (Amerika) ya kita lama lama *mikir* juga. *Ngambil* jurusan apa ya? Nah jadi tantangan juga tuh, kita pikir, jika kita ngomong Inggris, kita sendiri aja *nggak* ngerti. Waduh minder *dong*, *down*-kan, mental jatuh juga. Cuma itu membuat untuk memaksa diri kita, dorong-*in* diri kita buat negur orang, ngajak ngobrol. Ya gitu, di awal-awal cukup susah juga *sih*.

**GIMANA RASANYA JAUH DARI KELUARGA? DAN APA TANTANGANNYA?**

Hmmm orang tua dan keluarga waktu itu kita *nggak* terlalu *homesick* kayak orang-orang bilang *sih*, justru kita kalau dibilang malah *nggak* pulang-pulang. Kalau tantangan akademis kita gak terlalu ditarget juga, yang penting lulus. Terus dulu kan ada persepsi kalau orang Indonesia, ke Amerika tuh palingnya cuma main-main, *badung-badung* gitu. (Saya) Mematahkan mitos itu *aja* kalau mau dibilang tantangan. Dan di Amerika enakya bisa pindah-pindah kuliah, jadi kita bisa cari pengalaman di kota lain. Kebetulan saya bosan di kota kecil, 2 tahun kemudian saya pindah ke Arizona.

**Dalam dunia olahraga, Sihar dikenal aktif dan peduli pada olahraga sepakbola. Klub yang diasuhnya**

**terbilang cukup banyak diantaranya, Medan United FC, Medan Chiefs, Pro Duta Football Club, dan Nusaina FC, dia juga pernah memimpin klub PSMS Medan. Dalam organisasi induk sepakbola, Sihar juga pernah menduduki posisi sebagai anggota Exco PSSI, Ketua Komite Kompetisi PSSI dan Wakil Ketua Staf Ahli Timnas Indonesia. Sihar juga dikabarkan memiliki mayoritas saham klub bola kasta ketiga Liga Belgia.**

**ANDA JUGA TERLIBAT DALAM DUNIA SEPAK BOLA, BAGAIMANA CERITANYA?**

Pertama kan saya dari kecil hobi bola. *Nah* kebetulan di Amerika itu kampung itu kan juga ada kegiatan olahraga, kegiatan olahraganya itu sangat bisa dibilang profesional, penyelenggaranya professional, kompetisinya tinggi, dan kita bisa melihat atmosfer itu luar biasa. *Nah nyampe* di (Indonesia) sini, ada satu orang yang ngomong, kebetulan waktu itu PSMS Medan sedang kolaps, jadi diajak-*in* (buat mengurus). Oh iya juga ya, saya putra Batak ini, kayak basa-basi banget cuma menggandeng nama putra Batak. Tapi *nggak* bikin apa-apa, itu *sih* idealismenya.

Terus akhirnya kebetulan bola, kita suka bola, keceburlah saya di bola, itu

intinya. Terus kita bayangin waktu di Amerika penyelenggaranya profesional, pengelolaan klubnya juga profesional. Kalau kita yang pegang bisa nggak ya kayak begini, itu sih tantangannya buat saya.

**Sebelum menjadi pengusaha dan terjun ke dunia politik, Sihar pernah bekerja di PT Freeport Indonesia pada tahun 1993 hingga 1995. Sihar kemudian melanjutkan kariernya di PT Bursa Efek Jakarta pada 1995 hingga 1997. Selain itu, Sihar juga pernah menjadi tenaga ahli Kementerian Koordinator Kementerian Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan pada era kepemimpinan Puan Maharani (periode 2014-2019).**

**APA YANG MEMICU ANDA MULAI BERKECIMPUNG DI DUNIA POLITIK?**

Awalnya kan kita ada ketidakpuasan dengan kondisi yang ada. Wah harusnya ini bisa lebih baik nih. Cuma itu kan hanya sebagai pribadi gitu, kalau sendiri ya nggak bisa bikin apa-apa. Cuma kan pertanyaan itu ada dalam diri kita, apa yang bisa dilakukan. Nah kebetulan ada Pak Jokowi di periode pertama (2014-2019) itu yang memberikan angin segar. Dalam bayangan kita, wah ini bisa melalui satu perubahan, bisa maju ke politik. Boleh dibbilang saya penasaran, boleh juga rasa ingin tahu, *pengen* bisa, boleh dibbilang juga kadang-kadang kita mikir kita memberikan kontribusi gitu kan. Peran kita kecil, tapi minimal kita *nggak* jadi penonton doang.

**ANDA BERGABUNG DI PDI PERJUANGAN, LALU PADA TAHUN 2018 DIMINTA MENJADI CALON WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA. BAGAIMANA RESPON ANDA MENDAPAT PENUGASAN ITU?**

Waktu itu penugasan dari Bu Mega untuk mendampingi Pak Djarot Saiful Hidayat di Pilkada Sumatera Utara. Ya itu tantangan, karena saya tahu Sumatera Utara itu unik, egaliter, dan spiritnya karena tidak peduli siapa calonnya. Kita melihat itu sebagai suatu tugas



Sihar Sitorus bersama Istri tercinta. Foto: dok/ivi

yang berat karena Sumatera Utara itu sebenarnya barometer untuk di luar Jawa. Jadi itu makanya saya bilang berat karena dia (Sumut) barometer dengan berbagai macam alasannya. Demografinya sangat beragam baik dari sisi etnis, agama, bahasa, kemudian kontribusi sumber daya alam yang juga besar. *Challenging* jadinya ya.

**SAAT HASIL PILKADA SUMUT 2018 DIUMUMKAN, TERNYATA ANDA DIKALAHKAN OLEH LAWAN. BAGAIMANA ANDA MEMANDANG KEGAGALAN ITU?**

Saat itu ya pasti kecewa. Reaksi awal kecewa, tapi kemudian ya (mengakui) kalah *pinter* aja titik. Kalah jago, kalau kita main bola, ya kalah jago. Jangan salah-*in* wasitnya. Jangan salah-*in* calon satunya yang ternyata *supporter*-nya lebih gede daripada *supporter* kita, ya kitanya aja kalah jago. Udah *se-simple* itu. Tapi kan kita cuma kita bisanya melihat ke belakang. Dalam proses itu memang kita harus punya perencanaan yang utuh dari A-Z. Kemudian kalau kita mau jalan, seharusnya *extra mile* lebih jauh dari pada yang seharusnya. Jadi saya nggak ada alasan (kalah) karena ini, karena itu.

**Gagal menjadi Wagub Sumut, Sihar beralih ke Pemilihan Legislatif. Tahun 2019, Sihar terpilih sebagai Anggota DPR RI dari dapil Sumatera Utara II yang meliputi 19 Kabupaten/Kota, meliputi Kabupaten Samosir, Tobasa, Humbahas, Taput, Sibolga, Tapteng, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu, Padang Sidempuan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Gunung Sitoli, Nias, Nias Utara, Nias Barat, dan Nias Selatan. Sihar meraup suara tertinggi se-Sumut.**

**APAKAH ADA PERBEDAAN SAAT ITU MENCALONKAN DIRI SEBAGAI CAWAGUB DAN CALEG?**

Beda ya, beda *game*, pertandingannya beda. Kalau waktu perebutan eksekutif, gubernur dan wakil gubernur pasangan cuma dua calon. Memang benar (untuk di Pileg) sudah ada modal, karena kemarin sudah jalan (kampanye pilgub) dan itu sangat membantu. Jadi saya kampanye tiga kali dapil saya tuh saya kelilingin, setiap kota kabupaten. Jadi kalau ibarat kita lari di GBK (Stadion Gelora Bung Karno) saya jalanin tiga putaran. Kita

harus mau jalan lebih jauh daripada yang kita target-in.

**ANDA MENGENALKAN 'TECHNOPOLITICONOMICS' SEBAGAI SALAH SATU DASAR KEBIJAKAN DAN PROGRAM DALAM DUNIA POLITIK. APA MAKSUD DARI 'TECHNOPOLITICONOMIC'?**

Technopolitico-nomics itu kita punya menu namanya gado-gado. Karna saya latar belakang teknis dan akademisi juga, jadi nggak akan lari dari kaidah-kaidah akademisi. Cek dan ricek itu ada. Kita melihat perdebatan dari pihak mana, ada data yang mendukung, kemudian kita bisa formulasikan suatu rekomendasi melalui proses politik. Latar belakang saya sebagai pengusaha yang seringkali pandangannya adalah *bottom line*. Pengusaha untung atau rugi, timbal baliknya apa, *cost benefit*-nya apa, dan sudut pandang saya melihatnya seperti itu. Gimana *nge-blend* ketiga hal itu, makanya saya didukung oleh tim yang kuat secara teknis juga untuk meramu ketiga hal tersebut.

**SETELAH TERPILIH, ANDA DITUGASKAN DI KOMISI XI DPR RI. APA TANTANGANNYA?**

Kalau di Komisi XI ini kan kita bicara makro. Kebijakan-kebijakan keuangan makro yang sering kali sebagai pengusaha kita gunakan sebagai acuan, sebagai asumsi-asumsi kita kemana arah

pertumbuhan ekonomi ini. Akan kemana nih suku bunga, yang menentukan apakah saya pinjam uang ke bank sekarang atau nggak ya. Kemudian perubahan peraturan itu apa aja sih, yang mempengaruhi di sektor riil, sektor yang di bawah. Itu sih relevansi daripada Komisi XI.

Dulu kita di bawah, hanya menerima apa yang dilempar dari langit kemudian *nyampe* di bumi, nah itu yang kita jalani. Nah sekarang kita ada di langit, *ngelemparin* (kebijakan) kan. Karena kita bicara makro, terus *connect* nggak sama sektor riil di bumi. Karena ini dunia baru, tentu ada aturan main yang saya masih menyesuaikan diri. Kalau dulu kita ngambil keputusan sendiri, sekarang kita sama temen-temen, sama pimpinan menetapkan kebijakan. Jadi kalau dilihat dari pengalaman belakang, ya oke lah di Komisi XI, saya menikmatinya.

**ANDA DIPERCAYA MENJADI WAKIL KETUA BKSAP DPR RI. BAGAIMANA ANDA MELIHAT PERAN DIPLOMASI PARLEMEN?**

Sebagai pimpinan, saya merasa menghormati dan menghargai penugasan yang diberikan oleh pimpinan fraksi kepada saya. Nah sekarang di saat pandemi Covid-19 begini, gimana nih BKSAP bisa membawa wajah Indonesia di mata parlemen lain. Karena kali ini bahasnya hanya tentang Covid-19 dan vaksin. Semua mengalami hal

yang sama, perekonomiannya agak melambat, kemudian berpikir gimana supaya warganya sehat, kemudian bisa keluar dari kesulitan ekonomi. Jadi kita *sharing* kepada parlemen lain, *sharing* pengalaman Indonesia menyikapi pandemi ini.

**BAGAIMANA ANDA MENJALANKAN FUNGSI DIPLOMASI PARLEMEN MELALUI BKSAP DPR RI?**

*Parle* dalam Bahasa Perancis artinya bicara. Karena itu kita bicara memperkenalkan wajah Indonesia (kepada dunia). Kita sebagai parlemen, bukan saja kita men-*sharing* dan menerima *sharing*, yang kemudian tentunya ketika ini menjadi relevan, ya kita angkat untuk masukan bagi eksekutif kita. Pemerintah kan mempertimbangkan banyak hal dari suatu kebijakan di negara lain seperti apa, terus gimana ke kita. Nah kita lebih *soft*, menceritakan supaya mereka (parlemen negar lain) tahu pandangan Indonesia terhadap suatu isu.

**BERASAL DARI PENGUSAHA, ANDA MENGUBAH HALUAN KE DUNIA POLITIK. BAGAIMANA DUKUNGAN KELUARGA DAN EDUKASI POLITIK KEPADA KELUARGA?**

Kalau mereka sih total ya, bisa dibilang saya kayak naik *roller couster*, ya kaget. Menyesuaikan hal ini nggak gampang juga. Bukan suatu yang mudah karena kita latar belakangnya pengusaha, kita biasa bebas sekarang kita harus bergaul, dan kita harus belajar *blend in* dengan lingkungan. Itu kan tanpa dukungan dari mereka ya berat juga, karena anak istri jadi penopang. Sering ada komplain-komplain kecil, karena nggak semua orang bisa memahaminya juga, atau nggak semua orang paham apa itu DPR dan nggak gampang juga menjelaskannya. Gimana pun juga kita nggak bisa lepas dari politik, kan politik itu ngehasilin kebijakan, kita nggak ikut dalam pengambilan kebijakan, kita pasti ikut akibat daripada kebijakan kan itu. Jadi sekarang tinggal kamu mau yang mana. Kamu tinggal nunggu akibat atau kamu ikut berperan. ● sf



Sihar Sitorus saat menyapa konstituennya. Foto: dok/mvi

# Apresiasi Peran Aktif TNI dalam Menyukseskan Vaksinasi

Vaksinasi sebagai upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 masih terus berlangsung. Guna menyukseskan program vaksinasi hingga penjuror negeri, pemerintah melibatkan TNI. Peran strategis TNI ini diapresiasi oleh Komisi I DPR RI.



Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid saat memimpin pertemuan di Kodam IX/ Udayana, Bali. Foto: Tiara/Man

**K**etua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid mengapresiasi peran Kodam IX/Udayana yang sangat strategis dalam menyukseskan program vaksinasi nasional Covid-19 di Provinsi Bali. mengingat saat ini di Indonesia masih berjibaku berjuang melawan pandemi Covid-19. TNI sebagai alat negara di tingkat komando pusat maupun komando teritorial di daerah telah berperan penting dalam penanganan pandemi Covid-19 sejak awal merebak di Tanah Air.

“Sejalan dengan penanggulangan Covid-19, program vaksinasi nasional Covid-19 membutuhkan peran TNI termasuk Kodam IX/Udayana di dalamnya untuk menyukseskan program nasional dengan target memvaksinasi 181 juta rakyat Indonesia atau 70 persen dari total populasi,” jelas Meutya dalam sambutannya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI di Kodam IX/Udayana, Bali, baru-baru ini.

Politisi Partai Golkar ini menuturkan, sebagai bagian dari TNI, Kodam IX/ Udayana merupakan kompartemen strategis yang mengemban tugas

pokok mengamankan kedaulatan Negara dan keutuhan wilayah NKRI termasuk dari serangan wabah sebagai ancaman nontradisional. “Letak Kodam IX/Udayana sangat strategis, karena wilayah teritorialnya terdiri dari Provinsi Bali, NTB, dan NTT,” ungkap Meutya.

Oleh karena itu, Meutya berharap efektivitas dan kesuksesan vaksinasi di Provinsi Bali akan menjadi ‘game changer’ pemulihan ekonomi Bali yang berbasis pada pariwisata dan ekonomi kreatif. “Kodam IX/Udayana harus mampu menjadi penangkal sekaligus dapat digerakkan setiap saat untuk menghancurkan seluruh kekuatan musuh serta memulihkan kondisi keamanan nasional,” tandas legislator dapil Sumatera Utara I itu.

## KEBUTUHAN ALUTSISTA HARUS TERPENUHI

Di Surabaya, Komisi I DPR RI sepakat untuk memenuhi kebutuhan Alutsista Brigif-2 Marinir Sidoarjo, Jawa Timur. Modernisasi Alutsista yang layak jadi keniscayaan untuk segera dipenuhi. Ini penting untuk mendukung tugas pokok menjaga kedaulatan RI.

Ada fungsi anggaran yang bisa didorong Komisi I DPR untuk memenuhi kebutuhan anggaran TNI AL tersebut. “Dari rencana kebutuhan anggaran TNI baru terpenuhi separuh. Kalau bisa dinaikan akan lebih baik,” kata Wakil Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari usai memimpin rapat dengan Komandan Brigade Infanteri 2/Marinir Kolonel Marinir Rudi Harto Marpaung, akhir Maret lalu.

Dalam kesempatan tersebut, Komisi I DPR telah mendengarkan paparan

**SEJALAN DENGAN PENANGGULANGAN COVID-19, PROGRAM VAKSINASI NASIONAL COVID-19 MEMBUTUHKAN PERAN TNI**





Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyari melakukan pengecekan alutsista di Brigade Infanteri 2/Marinir Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur. Foto: Nadya/mvi

Komandan Brigif-2 Marinir, Pasmar 2 terkait kondisi Alutsista, sarana prasarana, serta kesejahteraan prajurit di Brigif-2 Marinir, Pasmar 2. Terkait hal tersebut, Komisi I DPR RI mencatat sejumlah kebutuhan mendesak Alutsista dan sarpras Brigif-2 dan Pasmar-2.

“Diantaranya, pengadaan rumah dinas prajurit, pengaspalan jalan, pengadaan kolam renang, pengadaan senjata organik, dan pengadaan sarana pendarat (perahu karet). Untuk selanjutnya, penjelasan dan paparan yang telah disampaikan akan menjadi bahan komplasi dan ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, serta Kepala Staf Angkatan,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Ahmad Rizki Sadig menilai bahwa persoalan kesiapan Alutsista dan kesejahteraan prajurit tidak hanya menjadi permasalahan bagi Brigadir Infanteri-2 Marinir Sidoarjo saja, melainkan menjadi permasalahan bagi Brigadir Marinir di daerah lainnya yang sudah pernah dikunjungi Komisi I DPR RI. Dirinya beranggapan dengan adanya Menteri Pertahanan yang kini juga sebagai mantan prajurit,

seyogyanya lebih paham apa yang menjadi kebutuhan dan kesiapan bagi prajurit TNI saat ini.

#### REVISI UU OTSUS PAPUA PERLU KONTRIBUSI MASYARAKAT

Di Papua, Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas berharap agar masyarakat terutama yang ada di Papua berpartisipasi dan berkontribusi aktif dalam revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Kontribusi masyarakat sangat dibutuhkan guna menyerap informasi terkait Otsus Papua secara berimbang.

“Sehingga tidak terjadi *missed* informasi di masyarakat. Kita harapkan masyarakat bisa berpartisipasi tak hanya kontribusi pikiran, tetapi juga memberikan saran masukan terkait dengan rencana revisi UU Otsus Papua ini,” kata Yan Permenas saat memimpin pertemuan tim kunspek Komisi I DPR RI dengan sejumlah mitra kerja di Sorong, Papua Barat.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini melanjutkan, pihaknya juga berharap adanya masukan dari masyarakat terkait Dana Otsus yang dialokasikan untuk pendidikan dan Kesehatan. Mengingat sektor pendidikan dan kesehatan di Papua saat ini masih jauh dari harapan masyarakat.

Termasuk juga formulasi penggunaan dana bantuan studi otsus, ia berharap agar pemanfaatannya diatur lebih baik lagi. Sehingga bisa lebih akomodatif dan memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat Papua yang ingin melanjutkan studi.

“Kita mendorong anak papua yang mempunyai kompetensi dan skill yang baik agar bisa bersaing serta mendapatkan dukungan dari pemerintah untuk melanjutkan studi. Sehingga dapat mempersiapkan

regenerasi Papua yang berdaya saing dan memiliki SDM yang unggul sesuai yang diharapkan,” pungkasnya. ● tra,ndy,mri/es



Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas. Foto: Mentari/Man

# Ketegasan Gakkumdu Provinsi Kaltim Dapat Dijadikan Acuan

Dalam rangka menyerap aspirasi hasil evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020, Komisi II DPR RI membentuk Panitia Kerja Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang turun langsung ke sejumlah daerah, yaitu Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

**A**nggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid mengatakan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Kalimantan Timur perlu dijadikan acuan untuk daerah lain pada pilkada selanjutnya. Dengan ketegasannya, setidaknya ada 11 kasus tindak pidana pilkada yang mendapatkan tindak lanjut, mulai dari penetapan tersangka sampai vonis di pengadilan.

Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid.  
Foto: Jaka/mi



Anwar menyampaikan, Gakkumdu Kutai Timur telah berhasil melakukan pengungkapan tindak pidana, yakni sebanyak 7 laporan polisi dan telah memproses hukum 13 orang tersangka. Satu hal yang cukup menarik terkait penegakkan hukum di Kaltim, yakni perihal pelanggaran-pelanggaran pilkada di daerah ini bisa divonis 2-3 tahun.

“Saya kira Gakkumdu di Kaltim bisa menjadi *role model* di Indonesia, dalam rangka upaya untuk kita agar lebih patuh terhadap seluruh aturan,

baik itu kepada penyelenggara pilkada, pemilih dan para kontestan,” kata Anwar saat mengikuti Tim Panja Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 mengunjungi KPU Provinsi Kaltim di Balikpapan, baru-baru ini.

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menambahkan, kalau semua yang terlibat dalam Pilkada memiliki kepatuhan yang sama, maka bisa dipastikan akan mengurangi adanya kasus-kasus yang berkelanjutan sampai di Mahkamah Konstitusi.

“Memang dalam kontestasi, orang pasti berlomba bagaimana caranya bisa menang. Bahkan terkadang ada oknum yang melanggar aturan. Menurut saya pengawasannya perlu diperketat. Seperti yang terjadi di Kaltim pengawasannya sangat bagus. Eksekusinya *real*, sehingga membuat semua yang terlibat dalam pilkada ke depan akan berpikir ulang melanggar aturan,” ujarnya.

Legislator dapil Sulawesi Tengah ini menyarankan, ke depannya pengawasan perlu diperkuat terutama di bagian *front line*. Perlu dilakukan revisi aturan tentang syarat-syarat menjadi pengawas Ad hoc, misalnya ada aturan minimal lulusan SMA dan berusia minimal 25 tahun.

“Nah, banyak perkara-perkara di masyarakat terutama di daerah sudah punya banyak pengalaman sejak orde baru sebagai penyelenggara pemilu tapi bukan tamatan SMA. Sehingga tidak lolos persyaratan, kemudian ada yang sudah tamat SMA tapi rata-rata dari mereka belum berusia 25 tahun. Jadi ini perlu penegasan untuk syarat menjadi pengawas Ad hoc. Bahkan, kalau perlu di TPS diperbanyak SDM-nya,” tutup Anwar.

Jaga integritas PSU Pilgub Kalsel Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizami Karsayuda mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Selatan untuk serta merta menjaga independensi, integritas dan kredibilitas saat Pemungutan Suara Ulang (PSU)



Tim Kunjungan Kerja Panja Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Banjarmasin, Kalsel. Foto: Ojji/vv

pemilihan Gubernur pada Juni 2021 mendatang.

Rifqi menekankan agar hal-hal yang berkaitan dengan kesalahan administratif, termasuk pelanggaran-pelanggaran yang menjadi sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya, yang menjadi alasan dilakukannya PSU, tidak terulang lagi.

"Independensi, integritas, kredibilitas dan netralitas penyelenggara adalah kata kunci yang harus kita jaga bersama," ungkap politisi PDI-Perjuangan ini usai mengikuti kunjungan kerja Panja Evaluasi Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 bertemu dengan KPU Provinsi Kalsel di Banjarmasin, Kalsel.

Ia menegaskan, Komisi II DPR RI berkepentingan untuk memastikan pelaksanaan *advise* keputusan dari MK di 17 provinsi dan kabupaten/kota se-

Indonesia yang akan menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) terkait sengketa Pilkada 2020 akan berjalan sesuai rencana.

"PSU ini menjadi pertarungan kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu. Sebagai mitra kerja, kami di Komisi II DPR RI ingin memastikan kesiapan seluruh tahapan bisa berjalan dengan baik. Khusus di Kalimantan Selatan kami bahagia karena dari sisi pendanaan 28 miliar yang dibutuhkan, seluruhnya di-*support* oleh Pemerintah Provinsi Kalsel," jelasnya.

Lebih lanjut lagi, Legislator Dapil Kalsel ini juga menyinggung masalah kajian hukum yang dimiliki BAWASLU Kalsel, yaitu mengenai bocornya data internal kepada salah satu pasangan calon, yang kemudian dijadikan bukti pelaporan di Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Kajian hukum tersebut dianggap tidak senapas dengan hasil pleno Bawaslu Kalsel. Maka dari itu, rapat pleno juga dianggap tidak berdasar sehingga pada akhirnya dilaporkan ke DKPP. "Saya mempertanyakan kok bisa dokumen yang seharusnya beredar di internal Bawaslu Kalsel kok bocor keluar dan dijadikan barang bukti," tukasnya.

Menurutnya, hal ini menandakan ada indikasi kuat terkait independensi. Sehingga Rifqi meminta agar hal semacam ini terulang lagi. Ia menambahkan, imparialitas Bawaslu dan KPU Kalsel dipertaruhkan dalam masa-masa seperti ini.

"Kami di Komisi II DPR RI berkepentingan menjaga ini semua, dan seluruh mitra kerja bekerja sesuai dengan koridor hukum dan perundang-undangan," pungkasnya. ● jk,oji/es

# Komisi III Dorong Pemerintah Perkuat BNN

Komisi III DPR RI menyoroti tentang anggaran yang dimiliki Badan Narkotika Nasional (BNN) dan kesiapan polda susel dalam menghadapi serangan teror yang melibatkan BNPT dan Densus 88.

**K**etua Komisi III DPR RI Herman Herry mendorong pemerintah untuk memperkuat Badan Narkotika Nasional (BNN) baik dari sisi legislasi, anggaran maupun infrastruktur. Mengingat, BNN adalah garda terdepan dalam penanganan kasus narkoba di Indonesia sehingga sangat penting untuk diperkuat.

“Bagaimana bisa BNN kerja maksimal dalam menjalankan tugas kalau tidak didukung penuh oleh pemerintah. Bukan saja kemampuan SDM dan terobosan-terobosan tetapi juga teknologinya. Karena kejahatannya sudah makin canggih bahkan ada yang melibatkan pihak diluar negeri. ujarnya usai memimpin pertemuan dengan Kepala BNN beserta jajaran di Sukabumi, Jawa Barat, akhir Maret lalu.

Dalam rangka mendeteksi dan menetapkan termasuk penindakan, BNN membutuhkan sarana prasarana yang tidak sedikit dan harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Herman menekankan kepada Kepala BNN, untuk membangun *legacy* dalam 3 tahun masa jabatannya serta meningkatkan integritas dan kemampuannya SDM yang ada di BNN.

“Mumpung Kepala BNN yang baru menjabat ini sebagai seseorang



Peninjauan Tim Kunspek Komisi III DPR RI di Sukabumi, Jawa Barat. Foto: Mentari/Man

pakar terorisme, pakar tentang tindak kejahatan yang menggunakan teknologi-teknologi, juga seorang doktor, ini waktunya saya dorong keras dengan satu pesan, Bapak (Kepala BNN) harus tinggalkan *legacy* dalam waktu 3 tahun. Di era kepemimpinan bapaklah integritas dan kemampuanmu (Kepala BNN), publik tahu. Tinggal pemerintah mendukung atau tidak,” tegas Herman.

Herman menjelaskan alokasi anggaran BNN saat ini masih sangat kurang. Ia berharap, di Tahun 2022 pemerintah lebih memperhatikan kebutuhan anggaran di BNN. “Sekarang ini rata-rata (anggaran BNN) Rp1,6 triliun total. Kalau mau bicara jujur yang diperlukan oleh BNN 5 kali angka sekarang ini. Angka yang sekarang ini ibaratnya hanya cukup untuk menutupi kaki, muka telanjang. Ketika ditarik menutupi tutup muka, lutut di bawah kelihatan,” ungkapnya mengibaratkan.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini berharap betul agar pemerintah

meningkatkan alokasi anggaran operasional dan belanja modal BNN untuk peningkatan infrastuktur secara maksimal.

Hal yang sama juga disoroti oleh Anggota Komisi III DPR RI Mulfachri Harahap. Ia menuturkan, peran BNN sangat vital dalam memerangi semua permasalahan narkoba di negeri ini.

“Dalam lima tahun terakhir anggaran yang diberikan kepada BNN bukannya meningkat tapi malah menurun. Hal ini berbanding terbalik dengan tugas BNN sendiri sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan pemberantasan terhadap narkoba di negeri ini,” jelasnya.

Wakil Rakyat Fraksi PAN ini mengatakan, dibutuhkan komitmen yang kuat khususnya dari pemerintah untuk memberikan dukungan kepada BNN dalam berbagai aspek salah satunya adalah dukungan anggaran.

Jika ingin sukses melawan narkoba, lanjutnya, diperlukan juga komitmen



Anggota Komisi III DPR RI Mulfachri (kiri). Foto: Mentari/mv

dari semua *stakeholder* yang ada untuk berkontribusi bersama-sama dengan BNN dengan sama-sama menyatakan perang melawan narkoba. (mri/es)

#### APRESIASI POLRI DAN BNPT

Komisi III DPR RI melaksanakan investigasi dan menjaring informasi terkait penegakan hukum terhadap pelaku peledakan bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, baru-baru ini.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni memberi apresiasi kepada jajaran Polda Sulsel, Densus 88 Antiteror Polri, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang telah cepat menangkap sejumlah orang yang berafiliasi dengan terduga teroris dari kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) itu.

“Kita menyikapi dengan cepat dan apresiasi kepada jajaran terkait yang telah menangkap orang-orang yang diduga menjadi bagian dari peristiwa bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, juga aksi teror yang terjadi di Mabes Polri kemarin. Ini adalah rangkaian, dimana skemanya mirip, tentu sangat disayangkan milenial seperti itu adalah milenial yang gampang di-*brainwashed*,” kata Sahroni usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik dengan mitra kerja terkait di

Mapolda Sulawesi Selatan, Makassar, baru-baru ini.

Mengingat metode dilakukan menggunakan metode baru dengan melibatkan pelaku aksi teror berasal dari kalangan milenial, politisi Fraksi Partai NasDem tersebut mengatakan bahwa metode pencegahannya bisa dengan melakukan sosialisasi secara masif.

“Harus masif dilakukan juga di pesantren-pesantren yang kiranya ada dugaan sebagai tempat yang menyalahi

aturan. Kami meyakini saat ini negara kita tetap aman, dan dijaga oleh Polri secara nasional,” imbuh Sahroni.

Peristiwa ledakan bom bunuh diri yang terjadi pada Minggu (28/3/2021) kemarin, menimbulkan terganggunya rasa keamanan dalam masyarakat khususnya di Makassar. Oleh karena itu, melalui kunjungan ini, Sahroni menjelaskan, Komisi III DPR RI berharap instansi terkait dapat bekerja cepat mengidentifikasi pelaku dan afiliasinya. Sehingga bisa dilakukan tindakan hukum yang tegas terhadap mereka, dan siapapun yang hendak merusak keamanan serta kerukunan hidup beragama di Indonesia.

“Pendekatannya tentu berbeda, sekarang pelakunya milenial. Pengawasan akan terus dilakukan. Polisi siber juga harus aktif dalam pengawasan di media sosial terutama ada ruang lingkup yang mestinya harus lebih *concern*. Media sosial ini kan sangat masif di kalangan milenial, maka saya minta Dirsiber Mabes Polri untuk lakukan pengawasan ketat, bekerja sama dengan Koninfo agar sinerginya bersamaan, sama-sama mengawasi secara ketat,” pungkas legislator dapil DKI Jakarta III itu. ● mri,alw/es



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni di Mapolda Sulawesi Selatan, Makassar. Foto: All/mv

# Awasi Taman Nasional Baluran dan Program *Food Estate*

Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, beberapa waktu lalu Komisi IV DPR RI secara khusus mengunjungi Taman Nasional Baluran di Jawa Timur dan meninjau program *food estate* yang terletak di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara.

**K**etua Komisi IV DPR RI Sudin berharap Taman Nasional Baluran, Situbondo, Jawa Timur itu tetap dilestarikan. Karena memiliki satwa khas seperti banteng, kerbau liar dan lain sebagainya. Pelestarian tersebut diakuinya butuh tambahan biaya dan jumlah tenaga kerja, termasuk infrastruktur berupa kendaraan.

“Tadi kita sudah melihat banteng, kemudian juga melihat kerbau liar mungkin ini harus tetap dilestarikan. Dengan apa? dengan penambahan biaya maupun tenaga kerja. Karena tadi saya tanyakan seluruh tenaga kerjanya

103 orang, dengan luasan 25.000 hektar itu kan hal yang sangat sulit sekali, baik itu menjaga suaka, menjaga yang lain-lain,” ungkap Sudin, di Taman Nasional Baluran, Situbondo, Jatim.

Dalam kesempatan itu politisi Fraksi PDI Perjuangan itu juga berharap tidak terjadi pemotongan anggaran pada Taman Nasional Baluran. Menurutnya untuk pencegahan kebakaran maupun peningkatan konservasi maka perlu dukungan anggaran yang cukup besar, kalau tidak maka taman nasional ini akan rusak dan habis.

Ia juga menekankan agar Taman nasional Baluran menjaga dan mempertahankan memiliki ciri khas

satwanya yang harus dipertahankan dan dijaga seperti taman nasional lainnya. Di Baluran ada Banteng, di Lampung ada Gajah, di Taman Nasional Ujung Kulon ada Badak, itu yang menjadi khas masing-masing. “Kemudian di Kalimantan Tengah ada Orang Utan, tapi disana tidak ada gajah, tidak ada banteng. Jadi ciri khas masing-masing ini harus di pertahankan, kalau perlu di tingkatkan,” ucapnya.

## FOOD ESTATE HARUS BERKESINAMBUNGAN

Wakil ketua Komisi IV DPR RI Anggia Ermarini berharap program *food estate* bisa dilakukan secara berkesinambungan dan menyeluruh. Hal tersebut diungkapkannya saat memimpin tim kunjungan kerja Komisi IV DPR RI meninjau *food estate* di Dadahup, Kapuas, Kalimantan Tengah.

Ia mengakui bahwa keberhasilan dari program ini tidak semata hanya ditentukan oleh satu Kementerian Pertanian. Namun juga harus ada campur tangan kementerian/lembaga lainnya. Seperti Kementerian PUPR dan Kementerian Perdagangan.

Kementerian PUPR untuk perbaikan irigasi dan infrastruktur lain sebagaimana yang selama ini dikeluhkan masyarakat dan petani. Sementara itu Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian untuk mendistribusikan atau menjual panen hasil program *food estate* ini.

Pada kesempatan itu, Anggota Komisi IV DPR RI Bambang Purwanto dari dapil Kalteng menjelaskan *food estate* di Dadahup sejatinya merupakan program transmigrasi, berupa pembukaan dan pengalih fungsian lahan gambut untuk pertanian padi yang sudah ada sebelumnya. Namun memang belakangan dioptimalisasikan oleh pemerintah melalui program *food estate*.

Oleh karenanya sebagai wakil rakyat dapil Kalteng, ia sangat berterima kasih dengan adanya *food estate* ini, para petani mendapat perhatian lebih dari pemerintah sehingga makin



Tim Kunker Komisi IV DPR RI meninjau ke Taman Nasional Baluran di Situbondo, Jatim. Foto: Singgih/wt



Tim Kunker Komisi IV DPR RI saat meninjau food estate di Dadahup, Kapuas, Kalimantan Tengah. Foto: Ayu/mv

bersemangat untuk mengolah lahan sawah miliknya.

Meski demikian masih ada beberapa kekurangan yang dikeluhkan para petani dan harus segera diatasi, diantaranya terkait infrastruktur berupa jalan desa di lokasi *food estate* yang masih belum memadai. Selain itu juga jaringan irigasi yang belum terbentuk dengan baik, termasuk juga belum sepenuhnya tanggul. Sehingga ketika musim hujan tiba, sawah petani kebanjiran, dan rusak.

### SELESAIKAN AKSES JALAN MENUJU FOOD ESTATE

Anggota Komisi IV DPR RI Mindo Sianipar meminta agar pemerintah segera menyelesaikan akses jalan menuju *food estate* di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Peralnya, salah satu faktor yang menarik minat masyarakat untuk datang ke *food estate* adalah karena akses jalan yang sudah bagus dan aman dilalui.

Ia juga minta agar fasilitas umum lainnya seperti wastafel untuk cuci tangan, toilet umum dan tempat peristirahatan umum juga harus menjadi perhatian. Sementara saat ini kondisi jalan saat ini masih sangat curam dan berbahaya saat dilalui kendaraan terutama saat musim hujan.

“Tadi Pak Wakil Bupati bilang, katanya September akses jalan menuju *food*

*estate* ini sudah siap dilalui masyarakat umum (khususnya petani). Sekitar bulan agustus nanti, kami akan meninjau kembali sampai mana progres akses jalan yang dijanjikan pada september sudah *ready* (aman) dilalui dalam berbagai cuaca,” ujar Mindo di Sumatera Utara.

Di samping itu, Mindo juga mengomentari terkait pembukaan lahan baru khususnya lahan agrikultural untuk program *food estate*. Sebelumnya, lahan tersebut adalah hutan belantara. “Ini tanah masih tanah baru, jika kedepannya tanah ini diatur dengan baik, pasti akan semakin gembur tanahnya, hasilnya juga pasti akan semakin baik. Jadi ada peluang



Tim Kunspek Komisi IV DPR RI meninjau kawasan food estate di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Foto: Mentari/mv

besar untuk pengembangan *food estate* khususnya agrikultural di sini.

Sementara itu Anggota komisi IV DPR RI Renny Astuti mengatakan saat ini para petani di kawasan *food estate* ini masih dibiayai oleh pemerintah. Namun, nantinya akan ada kesepakatan dengan pihak swasta dan perbankan untuk membantu pembiayaan bagi para petani di *food estate*, sehingga tidak lagi ditanggung pemerintah.

“Penjelasan Dirjen Hortikultura tadi, kami medengarkan bahwa untuk sementara ini memang mereka masih menggunakan semua dana dari pemerintah. Tapi kedepannya nanti akan ada MoU atau kesepakatan dengan pihak swasta. Nantinya pembiayaan juga akan dibantu oleh swasta dan perbankan,” tutur Renny.

Setelah dua sampai tiga tahun, lanjut Renny, pemerintah membebaskan para petani untuk dapat bekerja sama dengan pihak swasta langsung. Saat ini diketahui sudah ada beberapa kesepakatan dengan tiga bank swasta, sehingga para petani dapat memanfaatkan modal tersebut dengan terukur dan tentunya dengan bunga yang sangat ringan.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini berharap, setelah bantuan pemerintah ini dihentikan, para petani dapat terus mengembangkan dan memanfaatkan lahan pertaniannya semaksimal mungkin. ● skr,ayu,mri/es

# Tinjau Kesiapan Transportasi Jelang Lebaran

Meskipun pemerintah melarang mudik lebaran 2021, Komisi V DPR RI tetap perlu memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi baik itu laut, darat dan udara. Termasuk juga harus dipastikan penerapan protokol kesehatan ditegakkan secara ketat.

**K**etua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan, kunjungan Komisi V DPR RI ke Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur untuk memastikan kondisi riil pelaksanaan persiapan perjalanan orang melalui transportasi udara, termasuk protokol kesehatan yang di terapkan di masa Covid-19.

Komisi V DPR RI meminta Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan melalui Otoritas Bandara Juanda agar lebih meningkatkan fungsi utama dalam melaksanakan tugas pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan udara demi meningkatkan penyelenggaraan angkutan orang yang aman, lancar dan selamat.

Perlu diingat, faktor kesehatan menjadi panglima utama dalam penyelenggaraan transportasi pada masa pandemi. Sesuai dengan Surat Edaran 19 tahun 2021 tentang petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Udara pada Masa Pandemi, maka protokol kesehatan harus dilakukan pemantauan yang ketat di bandara,” kata Lasarus saat pertemuan di Bandara

Sidoarjo, Jatim, baru-baru ini.

## SINERGI CIPTAKAN 'ZERO ODOL'

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan melakukan 4 tahap strategi dalam mengentaskan *Over*

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus. Foto: Aili/Man

*Dimension Over Loading (ODOL)* terhadap truk yang ada di pelabuhan, yakni edukasi dengan cara preventif (melalui sosialisasi/ komitmen), penegakan hukum, membangun terminal barang yang terintegrasi, dan insentif untuk angkutan barang.

Pada penegakan hukum akan diciptakan komitmen *Zero Odol* yaitu penegasan aturan International Maritime Organization (IMO) atas ODOL pada truk kontainer, pembentukan satgas (task force) normalisasi, penyidikan dan penuntutan bagi oknum yang masih melanggar ketentuan, dan penurunan barang serta penundaan perjalanan. Program *Zero ODOL* akan berlaku pada tahun 2023.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mengatakan, program yang sudah dijalankan Ditjen Perhubungan Darat sudah cukup baik, namun dibutuhkan kesadaran oleh semua pihak. Menurut politisi Fraksi Gerindra itu, dibutuhkan peran semua *stakeholder*, termasuk juga dengan kepolisian untuk menindak truk-truk kelebihan kapasitas yang melintas di jalan-jalan raya. ungkap Andi Iwan saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

“Harus dilakukan secara intensif kebijakan ini. Dan juga untuk pihak pelabuhan bisa lebih tegas lagi tidak menerima truk yang memuat barang melebihi kapasitas, karena ini semata-mata menyangkut keselamatan bersama,” tegasnya.

Legislator dapil Sulawesi Selatan II ini mengimbau kepada pihak swasta sendiri harus sadar bisa memuat truk-truknya dengan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, agar permasalahan ODOL bisa terselesaikan. “Sekuat apapun pemerintah apabila







Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Provinsi Jawa Timur.  
Foto: Azka/Man

masih ada oknum yang melakukan hal melanggar kebijakan, ini tidak akan pernah terselesaikan untuk masalah ODOL di Indonesia,” tandas Andi Iwan.

#### **TINJAU PROGRES JALUR GANDA KA MOJOKERTO-SEPANJANG**

Komisi V DPR RI meninjau secara langsung progres pembangunan jalur ganda Kereta Api Mojokerto – Sepanjang, Jawa Timur. Anggota Komisi V DPR RI Sri Rahayu mengatakan, pihaknya mengapresiasi Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan atas upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang transportasi kereta api pada pandemi Covid-19, serta upaya meningkatkan jalur kereta api menjadi jalur ganda dikarenakan meningkatnya penggunaan masyarakat terhadap transportasi kereta api.

“Komisi V DPR RI memberikan sejumlah catatan kepada Kemenhub. Salah satunya, Kemenhub melalui Ditjen Perkeretaapian agar tetap disiplin melakukan protokol kesehatan bagi pengguna kereta api baik penumpang, staf dan pihak lain yang penerapannya dimulai dari stasiun, gerbong kereta api dan selama perjalanan kereta api agar masyarakat merasa tenang dan aman sewaktu menggunakan moda kereta api,” kata Sri Rahayu saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V

DPR RI ke Stasiun Kereta Api Mojokerto, Jawa Timur.

Lebih lanjut Sri Rahayu mengatakan, pemerintahan Presiden Joko Widodo sedari awal telah mencanakan pembangunan infrastruktur transportasi, salah satu yang menjadi fokusnya adalah bidang kereta api, penambahan jalur ganda kereta api di beberapa wilayah, khususnya Jawa Timur, sehingga diharapkan menjadi jawaban untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang transportasi kereta api.

Pada APBN 2021, Kemenhub menganggarkan Rp5,9 triliun dengan jumlah tenaga kerja 31.946 orang, dengan anggaran dan penyerapan tenaga kerja sebesar ini. “Kami berharap agar (anggaran) terserap dengan baik dan peluang kerja bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, sehingga memacu meningkatnya perekonomian daerah dan nasional,” harap legislator dapil Jatim VI itu.

“Kita sama-sama tahu, pada masa pandemi Covid-19, pada sektor ekonomi dan pendapatan masyarakat yang sangat merasakan akibatnya, terutama banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaannya, Komisi V DPR RI sangat mengapresiasi Kementerian Perhubungan atas program Padat Karya Tunai (PKT) yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Jawa Timur,”

Politisi PDI-Perjuangan itu mengatakan, program PKT merupakan salah satu upaya pemerintah pusat untuk membantu masyarakat yang terdampak di masa pandemi Covid-19. “Kami menyarankan kepada Ditjen Perkeretaapian Kemenhub agar melibatkan masyarakat di area stasiun atau disepanjang rel kereta api,” pesannya. ● alw, azk, man/es



Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Stasiun Kereta Api Mojokerto, Jawa Timur. Foto: Andri/Man

# Tinjau Progres Jalan Tol yang Dikerjakan BUMN

Komisi VI DPR RI melakukan peninjauan terhadap sejumlah progres pembangunan jalan tol Trans Sumatera yang sedang dikerjakan oleh BUMN. Komisi VI menginginkan agar pengerjaan proyek tol tersebut berjalan sesuai dengan target dan perencanaan.

**W**akil Ketua Komisi VI DPR RI Arya Bima saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI meninjau Tol Pekanbaru-Bangkinang sepanjang 40 kilometer memprediksi tol ini akan segera rampung akhir tahun 2021.

“Komisi VI hari ini melihat langsung progres pembangunan jalan tol Pekanbaru-Bangkinang, sejauh ini sudah berjalan bagus dan sesuai target, *rigid beton*-nya juga baik. Tentu kita ingin agar proyek ini segera rampung karena dapat mempermudah akses masyarakat dan mobilitas barang,” kata Arya Bima di KM 33 Tol Pekanbaru-Bangkinang, Riau, awal April ini.

Politisi PDI-Perjuangan ini meminta agar pihak pengelola memperhatikan

kualitas ketahanan jangka panjang dari pembangunan jalan tol tersebut. Arya Bima menilai kondisi tanah yang digunakan untuk membuat tol memiliki karakteristik berbeda, sehingga akan berdampak terhadap kerusakan jalan pada kemudian hari.

“Sesuai info, kondisi tanah di sini memiliki karakteristik berbeda-beda. Ada yang biasa dan gambut, sehingga akan berpengaruh terhadap kualitas jalan nantinya. Seperti yang diketahui proyek ini menelan anggaran yang cukup besar, sehingga bisa lebih baik apabila kondisi jalannya bertahan hingga sekian lama,” sebut legislator dapil Jawa Tengah V itu.

Diketahui Tol Pekanbaru-Bangkinang melintasi lima kecamatan dan 23 desa di Kabupaten Kampar, Riau, di antaranya, Kecamatan Tambang, meliputi Desa

Rimbo Panjang, Kualu Nenas, Sungai Pinang, Kuapan dan Kecamatan Kampar Timur serta Desa Pulau Birandang.

Kemudian proyek jalan tol ini juga melalui Kecamatan Rumbio Jaya, meliputi Desa Bukit Kratai, Naga Beralih, Kayu Aro dan Sawah. Selanjutnya Kecamatan Kampar Utara meliputi Desa Sungai Jalau, Muara Jalai, Sungai Tonang. Terakhir Kecamatan Bangkinang di Desa Pasir Sialang.

## TOL TRANS SUMATERA DIHARAPKAN RAMPUNG LIMA TAHUN KEDEPAN

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menyatakan, pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera memang menjadi konsen dari Komisi VI DPR RI dan menjadi proyek yang akan didorong dari periode pemerintahan sebelumnya dan harus dilanjutkan pada periode pemerintahan ini.

Saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI meninjau progres pembangunan Jalan Tol Padang - Sicincin di Provinsi Sumatera Barat, Hekal menargetkan agar pembangunan tol ini bisa maksimal dan dalam waktu lima tahun kedepan sudah mendekati selesai.

“Memang kendala-kendala yang dialami masih juga terkait dengan masalah pembebasan lahan itu agak tersendat, dimana pembiayaan juga lagi berat. Apalagi kita sama-sama tahu dalam kondisi Covid ini ada batasan untuk berlalu lintas, sedangkan hitungan dari Tol ini memang sedari awal sudah kita pahami bersama akan berat, tetapi ini menjadi program negara untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan perekonomian,” ungkap Hekal.

Ia mengatakan, pembangunan Jalan Tol tersebut diharapkan juga bisa menurunkan biaya logistik. “Tetapi kan otomatis biaya ini terpaksa harus ada



Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI berfoto bersama sesudah meninjau Tol Pekanbaru-Bangkinang. Foto: Taufan/Invi

yang terbebani, dalam hal ini PT Utama Karya. Semenjak ada proyek ini, dengan pembiayaan baik dari PMN maupun dari hutang, mengalami beban bunga yang sangat berat. Oleh karenanya hal ini yang perlu kita bicarakan. Semakin dia kita berikan modal maka dia akan semakin banyak menarik hutang dan kemudian akan lebih besar biaya bunganya,” ujarnya.

Tahun ini saja, lanjut Hekal, PT Utama Karya sudah mulai rugi dan kalau tahun depan ini berlanjut akan semakin rugi. “Kita pikirkan bersama dengan Menteri BUMN dan Menteri Keuangan, dengan harapan bahwa proyek ini jadi tapi juga jangan sampai Utama Karya malah terkatung-katung ataupun bangkrut gara-gara kita bebani dengan tugas seperti ini. Itu harus menjadi perhatian pemerintah untuk mencari jalan keluarnya,” papar politisi Fraksi Gerindra itu.



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal.  
Foto: Dep/MI



Tim kunjungan kerja Komisi VI DPR RI di Pelindo III, Bali. Foto: Singgih/Man

### BMTH BANTU PERCEPAT PEMULIHAN EKONOMI DI BALI

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang perekonomiannya bertumpu pada sektor pariwisata. Tercatat bahwa sektor pariwisata menyumbang lebih dari 53 persen total perekonomian provinsi Bali. Sehubungan dengan kondisi tersebut, pembangunan infrastruktur yang menunjang pariwisata menjadi sangat penting dalam mendukung perkembangan ekonomi di provinsi Bali.

Salah satu infrastruktur pariwisata yang sedang dipersiapkan dalam menunjang sektor pariwisata adalah Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) di kawasan Benoa, Bali yang memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka peningkatan sekaligus percepatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada umumnya dan di Provinsi Bali pada khususnya.

Anggota Komisi VI DPR RI Nasril Bahar menyampaikan BMTH merupakan salah satu proyek strategis dan diharapkan kapal-kapal besar nantinya akan berlabuh di Provinsi Bali terutama kapal-kapal pesiar. “Kita harapkan kapal-kapal besar terutama kapal pesiar bisa singgah di Bali yang

merupakan salah satu objek wisata bagi turis manca negara,” ungkap Nasril Bahar di Pelindo III, Bali.

Ia berharap, penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp1,2 triliun yang dikucurkan oleh pemerintah kepada PT Pelindo III bisa dimaksimalkan untuk pengembangan dan pembangunan Bali. “Saya pikir sangat bermanfaat untuk pengembangan dan pembangunan Bali menuju wisata lautnya, terutama wisata dalam menuju *hub-hub* yang akan dikunjungi di beberapa pulau-pulau di Indonesia,” ujar Nasril.

Sementara Anggota Komisi VI DPR RI Mohamad Idris Laena berpendapat bahwa Indonesia sudah saatnya untuk tidak hanya sekedar menjadi penonton. Indonesia merupakan negara maritim termasuk terbesar di dunia tapi selama ini kapal-kapal pesiar datang ke Indonesia hanya numpang lewat dan tidak ada yang turun, sehingga tidak memberikan efek ekonomi apapun kepada masyarakat Indonesia.

“Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) merupakan gagasan untuk menjadikan Bali sebagai tempat hub secara langsung, terutama kapal-kapal pesiar yang datang dari berbagai negara dunia,” ujar Mohamad Idris Laena. ● tn,skr,dep/es

# Komisi VII Apresiasi Pembangunan Smelter PT CMMI

Sektor energi menjadi perhatian Komisi VII DPR RI. Untuk itu, pada kunjungan kerja kali ini, Komisi VII membentuk dua tim kunjungan kerja meninjau pengoperasian *smelter* PT CMMI di Serang, Banten serta menyerap aspirasi dari PT Ispat Indo, Sidoarjo, Jawa Timur.



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Panja Minerba di Cikande. Foto: Puntho/ml

**W**akil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengapresiasi pengembangan, pembangunan dan pengoperasian *smelter* PT Cahaya Modern Metal Industri (CMMI) yang menjadi bukti keberhasilan pembangunan *smelter*. Eddy menyatakan, CMMI bukti komitmen penambang melakukan hilirisasi *smelter* nikel menjadi produk ekspor.

Saat meninjau *smelter* PT CMMI, di Cikande, Serang, Banten, awal April lalu, Eddy mengatakan PT CMMI patut menjadi percontohan bagi penambang

yang masih ragu dalam menjalankan industri *smelter*.

"PT CMMI terus dapat *survive* dalam beroperasi bahkan di tengah kendala yang terbilang tidak mudah, seperti pembelian bahan baku yang relatif sangat kompetitif masih mampu melakukan ekspansi tahap kedua. PT CMMI merupakan bukti komitmen penambang melakukan hilirisasi *smelter* nikel menjadi produk ekspor," ujar Eddy.

Politisi Fraksi PAN tersebut juga mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan berbagai kemudahan insentif. Di antaranya insentif pembiayaan, insentif bahan bakar

yang lebih efisien seperti listrik dan gas sekaligus bagian dari komitmen pemerintah menghadirkan bahan bakar yang ramah lingkungan.

Eddy mengingatkan, pemerintah wajib semakin memperhatikan aspek pengembangan industri mulai dari sektor pembelian bahan baku, transportasi yang lebih ekonomis dan aspek pemrosesan sampai industri hilir berikutnya. Maka, pemerintah diminta memberikan insentif sampai produksi ini berjalan konsisten dan mapan kedepannya.

Eddy juga mengapresiasi keberadaan 93 persen tenaga kerja dari warga negara Indonesia yang diberdayakan PT CMMI. Bahkan, Eddy, separuh lebih dari tenaga kerja tersebut berasal dari kawasan penduduk sekitar yaitu Cikande, Serang, Banten yang merupakan wilayah PT CMMI berdiri.

"Komisi VII mengapresiasi 93 persen tenaga kerja yang ada di PT CMMI merupakan anak bangsa. Kedepannya, perlu lebih keberpihakan pemerintah terutama kepada industri yang sudah membangun operasi produksi hilirisasi. Mengingat, artinya sama dengan industrialisasi di dalam negeri semakin terbangun seraya penyerapan tenaga kerja lebih maksimal," pungkask legislator dapil Jawa Barat III itu.

Hal yang sama juga diungkapkan Anggota Komisi VII DPR RI Willy Midel Yoseph. Ia turut mengapresiasi PT CMMI yang telah melaksanakan pembangunan pengolahan dan pemurnian (*smelter*) nikel di kawasan Cikande sesuai tugas dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Willy mengharapkan, PT CMMI mampu menjadi percontohan bagi perusahaan-perusahaan lain untuk tidak perlu takut dalam mendirikan *smelter* berikutnya.

"PT CMMI sebagai *smelter* pertama terbukti bisa berjalan dengan sukses



Tim Kunspek Panja Minerba Komisi VII DPR RI berfoto bersama saat meninjau smelter PT CMMI di Cikande. Foto: Purntho/nvl

produksinya. Maka, PT CMMI bisa menjadi *role model* untuk perusahaan lainnya untuk tidak perlu takut dalam mendirikan *smelter* berikutnya. Untuk itu, sekali lagi kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada manajemen CMMI yang telah melaksanakan pembangunan dan juga sudah berproduksi di Cikande ini,” ujar Willy.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini mendorong PT CMMI tak berhenti dalam berinovasi dan meningkatkan kualitas *smelter* demi mencapai tingkat kapasitas yang telah direncanakan yaitu 30.000 ton per tahun. Tak hanya itu, Willy mengingatkan para investor atau pengusaha smelter mengikuti regulasi-regulasi yang sudah diatur oleh pemerintah.

Willy juga mengimbau pemerintah secara khusus Kementerian ESDM untuk memberikan kemudahan dalam memberikan perijinan termasuk bantuan fiskal atau keuangan yang memudahkan para investor atau pengusaha *smelter* untuk mendapatkan modal. “Sehingga, dengan demikian para investor atau pengusaha mampu membangun industri smelter secara lebih cepat” pungkask Willy.

#### SERAP ASPIRASI PT ISPAT INDO

Di Sidoarjo, Jawa Timur, Komisi VII DPR RI menerima beberapa aspirasi

dan masukan dari pihak pelaku industri baja terkait implementasi Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 89 K/10/MEM/2020 tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.

“Kami mendapat berbagai aspirasi dari PT Ispat Indo, produsen baja sebagai pengguna gas industri yang mendapat manfaat dari Kepmen ESDM tadi. Selain meminta agar kebijakan harga gas sebesar 6 dolar AS per MMBTU itu terus diterapkan, mereka juga berharap agar pasokan gas ke industrinya tidak terus menurun,” ujar Anggota Komisi VII DPR RI Ratna Juwitasari saat mengunjungi PT Ispat Indo, Sidoarjo, Jawa Timur.

PT Ispat Indo mengaku pasokan gas ke industrinya terus menurun. Di bulan Maret 2021 menurun 25 persen, dan April kembali menurun hingga 75 persen. Hal ini tentu berpengaruh terhadap proses produksi perusahaan tersebut.

Mengetahui hal tersebut, tim Kunjungan Kerja Spesifik yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Alex Noerdin, didampingi oleh beberapa anggota Komisi VII DPR

RI lainnya seperti Bambang Patijaya dan Nurhasan Zaidi ini langsung mempertanyakannya pada pihak terkait yakni PT PGN (Perusahaan Gas Negara).

“Alhamdulillahnya, dalam kunjungan kami ini juga hadir Sekretaris Dirjen Migas, PT PGN, BPH Migas, dan SKK Migas. Sehingga bisa langsung menjelaskan penyebabnya, sekaligus mencari solusinya,” tambah Politisi dapil Jawa Timur XI ini.

Ratna juga mengatakan bahwa PT Ispat Indo yang sudah maksimal menyerap gas tersebut. hendaknya dapat segera berkontribusi lebih kepada perekonomian masyarakat sekitar dan daerah. Agar *multiplier effect*-nya dapat dirasakan semua pihak, khususnya dalam keadaan pandemi seperti ini.

Selain lapangan pekerjaan, program beasiswa bagi pelajar berprestasi dapat menjadi salah satu bentuk kontribusi positif dari meningkatkannya produksi PT Ispat Indo setelah menikmati harga gas 6 Dolar Amerika per MMBTU ini. • ayu/es



Anggota Komisi VII DPR RI Ratna Juwitasari. Foto: Ayu/nvl

# Mutu Pesantren Semakin Baik, Bencana Harus Ditangani Bersama

Akhir Maret dan awal April lalu, Komisi VIII DPR RI menerjunkan dua tim Kunjungan Kerja Spesifik ke Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Di Cianjur, Komisi VIII menilai mutu pendidikan pesantren dan madrasah di Cianjur secara umum sudah baik karena didukung oleh kultur pendidikannya yang mayoritas kalangan santri. Sementara di Karawang, Komisi VIII mengapresiasi penanganan bencana oleh Pemerintah Kabupaten Karawang.



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka menyerahkan bantuan pembangunan gedung madrasah kepada Bupati Cianjur.  
Foto: Ariel/mv

“Dalam proses belajar mengajar, suka tidak suka, fasilitas sarana prasarana menjadi catatan utama problematika dari pendidikan islam di Cianjur, termasuk juga sumber daya manusia dan pengajarnya. Sehingga masih perlu banyak dibantu (oleh pemerintah) untuk memperkuat kualitasnya,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka usai memimpin pertemuan Komisi VIII dengan Bupati Cianjur beserta jajaran, Kepala Kemenag Cianjur, Kasubdit Pondok Pesantren serta *stakeholder* lainnya di Kantor Bupati Cianjur.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini melanjutkan, dalam sejarah, madrasah

dan pesantren berkembang secara kultural dan alamiah. Khusus di Cianjur, lebih dari 50 persen warganya mengenyam pendidikan di pesantren atau nyantri. Sehingga, pendidikan pesantren itu sudah selayaknya dianggap sebagai pendidikan formal sebagaimana pendidikan di sekolah umum.

“Kita berharap (pendidikan pesantren) membantu untuk peningkatan IPM (indeks pembangunan manusia) di Cianjur. Selama ini, pendidikan pesantren tidak dinilai menjadi pendidikan formal, oleh karena itu ketika kemudian nanti kalau ada formalisasi pendidikan pesantren, kita berharap itu menjadi indikator kenaikan IPM

Cianjur,” harap Diah.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VIII DPR RI Samsu Niang menjelaskan bahwasanya Cianjur juga terkenal dengan sebagai santri. Dari informasi yang ia dapatkan, banyak pesantren di Cianjur yang telah menggelar proses pembelajaran secara fisik dan tatap muka, tentu saja dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat.

“Di Cianjur, ada pesantren yang juara tiga seluruh Indonesia dalam penanganan Covid-19. Kalau ini bisa dilakukan oleh semua sekolah, pesantren, madrasah dan sekolah umum lainnya, saya kira tidak ada masalah, yang penting disiplin ketat dalam proses. Dan Cianjur sudah membuktikan itu menjadi zona hijau,” kata politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

## APRESIASI PENANGANAN BENCANA OLEH PEMKAB KARAWANG

Komisi VIII DPR RI mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Karawang maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menangani bencana. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzilly menjelaskan, bentuk keberpihakan Pemkab Karawang dalam penanganan bencana salah satunya dengan pengalokasian dana penanganan bencana sebesar Rp17,5 miliar.

Ace mengungkapkan hal tersebut saat memimpin pertemuan Tim



Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI menyalurkan bantuan kepada Pemkab Karawang. Foto: Sofyan/ivi

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dengan Bupati Karawang Cellica Nurrachdiana, Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang Acep Jamhuri, perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), perwakilan BPBD serta jajaran Pemkab Karawang di Kantor Bupati Karawang.

“Kami mengapresiasi terhadap kebijakan yang dilakukan Pemkab Karawang ini. Tentu ke depan kami juga mendorong supaya kesiapsiagaan soal bencana ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, tetapi juga bersama sama mengajak masyarakat untuk siap menghadapi bencana. Misalnya evakuasi korban, (mengajak masyarakat) menempati lahan-lahan yang tidak berpotensi longsor,” jelas politisi Partai Golkar itu.

Ace mengingatkan, berbagai sumber daya air yang ada di Karawang jangan sampai menjadi bencana banjir kepada masyarakat, sehingga perlu mendapat penanganan yang optimal dari Pemkab Karawang. Selain itu, Karawang sebagai daerah industri juga harus betul-betul memperhatikan aspek tata ruang, aspek analisis dampak lingkungan hingga

analisis dampak kebencanaan. Hal itu pun menjadi perhatian Komisi VIII DPR RI dalam rangka penyusunan revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

“Di dalam penyusunan revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana, kami memperhatikan sekali aspek analisis risiko bencana di dalam tata ruang

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf. Foto: Sofyan/ivi



pembangunan kita. Jangan sampai kita ingin membangun industri yang mendorong bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, tetapi kalau tanpa memperhatikan aspek dampak kebencanaan ya menjadi percuma. Karena kalau ada curah hujan tinggi bisa menimbulkan kawasan industri itu menjadi terendam banjir. Hal ini menjadi perhatian Komisi VIII,” tandas Ace.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf menyoroti permasalahan pola koordinasi yang terjadi saat awal penanganan bencana. Pasalnya, UU Penanggulangan Bencana belum mengatur pola koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Karena itu, ia hendak menggali persoalan ini di daerah agar bisa diramu

menjadi Daftar Inventaris Masalah (DIM) untuk dibahas bersama pemerintah.

“Kami hendak mengetahui seperti apa pola koordinasi antara kepala daerah, BPBD, Dinas Sosial, dan *stakeholders* lain ketika

bencana banjir melanda Kabupaten Karawang beberapa waktu lalu. Sebab, poin koordinasi inilah yang akan dialami dalam RUU Kebencanaan, apalagi faktanya isu koordinasi acapkali jadi masalah,” papar politisi PKS itu. ● afr,sf/es

# Komisi IX Tinjau Permasalahan PMI dan Kartu Prakerja di Daerah

Komisi IX DPR RI terus menyerap aspirasi langsung dari daerah guna mempersiapkan bekal keahlian para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan ke luar negeri. Di samping itu, Komisi IX juga menyoroti berbagai polemik seputar Kartu Prakerja.

**W**akil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan para Pekerja

Migran Indonesia (PMI) yang akan bekerja di luar negeri harus betul-betul dipersiapkan dengan berbagai pelatihan. Selain dibekali kemampuan teknis dan bahasa, penting pula bagi PMI untuk dibekali pemahaman tentang kultur dan budaya negara tujuannya.

“Dari hasil pertemuan tadi yang dilakukan, bisa kelihatan. Kita masih sangat membutuhkan dukungan dan penguatan agar BLK (Balai Latihan Kerja) atau pusat sertifikasi terkait pelatihan (bagi PMI),” ujar Melki usai memimpin pertemuan tim kunspek Komisi IX DPR RI dengan Gubernur Kalbar, UPT BP2MI, BPJS Ketenagakerjaan dan pihak terkait lainnya di Pontianak, Kalbar, baru-baru ini.

Ia menyatakan, Komisi IX DPR RI bersama mitra kerja di Jakarta akan membantu Pemprov Kalimantan Barat dalam persiapan penanganan PMI yang akan keluar negeri melalui BLK. Termasuk juga PMI yang pulang harus dipersiapkan dengan baik terutama di



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena bertukar cinderamata dengan Gubernur Kalimantan Barat.  
Foto: Eman/riwi

masa pandemi- Covid-19 ini. Dengan demikian, jalur PMI yang prosedural diharapkan akan lebih optimal.

Untuk mempermudah pelayanan bagi para PMI, politisi Fraksi Partai Golkar ini mengusulkan agar dibentuk Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA). Dimana, seluruh kementerian lembaga yang terkait dengan urusan pemberangkatan maupun pemulangan PMI betul-betul ada di satu tempat tersebut.

“Kemudian mereka (LTSA) harus merespon secara cepat kebutuhan PMI kita ketika akan pergi maupun pulang. Saya kira kalau kita bisa mengoptimalkan LTSA itu semuanya sudah ada di situ,” terangnya.

## **KARTU PRAKERJA BERPOTENSI TIMBULKAN ‘MORAL HAZARD’**

Komisi IX DPR RI mengumpulkan

data mengenai program Kartu Prakerja dan Bantuan Subsidi Usaha (BSU). Terungkap kecenderungan bahwa program Kartu Prakerja berpotensi munculkan *moral hazard*. Hal ini disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani dalam rapat Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dengan Wakil Bupati Badung di Kantor Bupati Badung, Bali.

“(Anggaran) Rp20 triliun okelah kalau yang kemudian disampaikan kepada peserta 2,4 juta. (Besaran) Rp600 ribu kali 4 bulan kita masih bisa menerima. Tetapi kalau kemudian pelatihannya dari biaya Rp5-100 ribu dikalikan dari berapa (peserta) yang akan menerima pelatihan itu, tentu ini menjadi satu potensi *moral hazard*,” ujar Netty merinci angka keluar dan yang diterima penerima manfaat Kartu Prakerja.



Hal itu diungkapkannya karena pada awalnya Kartu Prakerja merupakan salah satu program yang akan memberikan sinyal pengikatan kapasitas kompetensi para pencari kerja. “Jadi entah itu *rescuing* atau *obscuring*. Tapi kan ternyata kalau kita perhatikan bahwa tidak ada kejelasan, dari posko pendampingan itu hanya bisa mengklaim data peserta,” tambahnya.

Netty menegaskan *output* yang didapat penerima manfaat belum jelas tingkat efektivitasnya. “Tapi seperti apa *output*-nya, efektivitasnya, apakah betul setelah mendapatkan pelatihan mereka bisa bangkit dari keterpurukan dampak pandemi itu juga tidak bisa diukur. Padahal kalau kita bicara angkanya itu sangat fantastis,” imbuhnya.

#### DESAK TRANSPARANSI DATA

Anggota Komisi IX DPR RI Fadholi mengatakan program Kartu Prakerja menjadi kebijakan strategis pemerintah untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan pekerja selama masa pandemi Covid-19. Menurutnya, perlu transparansi data Kartu Prakerja agar terkontrol dengan baik, dan pengawasan langsung terkait asas manfaatnya.

“Selanjutnya perlu keadilan secara

Anggota Komisi IX DPR RI  
Netty Prasetyani. Foto: Erlangga/nvl



Anggota Komisi IX DPR RI Fadholi. Foto: All/mvl



proporsional, disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja di masing-masing daerah. Harapannya perlu ada koordinasi, sehingga datanya tidak tersentralisasi ke pusat saja tetapi kepala daerah harus diberikan laporannya,” kata Fadholi usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dengan Wali Kota Salatiga beserta Wali Kota Salatiga. Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi IX

DPR RI Wenny Haryanto juga mewanti-wanti agar penerima manfaat Kartu Prakerja jangan sampai tumpang tindih, yang juga mendapatkan BSU. Mengingat BSU ditujukan bagi pegawai swasta yang berpendapatan di bawah Rp5 juta dan aktif terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sementara, Kartu Prakerja ditujukan bagi seluruh masyarakat, baik pekerja formal maupun informal berusia di atas 18 tahun yang terdampak pandemi, dengan tetap mengikuti tahap seleksi yang ada.

“Rasanya begitu jelas strategisnya BSU dan Kartu Prakerja ini, namun lagi-lagi hal tersebut tidak ada terealisasi sebagaimana yang diharapkan jika penyaluran dan pelaksanaannya tidak tepat sasaran. Untuk itu, Komisi IX melakukan evaluasi kedua program tersebut sebagai bentuk pengawalan, data dan informasi yang didapatkan akan menjadi bahan masukan untuk meningkatkan pengawasan dan menjadi rekomendasi kepada pemerintah untuk perbaikan dan penyempurnaan,” ungkap Wenny. • es,er,alw/es

# Serap Aspirasi RUU Praktik Psikologi dari Akademisi

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) Praktik Psikologi menyerap aspirasi dari beberapa *civitas akademika* di antaranya Universitas Brawijaya di Malang dan Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta.



Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI foto bersama akademisi Universitas Brawijaya, di Malang, Jawa Timur. Foto: Kresno/mf

**K**etua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menginginkan RUU Praktik Psikologi melampaui berbagai masalah yang ada selama ini. Untuk itu, Tim Panja menghimpun sebanyak-banyaknya pandangan dan masukan dari berbagai pihak, agar RUU ini komprehensif sebelum ditetapkan menjadi UU.

“Di saat yang sama ada juga yang di wilayah nonteknis, nonklinis yang ingin RUU ini bisa memayungi semuanya. Karena itu sekali lagi, RUU Praktik Psikologi ini akan

bermakna kalau konseling sivitasnya bisa terjadi, merangkul semua pihak dan secara operasional di lapangan terjadi harmoni, terjadi keseragaman teman-teman yang menjadi bagian dari *stakeholder* psikologi ini,” jelas Huda saat memimpin pertemuan dengan sivitas akademika Universitas Brawijaya (Unbraw), di Malang, Jawa Timur, baru-baru ini.

Ada sejumlah rekomendasi yang didapat menyangkut kelembagaan psikologi, mengingat bidang ini sudah terintegrasi dengan kementerian tertentu dan memiliki regulasi.

Untuk syarat dan prasyarat untuk membuka praktik, menurut politisi fraksi PKB tersebut, hal ini menjadi bagian yang diatur secara substantif melalui RUU Praktik Psikologi. Termasuk di pentingnya kehadiran pemerintah yang diwakili Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memastikan psikologi pada level pendidikan berbagai jenjang bisa tertuntaskan dengan baik.

“Panja masih punya PR untuk duduk bersama dengan para *stakeholder* terkait dengan psikologi ini, karena sudah ada yang berjalan, *existing*, dan sudah ada payung hukumnya, ada regulasi baru yang semoga tidak saling tumpang tindih dan tidak menjadi parsial. Semangatnya adalah komprehensif, untuk menuju ke sana nanti beberapa substansi masalah yang belum ada titik temunya, nanti kita duduk bersama dengan berbagai pihak,” pungkas legislator dapil Jawa Barat VII itu.

## JEMBATANI PROFESI PSIKOLOGI

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan, tujuan pembahasan RUU Praktik Psikologi salah satunya untuk menjembatani profesi-profesi psikologi, dan agar tidak berbenturan dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

“Komisi X membahas bagaimana (Psikolog) ada suatu kelembagaan, sebagaimana profesi lain itu dijembatani, karena sebelumnya ada profesi psikologi yang sudah diakomodasi di UU Kesehatan dan Kesehatan Jiwa, bagaimana supaya UU ini tidak berbenturan dengan UU tersebut, tetapi juga tidak meninggalkan sama sekali. Jadi kita harus mengakomodasi semua dan disinkronisasi tentang kelembagaan tersebut,” ujar Fikri.

Menurutnya, UU ini dibentuk supaya ada kompetensi dan kejelasan, agar



Wakil Ketua  
Komisi X DPR RI  
Abdul Fikri Faqih.  
Foto: Kresno/rvi

## RUU PRAKTIK PSIKOLOGI BERI KEPASTIAN HUKUM

Sementara itu dari Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y), Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan, RUU Praktik Psikologi

telah masuk Prolegnas Prioritas 2021. RUU ini akan dibahas bersama pemerintah meliputi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, serta Kementerian Hukum dan HAM.

Di hadapan para akademisi Universitas Gadjah Mada, di Yogyakarta, Dede mengungkapkan, sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut, Komisi X DPR RI berupaya menyerap aspirasi dan masukan dari berbagai pihak.

“Psikologi saat ini menjadi persoalan dan isu penting salah satunya di media sosial. Sebab banyak orang yang tidak punya latar belakang psikologi tapi mengaku mampu memberikan materi terkait psikologi. Kami mohon masukan komprehensif terkait RUU Praktik Psikologi ini,” tandas Dede Yusuf.

Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan bahwa ruh dari RUU Praktik Psikologi ini adalah bagaimana perlindungan terhadap konsumen (masyarakat) itu adalah suatu hal yang paling penting. Psikolog yang melakukan praktik juga mendapat perlindungan sebagaimana profesi lainnya. Dan memberikan kepastian hukum bagi organisasi profesi yang berwenang dalam penyelenggaraan praktik psikologi.

“Jangan sampai terjadi maaf ‘kebohongan-kebohongan’ yang mengaku-ngaku sebagai psikolog, tapi nyatanya tidak ada *background* pendidikan psikologi. Maka diperlukan aturan dan kejelasan mengenai praktik psikologi ini,” tukas legislator dapil Jawa Barat II itu. ● eno,oji/es

tidak ada psikolog ‘abal-abal’ dan nantinya akan ada yang menilai, mengevaluasi dan memberikan sertifikasi, dan UU ini akan mengatur lembaga-lembaganya yang nanti akan disimulasikan terlebih dahulu.

“Profesi psikologi ini banyak, ada psikologi forensik, pendidikan, klinis dan seterusnya, yang diatur UU barangkali baru 1 yaitu Psikologi Klinis dan itu diatur di UU Kesehatan dan Kesehatan Jiwa, bukan berarti psikologi yang lain seperti forensik dan sebagainya tidak baik atau tidak legal, mereka juga harus dilindungi. Maka itulah urgensi UU ini muncul, supaya seluruh bidang psikologi ini semua itu *legal standing*-nya sesuai dengan UU,” ujar Fikri.

UU Praktik Psikologi ini, menurut Fikri banyak direspon positif oleh sejumlah pihak, karena sebelumnya tidak ada yang memberikan kejelasan atau *legal standing* kepada profesi psikologi, terutama legalitas praktik psikologi mereka, yang nantinya status mereka bisa sebagai asisten psikologi, sebagai psikolog dan sebagainya.



Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI bertukar cinderamata dengan rektor UGM Panut Mulyono. Foto: Oji/rvi

# Apresiasi Peningkatan Perekonomian Daerah



Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto saat memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi XI DPR RI dengan BI, OJK, Himbara, Pemprov Jawa Timur, Bulog, di Surabaya, Jatim. Foto: Singgih/wi

Guncangan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 sangatlah besar. Pandemi Covid-19 telah meluluhlantakkan seluruh aktivitas dan fundamental perekonomian nasional. Hampir tidak ada pelaku ekonomi yang mampu bertahan dan mengambil keuntungan dari terjadinya krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini.

**K**etua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI ke Jawa Timur menyampaikan, berdasar rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) pada 1 Maret 2021, perkembangan harga berbagai komoditas pada Februari 2021 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Hasil pemantauan BPS di 90 kota, pada Februari 2021 terjadi inflasi sebesar 0,10 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,95 pada Januari 2021 menjadi 106,06 pada Februari 2021.

“Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Februari) 2021 sebesar 0,36 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Februari 2021 terhadap Februari 2020) sebesar 1,38 persen. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks

kelompok pengeluaran,” ungkap Dito.

Dito melanjutkan, khusus di Jatim, juga terjadi kenaikan IHK sebesar 0,22 persen yaitu dari 105,02 pada bulan Januari 2021 menjadi 105,25 pada bulan Februari 2021. Tingkat inflasi tahun kalender Februari 2021 sebesar 0,53 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Februari 2021 terhadap Februari 2020) sebesar 1,16 persen.

“Terkait inflasi, Bank Indonesia bersama instansi lainnya telah membentuk TPID (Tim Pemantau Inflasi Daerah) di daerah-daerah, termasuk di Jawa Timur. Pada bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idulfitri, tentunya TPID harus bisa menunjukkan perannya, mengingat pada momentum ini biasanya terjadi kenaikan harga-harga di masyarakat yang berdampak terhadap berkurangnya daya beli,” ungkap politisi Partai Golkar itu.

Komisi XI DPR RI berharap BI maupun TPID melaksanakan langkah-langkah efektif agar kenaikan harga-harga tersebut tidak terlalu membebani masyarakat. “Insya Allah menghadapi bulan puasa ini tidak terjadi sesuatu yang kita khawatirkan, mudah-mudahan berjalan lancar. Dari hasil pembicaraan tadi, semuanya bisa berjalan dengan lancar dengan kerja sama dukungan dari pemerintah dan tentunya dari DPR RI,” optimis Dito.

Apabila inflasi dapat terjaga, Dito yakin akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat yang pada akhirnya dapat mendorong perekonomian lebih baik lagi. Legislator dapil Jawa Tengah VIII itu juga menegaskan, guna mendukung perkembangan ekonomi yang berkesinambungan dan menjaga kesejahteraan masyarakat, maka sangat penting untuk menjaga tingkat inflasi pada level yang terjaga.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurniawati optimis terhadap pertumbuhan perekonomian di Provinsi Jawa Timur. Hal ini tercermin dari karakter masyarakat Jawa Timur, baik regulator, otoritas, stakeholder memiliki semangat kerja sama yang tinggi sehingga pergerakan ekonomi di Jatim menjadi tumbuh.

“Ini tertampilkan dari *case*-nya Covid-19 ini. Di Jatim, *case*-nya juga termasuk sudah mulai menurun dan tidak terlalu signifikan pertumbuhannya, tetapi di sisi lain pergerakan ekonomi juga berjalan dengan baik,” ungkap Indah.

“Jadi dari hasil pemaparan seluruh *stakeholder* tadi kami melihat, kami sangat optimis dan *convidence* bahwa Jawa Timur tetap mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang mendukung atau berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkapnya.

Indah menyampaikan, dari paparan BI Jatim diketahui perekonomian Jatim pada triwulan I 2021 diperkirakan membaik dibandingkan triwulan IV 2020. Dari sisi permintaan, estimasi perbaikan ekonomi Jawa Timur diperkirakan bersumber dari



SAAT INI KAN DAYA BELI MASYARAKAT ADA YANG TURUN, TETAPI MASIH ADA YANG MEMILIKI DAYA BELI TETAPI TIDAK MELAKUKAN GERAKAN-GERAKAN EKONOMI, MEREKA LEBIH CENDERUNG MENEMPATKAN DANA DI PERBANKAN

Anggota Komisi XI DPR RI  
Indah Kurniawati. Foto: Singgih/nvl

peningkatan konsumsi pemerintah sejalan dengan akselerasi pemulihan ekonomi. Kinerja konsumsi LNPRT juga diperkirakan turut meningkat sejalan dengan mulai berlangsungnya rapat-rapat instansi dan penyelenggaraan acara tatap muka di hotel dengan protokol kesehatan.

“Saat ini kan daya beli masyarakat ada yang turun, tetapi masih ada yang memiliki daya beli tetapi tidak melakukan gerakan-gerakan ekonomi, mereka lebih cenderung menempatkan dana di perbankan,” ujar politisi PDI-Perjuangan itu.

Ia juga sampaikan bahwa bulan ramadan menjadi momentum untuk men-*trigger* pergerakan ekonomi, karena paling tidak orang akan belanja meskipun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, dimana prediksi nya akan meningkat sekitar 10 – 19 persen.

#### KEBANGKITAN LAMPUNG SELATAN

Meski sempat berkontraksi akibat pandemi serta terkena imbas pembangunan Tol Trans Sumatera Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terus melakukan upaya dalam rangka menghidupkan kembali perekonomian rakyat. Hal ini tentu sangat diapresiasi pimpinan Kunspek Lampung Komisi XI DPR RI, Junaidi Auly.

Menurutnya, langkah-langkah seperti membina UMKM dan melakukan

digitalisasi ekonomi merupakan bukti pemerintah berkomitmen pada rakyat. Hal tersebut diungkapkannya usai pertemuan dengan jajaran Pemkab Lampung Selatan, Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS) di Kantor Bupati Lamsel, Lampung, awal April lalu. Menurutnya hal ini merupakan satu aksi yang positif yang dilakukan para pemangku kepentingan di Lamsel, terlebih Indonesia akan memasuki Hari Besar Keagamaan.

“Kami melihat keseriusan Lampung Selatan mengembalikan aktivitas perekonomiannya yang sempat terdampak akibat pandemi juga inflasi terjadi. Maka itu kami hadir untuk memastikan keamanan aktivitas ekonominya jelang memasuki Bulan Ramadan dan Idulfitri. Ini waktu yang krusial melihat akan banyak aktivitas belanja bahan pokok di masa ini,”

terang Jun, sapaan akrabnya.

Politisi Fraksi PKS tersebut mengaku senang melihat keberpihakan pemerintah dan perbankan dalam rangka membina UMKM dengan memberikan partisipasi penuh dalam upaya mengembalikan perekonomian di Lamsel. Untuk itu, ia berharap dengan adanya keseriusan ini, masyarakat Lamsel dapat merasakan kembali kesejahteraannya seperti di masa sebelum pandemi.

“Mereka juga dalam tahap membuka kembali sektor-sektor produktif. Saya rasa dengan mengembangkan potensi lokal, dalam hal ini pertanian, Lamsel akan segera bangkit dari masa sulitnya satu tahun belakangan. Oleh karena itu, momentum ini harus dibarengi dengan kebijakan-kebijakan yang populer. Dan itu sudah diupayakan,” tukas politisi kelahiran Lampung ini. ● skr,er/es



Tim Kunspek Komisi XI DPR RI foto bersama dengan jajaran Pemkab Lampung Selatan serta mitra kerja di Lampung. Foto: Erlangga/nvl



Salah satu sekolah yang mencerapkan protokol kesehatan. Foto: Eko/mv

## Perketat Prokes saat Sekolah Tatap Muka

“Langkah pemerintah yang memperbolehkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas pada Juli mendatang, layak diapresiasi. Meskipun langkah ini mengurangi kesenjangan pendidikan, protokol kesehatan menjadi suatu keharusan untuk diterapkan di lingkungan sekolah”

**P**ada tanggal 30 Maret 2021, Pemerintah mengumumkan bahwa institusi pendidikan dan sekolah bisa melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas pada tahun ajaran baru, yang dimulai Juli 2021. Panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 juga telah diterbitkan pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri yang ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri

Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri.

Tujuan sekolah tatap muka diberlakukan untuk mengurangi dampak negatif penutupan sekolah yang berkepanjangan pada pembelajaran siswa. Dimana, peserta didik semakin tertinggal dalam belajar yang tidak hanya memperlebar kesenjangan pendidikan, tetapi juga berdampak nyata pada hilangnya pengalaman belajar (*learning lost*), putus sekolah hingga ancaman hilang generasi (*lost generation*).

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah

Sjaifudian mengapresiasi langkah pemerintah yang akan membuka sekolah untuk mengurangi dampak negatif akibat pembelajaran jarak jauh yang berkepanjangan. Prinsip pembelajaran tatap muka terbatas harus mengutamakan keselamatan siswa, pendidik dan tenaga pendidik sehingga perlu keseimbangan antara aspek keselamatan dan pembelajaran.

“Pembukaan sekolah adalah salah satu upaya yang diambil untuk mereduksi dampak-dampak negatif di atas. Namun, kebijakan pembelajaran tatap muka ini harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dan berbasis bukti di lapangan,” katanya.

Sebagai upaya mendorong pembukaan sekolah secara menyeluruh pada Juli mendatang, saat ini tengah dilakukan uji coba pembelajaran tatap muka terbatas di beberapa wilayah. “Memang itu yang sedang didorong saat ini. Harapannya, di Juli nanti semua sekolah sudah dapat membuka dengan protokol kesehatan yang ketat seperti yang sedang dicoba beberapa bulan ini,” terangnya.

Untuk menyukseskan pelaksanaan

## PEMBUKAAN SEKOLAH ADALAH SALAH SATU UPAYA YANG DIAMBIL UNTUK MEREDUKSI DAMPAK-DAMPAK NEGATIF DI ATAS

Wakil Ketua Komisi X DPR RI  
Hetifah Sjaifudian. Foto: Tim/mv



pembelajaran tatap muka secara terbatas, diperlukan keterlibatan semua pihak mulai dari pemerintah daerah yang menjadi pemangku kebijakan, dinas terkait yang menjadi pengawasan lembaga, sekolah yang menjadi pelaksana teknis di wilayah. Tak hanya itu, peran orang tua murid juga penting dalam memantau terpenuhinya semua aspek serta persyaratan yang wajib dilakukan satuan pendidikan dalam membuka sekolah.

Disampaikan Hetifah, persetujuan dari orang tua/wali menjadi poin krusial, karena mereka menjadi garda terdepan kebijakan ini. Jika orang tua belum mengizinkan anak-anaknya menjalankan pembelajaran tatap muka, maka hal itu tidak boleh dipaksakan. Anak-anak yang tidak mendapat izin harus tetap mendapatkan layanan pendidikan secara daring atau melalui cara-cara lainnya.

Kalaupun suatu sekolah telah memenuhi semua syarat pembukaan, bukan berarti mereka dapat melakukan pembelajaran tatap muka secara normal seperti sebelum pandemi. “Terdapat daftar periksa yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan pembelajaran tatap muka meliputi ketersediaan sarana sanitasi termasuk toilet layak, sarana cuci tangan dan desinfektan, adanya akses terhadap pelayanan kesehatan, kesiapan menerapkan wajib masker, memiliki thermogun,” paparnya.

“Harus ada pemetaan terhadap warga sekolah yang memiliki komorbid,

## KONDISI KETIKA ANAK-ANAK KITA AKHIRNYA LEBIH BANYAK BERMAIN ONLINE, TIDUR DI RUMAH ATAU HANYA MENDENGARKAN GURU TANPA MEMPERHATIKAN HARUS KITA HADAPI DAN HARUS KITA UBAH

Wakil Ketua Komisi X DPR RI  
Dede Yusuf Macan Effendi. Foto: Jaka/mv



pemetaan warga yang tidak memiliki akses transportasi yang aman, memiliki riwayat perjalanan dari wilayah resiko tinggi, serta terakhir harus mendapat

persetujuan dari komite sekolah, perwakilan orang tua atau wali,” lanjutnya.

Dengan berbagai persyaratan di atas, kebijakan pembukaan suatu sekolah bukan suatu hal yang mudah untuk diambil. Tidak terpenuhinya satu saja poin di atas, berarti sekolah tersebut dilarang untuk dibuka. Sehingga, komite sekolah, dewan pengawas, dan anggota masyarakat lainnya dapat dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, membuat sistem terintegrasi yang memungkinkan seluruh masyarakat untuk mengawasi keberjalanan pembelajaran tatap muka di suatu daerah dan menyediakan *hotline* untuk aspirasi dan pengaduan.

“Kami sebagai wakil rakyat mendorong seluruh *stakeholder* untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan kebijakan ini. Lebih baik menghindari *mudharat* yang lebih besar, dan lebih baik mencegah daripada mengobati,” tutur Hetifah, seraya berharap pelaksanaan pembelajaran tatap muka bisa berjalan lancar dan dilakukan dengan protokol kesehatan yang baik.

Senada dengan Hetifah, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mendukung untuk segera dilaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Proses belajar mengajar secara tatap muka menjadi penting untuk menghindari *learning lost*.

“Kondisi ketika anak-anak kita akhirnya lebih banyak bermain *online*, tidur di rumah atau hanya mendengarkan guru tanpa memperhatikan harus kita hadapi dan harus kita ubah,” ungkapnya.

Namun, sebelum pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas, tenaga pendidik dan kependidikan harus sudah mendapatkan vaksin.

Dan sesuai rencana kebijakan pemerintah, pihak sekolah juga harus tetap menyediakan metode pembelajaran jarak jauh untuk mengakomodasi orang tua yang belum ingin anaknya berangkat ke sekolah. ●  
rmm/es

# Akademisi dan Pemda Perlu Terlibat dalam Diplomasi Internasional

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mengajak Perguruan Tinggi untuk turut serta dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi dalam upaya diplomasi sehingga membawa sesuatu yang konkrit.



Delegasi BKSAP DPR RI di Solo, Jawa Tengah. Foto: Ojir/wi

**K**etua BKSAP DPR RI Fadli Zon mengungkapkan kerja sama dengan perguruan tinggi merupakan bagian dari menjangkau diplomasi total.

“Jadi diplomasi bukan hanya pekerjaan dari Kementerian Luar Negeri dan duta besar yang ada di luar yang menjadi bagian diplomasi formal. Nah, Anggota Parlemen ini kan wakil rakyat, di mana nomenklatur ‘*parliamentary diplomacy*’ sudah ada di setiap negara. Ada Inter-Parliamentary Union (IPU) di tingkat dunia, seperti halnya PBB,” papar Fadli Zon usai mengikuti

pertemuan dengan Rektor, Guru Besar, perwakilan mahasiswa dan sivitas akademika UNS dan perwakilan IAIN, di Solo, Jawa Tengah, awal April lalu.

Politisi Partai Gerindra ini ingin mengajak Perguruan Tinggi, civitas akademika dan para mahasiswa membawa diplomasi daerahnya ke dunia internasional seperti misalnya konsep *Sister City* yang sudah berjalan di beberapa daerah. Hal semacam ini menurutnya bisa menjadi jembatan diplomasi yang baik dan efektif.

“Saya mencontohkan produk-produk tertentu yang mengalami hambatan di Uni Eropa seperti kelapa sawit,

diharapkan dengan adanya diplomasi parlemen maka diplomasi formal pemerintah akan lebih mudah,” tukas Anggota Komisi I DPR RI tersebut.

Larangan masuknya produk kelapa sawit dengan alasan isu lingkungan hidup adalah parlemen Uni Eropa. Dan karena sesama parlemen, maka diplomasi menjadi lebih mudah. “Karena kami tidak terikat pada diplomasi formal yang mungkin agak kaku. Kami bisa sampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat (pemerintah) Indonesia, begitu juga tentang soal-soal isu lain,” imbuh Fadli.

Sementara terkait isu-isu strategis dunia internasional seperti Palestina, Rohingya, Myanmar, Uighur juga turut disuarakan sebagai bagian peran serta parlemen Indonesia mewujudkan perdamaian dunia sesuai amanah konstitusi.

Lebih lanjut Wakil Ketua BKSAP DPR RI Achmad Hafisz Tohir mengemukakan dipilihnya kampus sebagai media sosialisasi diplomasi parlemen karena mahasiswa menjadi agen perubahan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kampus dan mahasiswa merupakan cikal bakal lahirnya demokrasi di Republik Indonesia melalui proses reformasi yang legendaris tahun 1998 silam

“Kami pilih kampus karena melihat dalam demokrasi itu mahasiswa menjadi cikal bakal munculnya demokrasi di Republik Indonesia, tanpa mahasiswa kita tidak mungkin mengalami masa reformasi yang sangat legendaris tersebut,” ungkap Hafisz.

Pemikiran-pemikiran mahasiswa itu tidak ada intrik-intrik politik, mereka begitu riil. Melalui forum terhormat



yang juga dihadiri para guru besar dan sivitas akademika ini, dengan masuknya BKSAP DPR ke kampus untuk menjelaskan tugas-tugas DPR yang kadang kala juga dikritisi secara positif oleh mahasiswa.

Mengenai fungsi konvensional DPR, Hafisz melanjutkan, yang sudah berjalan puluhan tahun yaitu anggaran, legislasi, dan pengawasan. “Ada satu fungsi yang kadang rakyat tidak tahu, yaitu menciptakan perdamaian dunia dan berperan aktif dalam pergaulan dunia dalam bentuk bebas aktif. DPR berperan serta terhadap diplomasi dunia, makanya kami namanya ‘*second track diplomacy*’, karena di ujung tombaknya tetap pemerintah,” tandas politisi Fraksi PAN ini.

Sebagai contoh, di forum internasional BKSAP selalu melihat figur negara yang akan dikunjungi. “Ketika ke Ukraina yang secara hubungan diplomasi sangat bersahabat, hubungan dagang juga lancar, hubungan politik juga baik sekali. Di sini saya melihat ada *gap* (celah) di mana ekspor kita hanya 200 juta dolar AS, sedangkan impornya 700 juta dolar AS. Dalam rapat internal saya mengkritisi itu, bahwa kita harus memperkuat imbal balik dari pada ekspor dan impor,” tandas Hafisz.

Sebagai negara yang bersahabat maka kita bisa mendorong adanya *balance* (keseimbangan) antara ekspor

dan impor. “Katakanlah kalau kita banyak impor gandum dari Ukraina, mereka juga harus bersedia mengambil kelapa sawit kita, itu yang saya usulkan kemarin saat rapat dengan Parlemen Ukraina. Bagaimana kalau itu di-*counter trade*, ternyata Ukraina belum bisa melakukan itu,” beber legislator dapil Sumatera Selatan I ini.

**ANGGOTA  
PARLEMEN INI KAN  
WAKIL RAKYAT, DI  
MANA NOMENKLATUR  
'PARLIAMENTARY  
DIPLOMACY' SUDAH  
ADA DI SETIAP  
NEGARA. ADA INTER-  
PARLIAMENTARY  
UNION (IPU) DI TINGKAT  
DUNIA, SEPERTI  
HALNYA PBB**

Fadli Zon.  
Foto: Oji/nvl



“Kita pernah lakukan diplomasi *counter trade* saat pembelian pesawat Sukhoi dari Rusia yang tidak sepenuhnya kita bayar dengan uang. Kita kasih bahan makanan kita seperti kelapa sawit dan lain sebagainya. Ini menjadi contoh langkah-langkah perbaikan ekonomi melalui jalur diplomasi parlemen yang dilakukan BKSAP di panggung Internasional,” pungkas Anggota Komisi XI DPR RI itu.

Rektor UNS Jamal Wiwoho mengucapkan terima kasih atas dipilihnya UNS sebagai salah satu perguruan tinggi yang dijadikan sarana sosialisasi diplomasi parlemen oleh BKSAP DPR RI. “Reputasi BKSAP DPR RI ini sudah kita ketahui berkisah di ajang diplomasi dunia internasional. Kami berterima kasih kepada BKSAP DPR RI yang memilih Universitas Sebelas Maret dalam kegiatan sosialisasi diplomasi parlemen,” ungkapnya.

Kegiatan BKSAP Day dengan tema “Diplomasi BKSAP DPR RI: Membangun Sinergi dan Kolaborasi untuk Optimalisasi Potensi Kota Surakarta, Jawa Tengah” dipimpin Wakil Ketua BKSAP DPR RI Hafisz Tohir (F-PAN) bersama Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon (F-Gerindra), Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera (F-PKS) dan Anggota BKSAP DPR RI R. Wulansari (F-Gerindra), Arzeti Bilbina (F-PKB), Hasani Bin Zuber (F-Demokrat). • tn/es



Delegasi BKSAP DPR RI foto bersama dengan Rektor, Guru Besar, dan civitas akademika UNS dan perwakilan IAIN, di Solo, Jawa Tengah. Foto: Oji/nvl



**DAERAH  
PEMILIHAN  
(DAPIL)**



# Maria Lestari: Dukung Inovasi Sektor Pertanian di Kalbar

Anggota DPR RI Maria Lestari mendukung pengembangan sub sektor pertanian dan satu di antaranya datang dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalbar dengan menghadirkan Varietas Unggul Baru (VUB).

**M**aria menyampaikan dukungannya saat meninjau panen padi VUB di IP2TP Sungai Kakap, Pontianak. “Saya bersama BPTP mendukung percepatan taman pangan dalam kegiatan sektor pertanian di Kalbar dengan anggaran yang cukup besar berikut bibit di daerah Landak dan Sambas,” ujar wakil rakyat dapil Kalimantan Barat tersebut.

Selain akan merealisasikan bantuan untuk beberapa bulan ke depan, politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu juga akan

melihat langsung lokasi lahan yang akan diolah.

“Kami akan salurkan bantuan sekitar April-Mei 2021. Untuk di daerah Landak dari Sungai Temilak, lahan yang akan diolah seluas 8-10 hektar. Begitu pula dengan di Sambas,” terang Anggota Badan Anggaran DPR RI itu .

Untuk itu, perlu kerja sama yang baik antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam mengolah potensi alam yang ada di Kalbar. “Melihat potensi sektor pangan yang luas dan sumber alam yang berkualitas, perlu

kerja sama yang baik dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam mengolah dan memanfaatkan potensi alam yang ada di Kalbar dengan baik,” kata dia.

Selain sektor padi, pangan lokal juga harus dikuatkan dan diunggulkan seperti jahe, porang dan padi nutrizinc, “Koordinasi yang baik dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten ditambah anggaran yang cukup, Kalbar diyakini tidak akan kekurangan pangan,” ujar Anggota DPR RI yang bertugas di Komisi IV itu. ● ah/es



Anggota DPR RI Maria Lestari (kanan) usai meninjau panen padi VUB di IP2TP Sungai Kakap, Pontianak. Foto: Ist/ivi

## Puteri Anetta Komarudin: Salurkan Bantuan Banjir di Karawang

Bencana banjir kembali melanda beberapa kecamatan di Kabupaten Karawang pada Februari lalu. Genangan terparah terjadi di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat yang telah merendam 296 rumah warga.

rumah terendam sekaligus mengganggu aktifitas warga. Saya harap bantuan yang kami salurkan dapat sedikit membantu untuk kebutuhan bapak/ibu sekalian,” ungkap Anggota Komisi XI DPR RI itu.

Selain menyalurkan bantuan, Politisi Fraksi Partai Golkar ini juga menyerap aspirasi masyarakat dan akan mendorong sinergi dari berbagai pihak baik pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat sendiri untuk dapat menangani banjir yang terjadi di wilayah tersebut setiap tahunnya.

“Saya akan mencoba menyerap

seluruh aspirasi dan menyampaikan permasalahan ini kepada komisi terkait di DPR RI. Hal ini cukup memprihatinkan karena masyarakat mengalami kerugian baik dari sisi materi atau *economy loss* maupun dari sisi kesehatan yang diakibatkan oleh bencana ini setiap tahunnya,” ujarnya.

Selanjutnya, legislator dapil Jawa Barat VII ini mengingatkan kepada masyarakat dan pengungsi untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Ia juga berharap banjir dapat segera surut sehingga para pengungsi bisa kembali ke rumah mengingat penyebaran Covid-19 di Kabupaten Karawang masih relatif tinggi.

“Selain itu kami juga mengajak para korban yang ada di pengungsian

serta petugas yang menangani bencana banjir untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, apabila di daerah Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta ada yang terkena bencana lainnya, mohon sampaikan kepada kami. Kami akan berusaha bergerak dan membantu semampu kami,” tutup Puteri. • bia/es



Anggota DPR RI Puteri Anetta Komarudin menyalurkan bantuan kepada masyarakat di Kabupaten Karawang. Foto: Ist/invl

**A**nggota DPR RI Puteri Anetta Komarudin terjun secara langsung untuk meninjau dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak. Puteri menyalurkan bantuan berupa 400 paket sembako yang diserahkan kepada perwakilan desa untuk kemudian

didistribusikan secara merata. Ia berharap bantuan yang disalurkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat terdampak yang rumahnya terendam.

“Hujan deras yang mengguyur selama beberapa hari telah memicu luapan air dari sungai yang berada di dekat pemukiman warga. Akibatnya, ratusan

## Katherine Angela Oendoen: Salurkan Bantuan Kepada Korban Bencana Banjir di Bengkayang

Simpati dan bantuan yang menyentuh langsung masyarakat sangat diperlukan di saat kondisi bencana berlangsung. Untuk itulah, Anggota DPR RI Katherine Angela Oendoen memberikan bantuan terhadap para korban banjir di sejumlah daerah di Kalimantan Barat.

**P**olitisi Fraksi Partai Gerindra tersebut mengungkapkan rasa duka yang mendalam dan empati sebesar-besarnya kepada korban bencana banjir yang ada di Kalimantan Barat. “Kami wajib turun langsung memberikan bantuan. Harus hadir di tengah masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan,” tegasnya.

Adapun bantuan yang disalurkan berupa sembako seperti beras, minyak

goreng, mie instan, gula. Bantuan tersebut diserahkan langsung kepada posko tanggap darurat bencana banjir di 5 lokasi di Kecamatan Jagoi, Kecamatan Siding, kantor Desa Seluas, Kecamatan Seluas dan di Desa Lesabela Kecamatan Ledo.

Kemudian penyaluran bantuan juga meliputi posko tanggap darurat bencana alam di Kecamatan Sanggau Ledo serta di kantor Camat Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang. Bantuan yang diserahkan

untuk disalurkan langsung kepada warga terdampak di kecamatan tersebut.

Katherine juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh kader partainya di Bengkayang yang telah mengeluarkan energi dan meluangkan waktu untuk berbagi buat para warga yang terdampak banjir. “Terimakasih kepada seluruh kader Gerindra Bengkayang untuk berbagi buat para warga terdampak banjir,” ucap Anggota Komisi VII DPR RI itu.

Turut serta dalam menyalurkan bantuan yakni Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang sekaligus Ketua DPC Gerindra Kabupaten Bengkayang Fransiskus, Anggota DPRD dapil III Provinsi Kalimantan Barat Alexander, serta Anggota DPRD dapil II Kabupaten Bengkayang Debit. ● ah/es



Anggota DPR RI Katherine Angela Oendoen menyalurkan bantuan untuk korban banjir di Bengkayang, Kalbar. Foto: Ist/mvi

Saan Mustofa:

# Normalisasi Sungai, Agenda Penting Cegah Banjir Karawang

Anggota DPR RI Saan Mustopa mendatangi sejumlah lokasi sekaligus meninjau kondisi masyarakat yang terdampak Banjir Karawang.

**B**ersama para pengurus DPD Partai Nasdem Karawang, Saan bersepeda melintasi jalan yang berlumpur bekas banjir. Sepanjang perjalanan, dirinya memastikan kerusakan yang ditimbulkan banjir, proses evakuasi masyarakat yang terdampak, dan ketersediaan logistik.

Berdasarkan informasi yang diterima, dilaporkan ada 34 desa yang terdampak

di 15 kecamatan, Kabupaten Karawang yang terdampak. Pemulihan pascabanjir harus disegerakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, normalisasi sungai perlu menjadi agenda penting untuk pemulihan pascabanjir. Jika dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka normalisasi sungai mampu mencegah terjadinya kembali bencana banjir bandang.

“Perlu diketahui bersama, Karawang ini bukan hanya memiliki satu sungai.

Ada sungai Cibeet, Citarum, Cikarang Gelam, dan sungai-sungai lainnya yang berada di utara Karawang. Jadi beban seluruh sungai tersebut begitu berat menampung airnya, dari situ perlu segera menormalisasi seluruh sungai tersebut,” jelas Politisi Nasional Demokrat itu.

Wakil Rakyat dapil Jawa Barat VII itu pun mendorong pelaksanaan normalisasi sungai di Kabupaten Karawang melibatkan campur tangan baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi, sekaligus pemerintah pusat. Mewujudkan upaya ini membutuhkan keseriusan dari semua pihak.

“Tidak bisa sendiri, harus ada campur tangan baik pemerintah provinsi dan pemerintah pusat agar permasalahan banjir dapat segera diatasi,” terang Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu.

Selama menyambangi Kabupaten Karawang, Saan membagikan 350 paket sembako untuk warga terdampak banjir di Kampung Gempol Anjun, Kelurahan Tanjungpura, Karawang, Jawa Barat. Tidak hanya sembako, ia juga memberikan sumbangan untuk anak yatim dan jompo bagi yang terdampak banjir. • ts/es



Anggota DPR RI Saan Mustopa memberikan bantuan kepada warga terdampak banjir di Karawang, Jawa Barat. Foto: Ist/nvl

## Tommy Kurniawan : Pesantren Jadi Harapan di tengah Gejolak Globalisasi

Pandemi tidak menyurutkan semangat para pekerja pembangunan sebuah pesantren di Desa Harkatjaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pembangunan pesantren ini menjadi sebuah harapan di tengah gejolak perilaku negatif akibat pengaruh globalisasi.



Anggota DPR RI Tommy Kurniawan saat mengunjungi pembangunan Pondok Pesantren Riyadul Muta Alimin. Foto: Ist/inv

**P**olitisi Fraksi PKB Tommy Kurniawan memahami kebutuhan warga Desa Harkatjaya dalam pembangunan pesantren dan mendorong keberlanjutan pembangunan pesantren Riyadul Muta Alimin dengan memberikan beberapa

bantuan material dan ratusan buah kitab suci Alquran.

“Saya harap bantuan ini bisa mempercepat pembangunan Pesantren Riyadul Muta Alimin, sehingga pesantren ini bisa berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat bermanfaat untuk keberlanjutan

sosial,” ungkap Tommy saat mengunjungi pembangunan Pondok Pesantren Riyadul Muta Alimin di Desa Harkatjaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Menurut Anggota Komisi III DPR RI ini, pembangunan pesantren kini menjadi solusi penguatan akhlak di tengah gejolak globalisasi serta derasnya arus informasi. Menurutnya, jika anak muda tidak mampu mem-*filter* gagasan yang tepat untuk perkembangan karakternya, maka akan terjadi degradasi moral atau kemunduran akhlak.

“Oleh karenanya, saya menilai pesantren punya peran penting untuk menyeimbangkan karakter. Nilai-nilai yang diajarkan oleh para kyai itulah yang dapat menetralkan semua gagasan yang masuk akibat derasnya informasi,” ungkap legislator dapil Jawa Barat V tersebut.

Lebih lanjut, Tommy memandang bahwa antara masyarakat dan pesantren kini memiliki kebutuhan yang sama. Masyarakat membutuhkan pesantren untuk memberi penguatan karakter dalam diri anak mereka, sedangkan pesantren bertekad menciptakan individu yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai agama.

“Di pesantren, insyaAllah semuanya bermanfaat dan berkarakter, generasi muda akan lebih baik ditopang dengan pemahaman agama yang lebih baik,” tutupnya. • bla/es



Anggota DPR RI Vera Febyanthy saat memberikan bantuan kepada korban banjir di Karawang. Foto: Ist/nvl

## Vera Febyanthy: **Bantu Warga Terdampak Banjir**

Anggota DPR RI Vera Febyanthy memberikan 8.000 paket bantuan sembako dan alat kebersihan bagi warga yang terkena musibah banjir pada Februari 2021 silam.

**B**antuan yang diberikan untuk daerah pemilihannya Jawa Barat VII. Adapun titik lokasi berada di Desa Karangligar dan Desa Dawuan, Kabupaten Karawang, dan Desa Pantai Indah Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Menurut politisi Fraksi Partai

Demokrat, musibah banjir di Karawang dan Bekasi menjadi musibah rutin bila musim hujan tiba. Hal itu karena curah hujan kali ini cukup tinggi sehingga menyebabkan meluapnya air dari Situ, seperti Situ Kamojing dan Situ Cikaranggelem.

“Juga terjadinya tanggul yang jebol di Sungai Citarum. Sehingga, musibah

banjir ini merendam 108 desa, sejumlah tempat ibadah, 52 masjid, 11 sekolah, 35.092 rumah, serta 8.282 hektar areal persawahan,” jelas Vera.

Vera berharap musibah ini tidak berulang kembali dengan cara antisipasi yang serius oleh pemerintah daerah setempat dengan bantuan dari pemerintah pusat. Terlebih, jika terjadi banjir kembali, sudah disiapkan beberapa skenario mitigasi resiko, termasuk relokasi pengungsi dengan segala pemenuhan kebutuhan dasarnya.

“Pemda setempat harus siap. Jika ini benar rutin terjadi, maka harus ada anggaran alokasi khusus baik untuk pencegahan maupun penanganan saat terjadi bencana. Kita tidak berharap karena banjir sudah rutin terjadi, kita menganggapnya menjadi biasa,” tegas Vera. Akan tetapi masalah harus segera juga diatasi agar masyarakat tidak pesimis terus.

● rdn/es



## Ledia Hanifa Amaliah: Cegah Dampak Covid-19 di Kota Bandung

Pandemi Covid-19 masih menjadi perhatian dunia, tak terkecuali bagi Anggota DPR RI Ledia Hanifa Amaliah. Lewat berbagai kegiatan selama kunjungan di Jawa Barat terutama di Kota Bandung, dirinya berupaya meringankan beban masyarakat setempat.



Anggota DPR RI Ledia Hanifa Amaliah eyalurkan paket bahan pangan kepada masyarakat di Kota Bandung. Foto: Ist/nvl

Selain itu, ia tidak ingin pandemi menghentikan silaturahmi kepada warga sekitar. “Masyarakat Indonesia, khususnya warga di Kota Bandung, banyak yang terdampak langsung dengan pandemi Covid-19 ini. Kepedulian kami kepada mereka hanyalah bagian kecil dari upaya untuk saling berpadu meringankan beban masyarakat,” terang Politisi PKS itu.

Salah satu bentuk upaya yang dilakukannya adalah membagikan paket bahan pangan kepada masyarakat di beberapa kecamatan di Kota Bandung. Pembagian paket dilaksanakan di tujuh kecamatan di antaranya Kecamatan Andir, Cidadap, Batununggal, Cibiru, Ujung Berung,

Bandung Kidul dan Bojongloa Kaler.

Ada lebih dari 1000 keluarga menengah dan menengah ke bawah yang menerima paket bahan pangan. Ledia menyebutkan paket ini dibagikan kepada kedua kelompok tersebut sebagai upaya pengurangan dampak kemiskinan akibat pandemi Covid-19. Dengan adanya bantuan tersebut, masyarakat terdorong untuk gotong royong dan membangun kepedulian antar sesama.

“Yang dikhawatirkan, jumlah masyarakat yang terdampak semakin bertambah karena warga yang selama ini tidak masuk dalam data penduduk miskin pun kini mulai mengalami kesulitan. Utamanya mereka yang selama ini tergolong masyarakat berpendapatan harian, pelaku usaha

mikro dan kecil, para buruh, pekerja kontrak juga pekerja mandiri lainnya.” ujarnya.

Tidak hanya membagikan paket, Wakil Rakyat dapil Jawa Barat I itu juga memantau penerapan protokol kesehatan sekaligus sidak di dua pasar Kota Bandung, Pasar Cibogo di Kecamatan Sukajadi dan Pasar Induk Caringin di Babakan Ciparay. Pemantauan dan sidak ini dilakukan sebagai upaya penerapan fungsi pengawasan.

Ledia menyapa para pedagang sayur dan memastikan bahwa mereka memahami pentingnya penerapan protokol kesehatan untuk demi kebaikan bersama. “Mayoritas pedagang sudah memahami dan menjalani protokol kesehatan sesuai standar seperti memakai masker. Sebagian juga menambah dengan memakai *face shield* dan menyediakan *hand sanitizer*,” ungkapnya.

Dirinya juga berdialog dengan Ketua RW setempat yang sekaligus sebagai pembina KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Tikujang (Ti urang, Ku urang, Jang kabehan) dan pemilik Pasar Induk Caringin, Ketua Koperasi Pasar Induk Caringin, serta jajaran pengurus. Saat dialog berlangsung, Ledia menyerap berbagai jenis aspirasi, mulai dari perkembangan pasar, situasi perdagangan, dan penerapan kebiasaan baru selama masa Covid-19.

● ts/es

# Eko Hendro Purnomo: Sumbangsih Pengungsi Korban Kebakaran di Pulogadung

Anggota DPR RI Eko Hendro Purnomo menyumbang para pengungsi korban kebakaran di Jalan Perintis Kemerdekaan RT 008/RW 01, Pulogadung Jakarta Timur.

**H**adir bersama pengurus DPW PAN Jakarta lainnya, Eko menyerahkan bantuan berupa uang tunai, bantal guling dan paket sembako. “Dari 75 Keluarga yang terkena dampak akan kami *support* berupa uang tunai, sembako, alat mandi dan

sebagainya,” kata Eko Patrio.

Politisi Fraksi PAN ini juga berjanji untuk mengusahakan berkaitan perpanjangan waktu mengungsi para korban kebakaran. Supaya masyarakat yang mengungsi memiliki cukup waktu untuk mencari tempat tinggal yang baru.

“Terkait batas waktu 5x24 Jam

yang diberikan, nanti saya akan berkoordinasi dengan Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta agar bisa diperpanjang. Supaya mereka punya banyak waktu mencari tempat tinggal baru,” ujar wakil rakyat dapil DKI Jakarta I itu.

Kebakaran yang melanda sedikitnya 50 rumah petak di wilayah tersebut terjadi pada Rabu (17/3/2021) menyebabkan 75 Keluarga dan 179 Jiwa dterdampak mengungsi.

Diketahui, kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk kawasan Jalan Perintis Kemerdekaan, Pulo Gadung, Jakarta Timur. Kasie Ops Sudin Damkar Jakarta Timur Gatot Sulaiman menyampaikan, peristiwa itu disebabkan korsleting listrik.

“Korsleting listrik di salah satu kamar kontrakan,” tutur Gatot dalam keterangannya, Kamis (18/3/2021). Akibatnya, kontrakan 50 pintu milik warga atas nama Darsiman ludes terbakar. Selain itu, ada pula enam rumah yang terdampak hingga 10 unit motor dilalap si jago merah. ● rdn/es



Anggota DPR RI Eko Hendro Purnomo menyalurkan bantuan bagi korban kebakaran di Pulogadung Jakarta Timur. Foto: Ist/ivi



## Achmad Baidowi: Dukung **Kemajuan Industri UKM** di Madura



Anggota DPR RI Achmad Baidowi mengunjungi UKM Kacang Sangrai di Kabupaten Pamekasan. Foto: Ist/nvl

Industri Usaha Kecil Menengah (UKM) yang dikelola masyarakat terutama di pedesaan perlu mendapat pembinaan dan dukungan agar mampu bersaing dengan yang berskala lebih besar.

**A**nggota Komisi DPR RI Achmad Baidowi atau yang kerap disapa Awiek memberi dukungan dengan mengunjungi UKM Kacang Sangrai yang bertempat di Dusun Sek Gersek, Desa Palengaan Laok, Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Madura.

Awiek yang merupakan Anggota Komisi VI DPR RI menjelaskan, sudah

saatnya bagi UKM di Madura untuk mampu bersaing dengan UKM dari luar Madura bahkan harus mampu bersaing dengan produk industri berskala besar.

“Produk kacang sangrai Dua Putri sejatinya adalah produk yang dibina oleh Komunitas anak muda yang ada di Desa Palengaan Laok, yaitu Komunitas Watowwah Ajem,” ujar politisi asal Dapil Jawa Timur XI itu.

Zaifi, pemilik dari usaha kacang sangrai Dua Putri mengaku bahwa sampai sejauh ini permintaan pasar semakin hari semakin meningkat, dan yang paling banyak permintaan dari Karangpenang Sampang.

Zaifi berterima kasih atas dukungan dan arahan Awiek dalam pengembangan Usaha Kecil Menengah. Ia bertekad untuk terus meningkatkan kualitas produknya hingga nantinya bisa bersaing dengan industri berskala besar. • hal/es

# Irene Sukandar

## Sukses di Catur, Lancar di Akademik

Irene Kharisman Sukandar, begitu nama lengkapnya. Wajahnya kalem, pembawaannya tenang, namun begitu menjalankan bidak catur langkahnya kerap membuat ciut lawan.

melawan orang-orang pasar yang notabene berusia di atasnya. Dengan segala kondisi seperti itu Irene harus tetap konsentrasi. Ayahnya pun tak segan memberikan sejumlah uang bagi mereka yang berhasil mengalahkan Irene dan Kaiser.

“Ini salah satu penggemblengan yang papa lakukan untuk saya dan kakak supaya mental kita lebih kuat lagi, karena otomatis kita akan bermain dengan banyak orang yang jauh lebih tua di atas kita,” lanjutnya Irene.

Di sekolah catur, Irene mencoba tantangan baru dengan cara bertarung di sektor putra. Di sini pun ia berhasil melumpuhkan langkah sang lawan. Hingga singkat cerita ia berhasil masuk dalam peringkat 10 besar pecatur Indonesia. Ia pun meraih gelar Master Nasional Wanita termuda di Indonesia.

Saat masih duduk di SMP, Irene mendapat gelar Master dari Federasi Catur Dunia (FIDE) setelah memenangkan olimpiade Catur di Malorca, Spanyol. Kemudian di tahun 2008, dirinya berhasil meraih gelar Grand Master International Woman

Irene Kharisman Sukandar. Foto: Ist

**A**walnya, Tenis Meja merupakan olahraga yang ditekuni Irene. Maklum sang ayah, Singgih Yehezkiel merupakan atlet cabang olahraga tenis meja. Tak berlebihan jika sang ayah berharap anak keduanya bisa mengikuti jejaknya. Palsalnya kakak Irene, Kaiser Jenius Hakiki sudah lebih dulu memilih catur sebagai olahraga favoritnya.

Namun saking seringnya Irene melihat sang kakak berlatih catur, maka timbul ketertarikan dalam dirinya untuk berubah haluan mendalami olahraga catur.

Sang ayah pun akhirnya luluh dan

mengamini keinginan Irene untuk menekuni olahraga catur. Irene pun bergabung dalam sekolah catur Utut Adiando di Bekasi. Keseriusan Irene dalam berlatih catur dari Senin hingga Jumat selama tiga hingga empat jam per hari akhirnya membuahkan hasil. Ia termasuk salah satu murid yang cukup diperhitungkan di sekolah catur tersebut. Bahkan untuk pertama kalinya ia berhasil menjadi juara pertama di sekolah catur saat masih duduk di Kelas IV SD.

Masih diingatnya sang ayah kerap membawa Irene dan kakaknya dari satu pasar ke pasar lainnya untuk melatih mentalnya menjadi seorang pecatur profesional. Irene harus bertanding



Irene Sukandar bersama Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Foto: Ist

(GMIW). Gelar tersebut secara langsung menempatkan Irene menjadi orang pertama di Indonesia yang berhasil meraih gelar GMIW, sekaligus wanita Indonesia pertama yang berhasil meraih gelar Grand Master.

Atas prestasinya, Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI) memintanya untuk bergabung dalam Tim Nasional Catur Indonesia. Irene pun sempat memperkuat Kontingen Indonesia di ajang SEA GAMES di Vietnam. Di ajang tersebut, ia berhasil menyumbangkan dua medali perak bagi Indonesia. Bahkan Irene menjadi atlet termuda dari semua cabang olahraga.

Di tahun 2014 setelah berjuang selama kurang lebih enam tahun Irene pun akhirnya berhasil mendapat gelar IM (Internasional master), gelar bagi pecatur laki-laki yang sudah mencapai ELO 2400. Puncaknya, ketika Irene berhasil raih gelar Grand Master Internasional.

#### **CATUR JADI SANDARAN HIDUP**

Melalui kanal Youtube-nya, Irene sempat menjelaskan bahwa melalui catur setiap orang bisa berprestasi,

memperoleh penghargaan, menempuh pendidikan setinggi-tingginya, hingga mendapat pekerjaan. Hal itu sekaligus menampik anggapan orang bahwa catur tidak bisa untuk hidup.

“Saya pribadi bisa bilang catur ini ada uangnya. Sebagai pemain profesional misalnya, saya sekarang di pelatnas, digaji oleh negara. Bahkan ketika saya bermain di sebuah kejuaraan di luar negeri pun saya mendapat fee atau uang yang diberikan sebelum bermain. Bahkan karena catur juga saya mendapat beasiswa penuh baik saat S1 di Universitas Gunadarma, maupun S2 saya di Webster, USA. Dan tidak sedikit teman-teman atlet yang bisa mendapat pekerjaan cukup baik, dari instansi negeri maupun swasta,” jelas Wanita Kelahiran Jakarta, 7 April 1992 ini.

Ya, putri kedua dari tiga bersaudara pasangan Singgih Yehezkiel dan Cici Ratna Mulya ini memang termasuk atlet yang juga mengutamakan pendidikan akademis. Sukses sebagai atlet tak menghalangi langkah Irene untuk meraih gelar akademik. Bahkan Irene ini berhasil menyelesaikan Program S2 nya di Amerika serikat

“Kami sering cuti sekolah karena

banyak latihan atau turnamen-turnamen, ini biasa terjadi di dunia atlet, tapi buat saya dari kecil edukasi itu salah satu hal yang penting, jadi enggak pernah saya tinggalkan. Bahkan ketika saya sudah menjadi pecatur profesional pun saya tetap mengedepankan akademik,” ucap Irene.

Dijelaskannya, sebagai atlet, membela nama negara merupakan sebuah kebanggaan dan kehormatan, namun tidak bisa dipungkiri masalah kesejahteraan atlet harus juga dipikirkan. Terutama ketika sudah memasuki masa pensiun. Oleh karena itu ia merasa harus bisa mempersiapkan sendiri hari tuanya, salah satunya lewat jalur pendidikan.

Ini yang ingin ia buktikan ke masyarakat luas, seorang atlet itu juga bisa menjadi seorang akademisi. Pengalaman yang dialaminya ini bisa menjadi inspirasi bagi anak muda lainnya, bahkan para juniornya untuk berprestasi dalam olahraga namun juga tetap mengutamakan pendidikan. Bahkan ia juga memberikan motivasi kepada para perempuan untuk tidak takut berkarier di dunia olahraga catur seperti dirinya.

“Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi para pecatur putri untuk berpikir bahwa mereka bisa. Dunia catur bisa menjadi karier yang menjanjikan bagi banyak perempuan, apabila dijalani dengan ketekunan dan proses pembelajaran yang benar. Catur mungkin tidak seperti olahraga entertaining lainnya, seperti sepak bola atau bulu tangkis, tetapi catur ini juga menjanjikan untuk finansial, jika memang ditekuni dengan benar dan profesional,”pungkasnya.

Jika tidak ada aral melintang 12-13 Juni 2021 mendatang Irene bersama PB Percasi dan Kementerian Pemuda dan Olahraga akan menggelar turnamen catur nasional Indonesia Master memperebutkan Piala Ketua MPR RI di Gedung Nusantara V Komplek DPR/MPR, Senayan Jakarta.

● ayu/es

# Asesmen Ukur Kompetensi ASN untuk Promosi dan Mutasi

Biro Kepegawaian dan Organisasi Setjen DPR RI yang kini berganti nama menjadi Biro Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) menggelar kegiatan asesmen bagi para ASN dilingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI secara daring.

**K**epala Biro SDMA Setjen DPR RI Rahmad Budiaji menyampaikan, kegiatan asesmen pejabat fungsional dan pelaksana yang dilakukan dengan metode daring/virtual di lingkungan Setjen DPR RI ini penting dilaksanakan dalam rangka pemetaan talenta pegawai sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara.

Pria yang akrab disapa Aji itu menerangkan, sebelum mengikuti asesmen, para peserta diwajibkan mengikuti sosialisasi tata cara pelaksanaannya. Seluruh peserta dibagi menjadi 6 kelompok. Mengingat pelaksanaan asesmen pejabat fungsional dan pelaksana ini sendiri bersifat wajib, maka apabila terdapat kendala jadwal,

peserta dapat menghubungi pelayanan informasi untuk dilakukan penjadwalan ulang sesuai rumpun jabatan dan pertimbangan jumlah maksimal peserta asesmen dalam satu kelompok.

“Terkait pelaksanaan asesmen ini, kita sedang dalam perubahan, yang saya pikir tidak pernah berhenti untuk selalu berubah menjadi lebih baik. Organisasi sudah berubah, nomenklatur juga sudah berubah sesuai dengan Peraturan Sekjen Nomor 6 Tahun 2021 dimana Biro Kepegawaian dan Organisasi berubah menjadi Biro Sumber Daya Manusia Aparatur,” ucap Aji. Ia menjelaskan, maksud dan tujuan dilakukannya asesmen ini

adalah untuk mendukung penerapan merit sistem sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN maupun PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Dikatakannya, aturan tersebut sudah dijabarkan dalam PermenPAN Nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur tentang Manajemen Talenta ASN. Demikian juga BKN sudah menindaklanjuti, khususnya untuk pelaksanaan asesmen dengan peraturan DKM Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi PNS.

“Kami menyadari bahwa untuk melakukan seleksi maupun pembinaan dibutuhkan sumber data awal PNS, mulai dari rekrutmen dan syarat kualifikasi untuk bisa duduk dalam jabatan yang sekarang. Dikarenakan kita sudah masuk menjadi pegawai, maka asesmen ini kita lakukan dalam rangka menilai kompetensi PNS untuk penempatan dan pengembangan serta promosi mutasi. Kami akan menggunakan tiga indikator, yakni kualifikasi, kinerja, dan kompetensi,” paparnya.

Aji menegaskan, masing-masing PNS dituntut komitmennya, baik di jabatan fungsional maupun di jabatan pelaksana. “Kami akan melihat tiga hal tersebut untuk pengembangan karir maupun untuk penempatan yang bersangkutan, serta kesempatan dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan,” tandasnya.

Bagi jabatan fungsional, tambah Aji, jangan berasumsi bahwa untuk naik jenjang karir semata-mata dari angka kredit. Karena di jabatan fungsional pun ada formasi jabatan yang semakin tinggi keatasnya dia akan mengerucut semakin sedikit. Sehingga apabila bersaing, tidak hanya dinilai dari



Kepala Biro SDMA Setjen DPR RI Rahmad Budiaji. Foto: Gerald/mv

jumlah angka kredit yang sudah dicapai semata, tetapi dilihat juga dari kompetensi. Apalagi di saat yang bersamaan harus dilakukan promosi tetapi jumlah formasinya lebih sedikit. “Kami harus selektif dan menilainya berdasarkan kinerja dan kompetensi yang dihasilkan dari asesmen yang diikuti,” ujarnya.

Asesmen ini harus diikuti secara sungguh-sungguh, karena nasib karir PNS ke depan akan ditentukan oleh hasil dari asesmen yang sudah dijadwalkan. “Prioritaskan kegiatan ini dengan menjaga kesehatan, konsentrasi, dan semua tahapan diikuti dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak memiliki data asesmen maka kami tidak bisa memasukkan PNS yang bersangkutan dalam rancang bangun talenta yang ada di Sekretariat Jenderal DPR RI, untuk usulan kenaikan jenjang jabatan atau penempatan di formasi yang lain,” tuturnya.

Ia mengungkapkan, tahun sebelumnya kegiatan asesmen sebenarnya sudah dimulai, tetapi karena tantangan di pengelolaan yang terbatas maka tidak bisa dilakukan secara sekaligus. “Jadi diantara teman-teman kita sudah ada yang melalui asesmen pada periode yang lalu, dan yang lain kebagian di tahun ini. Prioritas itu juga kami susun dengan melihat peluang waktu kapan para PNS itu bisa diberikan kenaikan jenjang jabatannya maupun promosi jabatan,” kata Aji.

Ia berharap para PNS di dalam pengalaman jabatannya selalu mencoba untuk memunculkan kreatifitas perubahan yang sifatnya memperbaiki kinerja dan capaian. Aji menyatakan, asesmen ini nantinya juga akan bisa digunakan untuk menilai siapa yang masih mempunyai potensi untuk dikembangkan, dan siapa yang masih membutuhkan pembinaan di pelaksanaan capaian kinerja.

“Untuk promosi dan pengembangan, bukan urut kacang, istilahnya. Siapa yang senior dia dapat duluan, tidak. Tetapi harus dilihat dari tiga aspek tadi, yaitu kualifikasi, kinerja dan kompetensi.

## TERKAIT PELAKSANAAN ASESMEN INI, KITA SEDANG DALAM PERUBAHAN, YANG SAYA PIKIR TIDAK PERNAH BERHENTI UNTUK SELALU BERUBAH MENJADI LEBIH BAIK

Rahmad Budiaji. Foto: Geraldi/rvi



Apabila ada kendala dalam mengikuti asesmen karena ada penugasan dari unit kerja atau atasan, maka tolong disampaikan untuk diberikan kesempatan lebih dahulu mengikuti asesmen ini secara tuntas agar maksimal hasilnya,” imbuh Aji.

Penting disadari bahwa sejak hari ini dan kedepan, apa yang dilakukan bukanlah sekedar asesmen asal-asalan. Karena dari asesmen tahun lalu, hasilnya sudah digunakan dalam hal penilaian.

“Kompetensi PNS ini akan diolah oleh PPSDM ke dalam sembilan kotak kompetensi dan potensinya. Posisi yang kotak sembilan artinya start dan sudah bisa diberikan amanat tanggungjawab yang lebih tinggi. Sedangkan yang berada di kotak 8 dan 7 mungkin masih butuh pengembangan melalui tenaga pendidikan atau pengalaman jabatan. Demikian juga yang ada di kotak 6 dan 5,” jelasnya.

Bagi mereka yang ada dikotak 4, 3,2 atau 1, sambung Aji, mereka harus di-*manage* agar nantinya dapat memberikan sumbangan yang positif

bagi organisasi. PNS yang bersangkutan harus mempunyai motivasi untuk melaksanakan tugas jabatannya. Hasilnya para PNS akan mendapat *feedback* dari pihak PPSDM.

“Kami terbuka dari tahun kemarin, bahwa asesmen hasil tahun yang lalu hasilnya seperti apa, dan rekomendasinya seperti apa, semua bisa dilihat di Portal masing-masing. Ini manajemen SDM yang mengarah kepada merit sistem, kita akan membentuk manajemen talenta di Setjen DPR RI. Bagi yang sudah mengetahui bahwa ia ada di kotak 9, 8, atau 7, kami mencoba untuk *manage*, kita punya ikatan yang kuat dalam menyiapkan diri sebagai pemimpin-pemimpin masa depan,” tukasnya.

Aji mengatakan, jangan berpikir bahwa untuk menjadi pemimpin itu hanya dari pejabat struktural karirnya. “Kita sudah terbuka, dari struktural bisa ke fungsional, demikian juga dari fungsional bisa ke struktural. Karena dalam UU ASN, PP Nomor 11 Tahun 2017 disebutkan, setiap jabatan mengandung tiga unsur kompetensi, yaitu kompetensi managerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosio-kultural. Sehingga disana sudah ada karakter dan profil. Tinggal bisa atau tidak PNS yang bersangkutan mendapatkan penugasan-penugasan di jabatan struktural,” ujarnya.

Walaupun semangat arahan Presiden dalam reformasi birokrasi secara nasional akan dilakukan penyederhanaan birokrasi, sehingga eselon III dan IV didorong untuk ikut penyederhanaan menjadi jabatan fungsional. Tetapi tidak menghilangkan peluang PNS yang berkarir di fungsional, bila memenuhi kualifikasi kompetensi dan kinerja. Ia bisa ikut berkompetisi mendaftar dalam lelang jabatan pimpinan tinggi.

“Inilah yang menjadi pegangan dan komitmen kita bersama dalam menyelenggarakan asesmen ini ke depan dan pemanfaatan hasilnya,” pungkasnya. ● dep/es



# Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC)

*Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC)* merupakan Organisasi Parlemen Negara-Negara OKI yang berdiri sejak 17 Juni 1999. PUIC bermarkas di Teheran, Republik Islam Iran, yang diresmikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Islam Republik Islam Iran yang juga sebagai Presiden Konferensi PUIC pada saat itu Sheikh Mahdi Karroubi.



Saat ini, ada 54 Parlemen yang tergabung dalam keanggotaan PUIC, dan 21 *observer* dari

organisasi parlemen regional dan internasional. Keanggotaannya walaupun terdiri dari parlemen negara OKI, namun tidak membatasi keanggotaan dari organisasi parlemen regional maupun internasional, yang dapat hadir di konferensi PUIC sebagai *observer* atas rekomendasi *Executive Committee* dan atas persetujuan konverensi.

Bahasa resmi yang dipakai di organisasi ini adalah Arab, Inggris, dan Perancis. Anggota PUIC diwajibkan membayar kontribusi tahunan sesuai dengan skala penilaian dengan memperhitungkan skala kontribusi di OKI (saat ini skalanya adalah 10 persen dari iuran pemerintah di OKI).

Status *observer* di PUIC adalah terbuka, atas permintaan parlemen anggota OKI, organisasi regional maupun internasional, yang mengutarakan kesediaannya

untuk memberikan masukan yang berguna bagi kinerja PUIC. Parlemen dari negara dengan status *observer* di OKI dapat pula hadir di konferensi PUIC sebagai *observer*. *Observer* mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat namun tidak mempunyai hak pilih. Status *observer* dapat memberikan, dihentikan sementara atau diakhiri oleh

forum konperensi sesuai dengan Statuta PUIC.

Statuta PUIC diadopsi pada saat konperensi pembentukan yang berlangsung di Teheran pada tanggal 15-17 Juni 1999, atau 1-3 Rabiul Awal 1420 H. Tujuan pendirian organisasi ini seperti tercantum dalam Statuta adalah:

Mengenalkan dan menyebarkan agama Islam yang mulia dengan kesadaran adanya perbedaan aspek dari peradaban Islam itu sendiri;

Meningkatkan dan mendukung pelaksanaan syariah Islam di seluruh negara anggota OKI, berdasarkan Konstitusi dan kondisi setiap negara anggotanya;

Memberikan kerangka kerja untuk adanya kerja sama yang komprehensif dan berdayaguna



Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-15 di Parlemen Burkina Faso. Foto: ist/nvl



dan koordinasi antara forum dan organisasi internasional;

Memajukan pertemuan dan dialog antar anggota parlemen dan parlemen negara OKI, pertukaran pengalaman keparlemenan, pembahasan masalah ekonomi, budaya, sosial, dan politik yang menjadi kepentingan negara OKI, dan menjawab tantangan dan upaya-upaya dominasi budaya, politik dan ekonomi, dan mengadopsi rekomendasi dan keputusan untuk masalah-masalah tersebut;

Memperkuat kontak, kerjasama, dan koordinasi dengan organisasi parlemen, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah, dengan tujuan untuk memajukan tujuan bersama;

Memperkuat koordinasi antar bangsa di dunia untuk penghormatan dan pembelaan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kemanusiaan dan menciptakan perdamaian berdasarkan keadilan.

Badan PUIC terdiri dari Konferensi, Council/ General Committee, Executive Committee dan Sekretariat. Kepesertaan Parlemen Indonesia (DPR RI) dalam PUIC sangatlah aktif, dimana pada 23 – 31 Januari 2011, Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Sidang PUIC ke-7 di Kota Palembang. Dan pada Sidang PUIC yang berlangsung di Kampala, Uganda, 24 – 31 Januari 2010, Ketua DPR RI Marzuki Alie saat itu terpilih sebagai *President of PUIC Conference* hingga tahun 2012.

**BANGKITKAN OPTIMITISME NEGARA MUSLIM DI FORUM PUIC**

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin membangkitkan semangat parlemen-parlemen negara muslim yang tergabung dalam forum PUIC untuk selalu bersikap optimis dalam menyikapi berbagai isu yang bersinggungan



Delegasi DPR RI saat mengikuti konferensi PUIC ke-15 di Parlemen Burkina Faso. Foto: Ist/mtf

dengan umat muslim di sejumlah negara.

Adapun yang terjadi saat ini, keprihatinan mendalam juga masih dirasakan masyarakat Muslim global seperti yang terjadi di Palestina dan Uyghur, terutama masalah pengungsi yang menjadi masalah besar dunia Islam.

Lebih dari tujuh dekade penindasan bangsa Palestina pun juga belum menunjukkan penyelesaian yang positif. Bahkan, pemenuhan hak-hak dasar bangsa Palestina semakin jauh dari yang diharapkan.

“Dalam konteks tersebut, diperlukan tindakan paling keras oleh masyarakat global atas Israel untuk mematuhi dan tunduk kepada norma dan hukum internasional terkait. Jika diperlukan, Israel harus ditekan secara politik, ekonomi, dan sosial,” tutur Azis Syamsuddin saat menghadiri konferensi PUIC ke-15 di Parlemen Burkina Faso, awal Tahun 2020 lalu.

Sementara terkait Muslim etnis minoritas Uyghur di Xinjiang, Azis pun mengapresiasi kepada anggota PUIC atas adopsi draf resolusi usulan Parlemen Indonesia terkait Muslim Uyghur tahun lalu di Rabat Maroko. Resolusi tersebut menolak keras dugaan pelanggaran HAM oleh Pemerintah China yang ditengarai menahan

sekitar satu juta Muslim Uyghur secara ilegal.

“Yang paling penting juga implementasi dari resolusi tersebut, yaitu pembentukan Komisi Pencari Fakta PUIC untuk secara langsung berkunjung ke Xinjiang guna menggali informasi secara obyektif dan berimbang,” sambungnya.

Kendati situasi Muslim global masih sangat memprihatinkan, Azis menegaskan bahwa negara muslim tetap harus terus menumbuhkan optimisme dan harapan. Melalui wadah PUIC, parlemen-parlemen negara Muslim harus memainkan peran besar memajukan masyarakat Muslim dunia melalui implementasi semua keputusan PUIC termasuk resolusi-resolusinya.

“Saya mengajak anggota PUIC memanfaatkan pertemuan di Burkina Faso ini sebagai momentum parlemen negara-negara Muslim untuk terus menyalakan optimisme dan harapan, mengokohkan persepsi bahwa rekonsiliasi damai adalah kunci,” tutup Azis. ● skr/es

Sumber:

<http://ksap.dpr.go.id/dokumen/index/id/9>

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/27481/t/javascript>



# Apa Yang Harus Dilakukan Setelah Positif Covid-19

Oleh: **dr. Dian Handayani**  
Kepala Bagian Pelayanan Kesehatan

## KRITERIA PASIEN POSITIF VIRUS CORONA DINYATAKAN SEMBUH

Pada 17 Juni 2020 WHO mengubah panduan tentang isolasi pasien Covid-19. Sebelumnya, pasien dinyatakan sembuh dan boleh keluar dari isolasi saat tes *Polymerase Chain Reaction* (PCR) menunjukkan hasil negatif sebanyak dua kali. WHO mengubah kriteria selesai isolasi, yaitu berdasarkan gejala klinis pada pasien, tanpa harus menunggu hasil tes PCR negatif sebanyak dua kali.

Kriteria yang telah diperbarui oleh WHO berdasarkan temuan terbaru bahwa ada pasien yang sudah menunjukkan kesembuhan (tidak menunjukkan gejala sakit), tetapi tes PCR-nya masih bisa positif Covid-19 selama beberapa minggu. Meski hasilnya masih positif, kemungkinan pasien-pasien ini tidak lagi infeksi atau tidak bisa menularkan virus corona ke orang lain. Namun, untuk lebih amannya, tes PCR masih digunakan pada beberapa kasus. Berikut adalah kriteria sembuh bagi pasien positif Covid-19 yang berlaku di Indonesia:

KRITERIA PASIEN	KRITERIA SEMBUH
Tanpa gejala	Telah melewati isolasi selama 10 hari
Gejala ringan hingga sedang	Telah melewati isolasi selama minimal 10 hari, ditambah 3 hari tanpa gejala
Gejala berat	Telah melewati isolasi selama minimal 10 hari, ditambah 3 hari tanpa gejala dan 1 kali hasil negatif pada tes PCR.
Gejala lebih dari 10 hari	Harus melewati isolasi selama gejala Covid-19 masih ada, ditambah 3 hari tanpa gejala, Misalnya: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pasien merasakan gejala selama 14 hari, maka ia harus melewati masa isolasi selama 14 hari + 3 hari tanpa gejala = 17 hari terhitung sejak gejalanya muncul.</li> <li>Pasien merasakan gejala selama 30 hari, maka ia harus melewati masa isolasi selama 30 hari + 3 hari tanpa gejala = 33 hari terhitung sejak gejalanya muncul.</li> </ul>

**P**erubahan ini dibuat karena tes PCR dengan hasil positif tidak selalu menandakan virus Corona di tubuh pasien masih aktif. Bisa saja tes PCR tersebut mendeteksi virus yang sudah mati, karena sistem kekebalan tubuh sudah mampu mengendalikannya.

Antibodi atau kekebalan tubuh terhadap virus Corona biasanya terbentuk 5–10 hari setelah terinfeksi. Ini artinya, risiko penularan dari pasien yang sudah selesai menjalani isolasi selama minimal 10 hari akan sangat kecil, meskipun hasil tes PCR-nya masih positif.

Meski demikian, bila setelah isolasi pasien tersebut akan bertemu orang-orang dari kelompok yang rentan tertular virus Corona dan mengalami gejala yang berat, seperti lansia atau orang dengan penyakit penyerta, lebih baik ia tetap melakukan tes PCR dan menunggu hingga hasilnya negatif.

Selain itu, kesembuhan tetap harus ditentukan berdasarkan penilaian dokter yang menangani. Jika pasien sudah memenuhi kriteria sembuh seperti yang sudah dijelaskan di atas, baru ia bisa keluar dari isolasi dan kembali berinteraksi dengan orang lain, tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

## HAL YANG PERLU DILAKUKAN USAI SEMBUH DARI CORONA

Sebagian besar penderita Covid-19 akan sembuh total dalam beberapa minggu setelah pertama kali ia merasakan gejala. Kendati demikian, ada juga penderita Covid-19 yang masih mengalami gejala selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan setelah ia dinyatakan sembuh dari Corona.

Umumnya, orang yang sudah sembuh dari Covid-19 tetapi masih merasakan gejala lanjutan adalah orang lanjut usia dan orang yang memiliki kondisi medis tertentu. Ada juga orang muda tanpa penyakit penyerta yang sudah sembuh

dari infeksi Covid-19, tetapi masih mengalami gejala jangka panjang (post-acute Covid-19 syndrome). Penderita Covid-19 yang sudah sembuh tetapi masih mengalami gejala sakit, disarankan memeriksakan diri ke dokter agar mendapatkan penanganan yang sesuai.

Gejala yang juga disebut long-haul Covid-19 ini antara lain:

- Napas berat/Sesak napas
- Batuk
- Mudah Lelah, lemas
- Nyeri otot, nyeri sendi
- Nyeri dada
- Sakit kepala
- Jantung berdebar kencang
- Ketidakpekaan indra penciuman (anosmia) dan indra perasa
- Sulit berkonsentrasi
- Sulit tidur
- Ruam

Menurut penelitian, orang yang sembuh dari Covid-19 memiliki kekebalan tubuh terhadap virus Corona selama 8 bulan atau lebih, hal ini dapat mencegah terinfeksi kembali oleh virus Covid-19 dalam jangka waktu tersebut, akan tetapi ada beberapa orang yang terinfeksi kembali sebelum 8 bulan.

Secara umum, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh orang yang sudah sembuh dari Corona untuk memaksimalkan pemulihan, di antaranya:

### 1. Selalu Taati Protokol Kesehatan

Meski telah negatif Covid-19, tetap lindungi diri. Infeksi Covid-19 bisa berulang. Sembuh dari infeksi Covid-19, bukan berarti tubuh akan kebal dari infeksi virus corona. Tetap taati protokol kesehatan, untuk mencegah terulangnya infeksi Covid-19, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, menjaga jarak dengan orang lain, dan mengurangi mobilitas di luar rumah. Protokol Kesehatan ini harus ditaati oleh seluruh orang yang tinggal dalam satu rumah. Jangan ragu untuk menegur

orang yang tidak menaati protokol kesehatan.

Virus corona bisa menyebar dengan cepat jika kita dan orang sekitar kita tidak disiplin.

### 2. Olahraga secara Rutin dan Melakukan latihan pernapasan

Tetap disarankan olahraga secara rutin minimal 3 kali dalam satu pekan untuk menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh.

Olahraga yang disarankan untuk orang yang sembuh dari infeksi Covid-19, bukan olahraga yang berat, dan harus dipastikan keamanannya. Hindari olahraga di tempat ramai, serta atur sistem pernapasan agar tidak mudah lelah dan ngos-ngosan. Berikan waktu pemulihan setelah sembuh dari Covid-19 untuk tubuh Anda.

### 3. Menerapkan pola hidup sehat, yaitu

- a. Mengonsumsi makanan bergizi seimbang
- b. Tidak merokok dan menghindari asap rokok
- c. Tidak mengonsumsi minuman beralkohol
- d. Menjaga kualitas tidur

### 4. Lebih banyak duduk dengan posisi tegak dibandingkan berbaring

### 5. Memeriksa detak jantung dan kadar oksigen secara berkala

### 6. Tracing di Dalam Rumah

Bila pernah terinfeksi Covid-19, ada baiknya melakukan tracing seisi rumah. Bisa jadi ada anggota keluarga yang mungkin tidak bergejala, tapi positif Covid-19 (OTG). Jika ada anggota keluarga yang OTG, hal ini bisa kembali menularkan ke kita.

### 7. Mencari tahu penyebab terinfeksi Covid-19 dan memperbaikinya

Jika sudah dinyatakan negatif dari virus corona, menanyakan pada diri sendiri, apa yang menjadi penyebab bisa terinfeksi Covid-19. Apakah hal ini disebabkan oleh perilaku kita yang tidak mematuhi protokol kesehatan, misalnya sering berkerumun, tidak menjaga jarak dengan orang lain, tanpa memakai

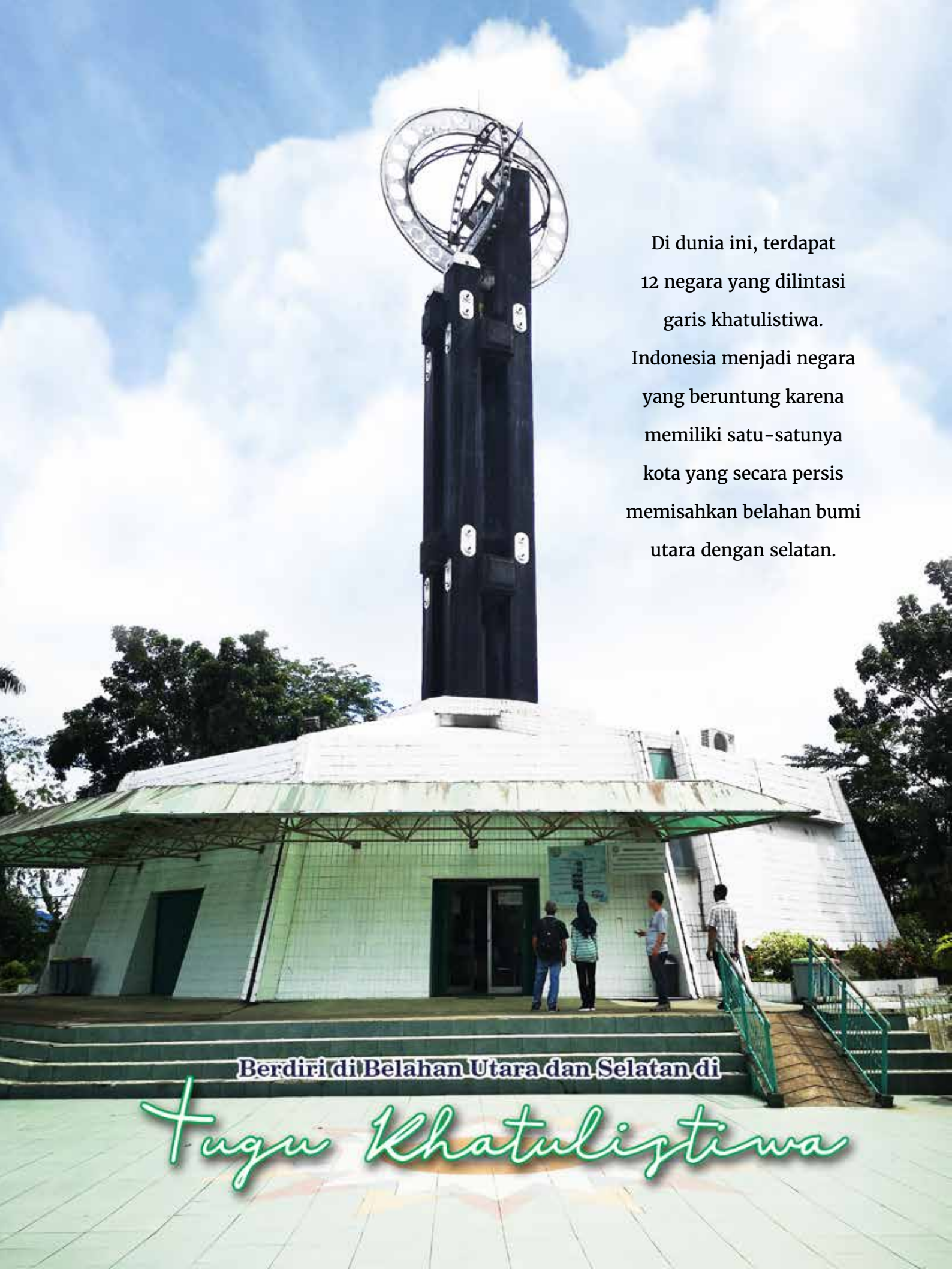
masker, atau mungkin jarang cuci tangan.

Apa yang harus kita lakukan, jika orang dekat kita menyandang penyintas Covid-19

1. Jika kerabat atau keluarga terdekat baru saja sembuh dari Covid-19, hal yang perlu diperhatikan sebelum kembali berinteraksi, antara lain:
  - Pastikan penderita Covid-19 telah melakukan karantina mandiri di ruang yang terpisah dengan keluarga lainnya
  - Tetap gunakan masker selama berada dalam satu rumah dengan para penyintas Covid-19 (selama masa karantina mandiri).
  - Pisahkan alat-alat pribadi, misalnya tempat makan, handuk, alat sholat dengan penyintas Covid-19 sampai masa karantina mandiri berakhir.
  - Terapkan gaya hidup sehat, seperti olahraga, mengonsumsi makanan yang bergizi, cukup tidur
  - Pastikan kita juga berada dalam kondisi yang sehat. agar tidak menularkan virus penyakit lainnya ke penyintas Covid-19
2. Jika kondisi penderita Covid-19 telah stabil dan tidak mengalami gejala setelah masa karantina, ditambah 3 hari, barulah bisa kembali berinteraksi langsung dengan orang lain.
3. Selalu menerapkan protokol kesehatan di mana pun kita berada.

### DONOR PLASMA DARAH

- Orang yang sudah sembuh dari Covid-19, atau disebut juga penyintas Covid-19, bisa mendonorkan plasma darahnya kepada penderita Covid-19 yang masih sakit, terutama dengan gejala yang berat.
- Hal ini karena plasma darah mereka mengandung antibodi yang bisa melawan virus Corona.
- Pendonoran plasma darah disebut juga sebagai terapi plasma konvalesen, yang dilakukan dengan tujuan mencegah bertambah parahnya gejala dan mempercepat proses penyembuhan pasien Covid-19 yang masih sakit. ●



Di dunia ini, terdapat 12 negara yang dilintasi garis khatulistiwa. Indonesia menjadi negara yang beruntung karena memiliki satu-satunya kota yang secara persis memisahkan belahan bumi utara dengan selatan.

Berdiri di Belahan Utara dan Selatan di

*Tugu Khatulistiwa*

**K**ota Pontianak memiliki ikon wisata yang layak dikunjungi wisatawan. Ikon tersebut bernama Tugu Khatulistiwa atau *Equator Monument* yang berada di jalan Khatulistiwa, Pontianak Utara, Provinsi Kalimantan Barat atau sekitar 3 km dari pusat Kota Pontianak, ke arah kota Mempawah.

Di sinilah terletak garis lintang nol derajat bumi, garis yang tepat membelah bumi bagian selatan dan bagian utara.

Menariknya lagi di sini adalah setiap tanggal 21-23 Maret dan 21-23 September, Tugu Khatulistiwa menjadi lokasi Hari Kulminasi Matahari. Titik kulminasi merupakan titik di mana matahari tepat berada di atas garis khatulistiwa. Saat fenomena alam ini berlangsung, bayangan tugu akan 'menghilang' selama beberapa detik meskipun diterpa sinar matahari.

Demikian juga dengan bayangan benda-benda lainnya di sekitar Tugu Khatulistiwa.

Ini menjadi tontonan sekaligus wisata mengasyikkan bagi warga Pontianak dan wisatawan lainnya. Tak sedikit dari pengunjung yang melihat bayangan mereka sendiri menghilang pada saat hari kulminasi ini.

Sejarah mengenai perjalanan pembangunan Tugu Khatulistiwa terbingkai rapi di salah satu etalase gedung museum Tugu Khatulistiwa.

Adapun isinya: berdasarkan catatan yang diperoleh pada tahun 1941 dari V. en. W oleh Opzichter Wiese dikutip dari *Bijdragen tot de geographie* dari Chef Van den topographischen dienst in Nederlandsch- Indië: Den 31 sten Maart 1928 telah datang di Pontianak satu ekspedisi internasional yang dipimpin oleh seorang ahli Geografi berkebangsaan Belanda untuk menentukan titik/tonggak garis equator di kota Pontianak dengan konstruksi sebagai berikut:

Tugu pertama dibangun tahun 1928 berbentuk tonggak dengan anak panah, dan



Tugu Khatulistiwa yang asli setelah penyempurnaan Tahun 1938. Foto: Erman/nvl

dengan ukuran asli sebagai berikut: bangunan tugu terdiri dari empat buah tonggak belian, masing-masing 0,30 meter, dengan ketinggian tonggak bagian depan sebanyak dua buah setinggi 3,05 meter dari permukaan tanah dan tonggak bagian belakang tempat lingkaran dan anak panah petunjuk arah setinggi 4,40 meter.

Pada tahun 1990, kembali Tugu Khatulistiwa tersebut direnovasi dengan pembuatan kubah untuk melindungi tugu asli serta pembuatan duplikat tugu dengan ukuran lima kali lebih besar dari tugu yang aslinya. Peresmian duplikat Tugu Khatulistiwa dan kubah pada tanggal 21 September 1991 oleh Gubernur Kalimantan Barat Parjoko Suryokusumo. ● es



Salah satu view di kompleks Tugu Khatulistiwa. Foto: Erman/nvl

## Ahmad Sahroni: Berharap Olahraga Sepeda Makin Digemari

Bersepeda menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat untuk berolahraga dalam rangka menjaga kesehatan dan kebugaran tubuhnya, terutama dalam masa pandemi ini. Tak hanya menyehatkan, kegiatan bersepeda juga menjadi kegiatan relaksasi bagi sebagian orang untuk melepas penat dari rutinitasnya.

**S**epeda bukanlah hal yang asing bagi Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Olahraga ini sudah digelutinya sejak lama, atau ketika sedang ramai-ramainya sepeda jenis Pixie. Hingga saat ini, meski dilanda pandemi Covid-19, Sahroni menjadi lebih giat bersepeda tentu saja dengan mematuhi protokol kesehatan seperti *social distancing*.

“Salah satu alasannya adalah aman untuk kondisi pandemi Covid-19, karena tidak di dalam ruangan, dan tidak kontak langsung dengan orang lain,” terang Sahroni dalam keterangan tertulisnya, baru-baru ini. Bersepeda juga dijadikan Sahroni sebagai sarana untuk memperkuat silaturahmi.

Di sela-sela kesibukannya sebagai wakil rakyat, Sahroni menyempatkan untuk bersepeda satu hingga dua kali dalam sepekan. Sedangkan rute yang dilalui pria asli Jakarta ini umumnya seperti di Jakarta Utara, daerah PIK (Pantai Indah Kapuk), atau di Senayan.

“Satu hal yang saya perhatikan juga bahwa semakin ke sini, rute bersepeda di Jakarta makin banyak dan bagus, hingga menyenangkan sekali bersepeda di ibu kota. Selain di Jakarta,

saya bersama komunitas sepeda yang saya bina juga aktif bersepeda ke daerah-daerah lain seperti Pulau Jawa, Bali, hingga Sumatera,” terang Anggota Badan Anggaran DPR RI.

Saat ini, politisi Fraksi Partai NasDem ini membina dua komunitas sepeda, yakni ASC (Ahmad Sahroni Center) Gowes dan ASC Cycling. Adapun ASC Gowes ini sifatnya lebih santai dan mewadahi siapa saja yang hobi bersepeda. Para anggotanya juga berasal dari lintas daerah, tidak hanya dari DKI Jakarta saja. Informasi mengenai ASC Gowes ini bisa dilihat langsung pada akun instagram @ascgowes yang menginformasikan serangkaian kegiatan dari ASC Gowes.

Sedangkan ASC Cycling, lebih berorientasi kepada pembinaan atlet, mulai dari pembinaan atlet muda hingga event kompetisi sepeda yang bertujuan untuk mengembangkan potensi para atlet sepeda Indonesia.

Sahroni berharap, hobi bersepeda yang sedang digemari di Indonesia ini bisa terus dikembangkan dan mendapat perhatian secara baik, agar dapat menciptakan atlet-atlet sepeda

baru yang berkualitas. “Kemudian harapan saya juga semakin banyak kompetisi-kompetisi sepeda yang bisat diikuti oleh siapa saja. Biasanya dari kompetisi tersebut, kita bisa menemukan atlet baru yang perlu mendapatkan binaan,” terangnya. ● hal/es



# Komisi VIII Panjatkan Doa Bagi Korban Bencana NTT

Buntut pernyataan kontroversi Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dalam Rakernas Kemenag beberapa waktu yang meminta agar doa dari seluruh agama dibacakan dan bukan hanya doa agama Islam, juga sampai ke Senayan.

**P**ada kesempatan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama, Anggota DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan Ina Ammania meminta Menag untuk memimpin doa bagi masyarakat NTT yang terkena musibah, namun Menag menolaknya.

"Alangkah baiknya kita berdoa, untuk saudara-saudara kita, ya kita turut bela sungkawa pada masyarakat yang ada di NTT, kebetulan yang ada di depan kita ini adalah ahli agama, jadi semoga keluarga yang ditinggalkan meninggal diterima

di sisi-Nya. Mohon Pak Menteri memimpin doa, jadi kita merasa adem bahwa NTT negara harus hadir," ujar Ina Ammania.

Bukannya menyanggupi permintaan tersebut, Menag justru menolak memimpin doa. Yaqut berdalih bahwa dirinya selaku Menteri Agama tidak mewakili satu agama tertentu saja. "Jadi kalau Menteri Agama yang diminta baca, saya akan minta semua Dirjen Bimas yang membaca, karena ini Kementerian Agama bukan Kementerian Agama Islam," tuturnya.

Menyikapi penolakan Menag, akhirnya Ketua Komisi VIII DPR RI

Yandri Susanto yang mengambilalih untuk memimpin doa. "Karena ada kebijakan Pak Menteri kalau di internal Kementerian Agama dikasih kesempatan masing-masing (membaca doa). Supaya tidak dikasih kesempatan masing-masing, saya saja yang memimpin (doa)," seloroh Yandri.

Dalam kesempatan berbeda Yandri menyatakan bahwa prosedur pembacaan doa yang dilakukan selama ini sudah sangat toleran. Hal itu dikatakannya menanggapi usulan yang pernah dilontarkan Menag Yaqut dalam agenda Rapat Kerja Nasional Kemenag.

"Selama ini sudah bagus berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ini untuk menghormati semua pemeluk agama yang ada di Indonesia dan sudah berjalan bagus. Biasanya yang memimpin doa akan menyampaikan ini kepada seluruh audiens," ujar Yandri.

Ia meyakini para peserta kegiatan juga bisa menyesuaikan. Dikatakannya, kalau permintaan Menag akan direalisasikan pada setiap acara maka perlu dipikirkan juga bagaimana pengaturan teknisnya.

"Prosedur selama ini sudah bagus. Kalau yang pimpin doa dalam suatu acara orang Kristen akan memimpin doa secara Kristen dan begitu juga kalau Hindu yang pimpin pasti secara Hindu, dan peserta atau audiens menyesuaikan dengan agamanya masing-masing. Ini sudah kebiasaan yang sangat toleran," ucap politisi Fraksi PAN itu.

Seperti diberitakan, Menteri Agama Yaqut ingin semua agama yang diakui di Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama untuk memberikan doa. Ia juga mengingatkan bahwa Kementerian Agama bukanlah ormas Islam.

Pernyataan Menag itupun akhirnya menuai kontroversi, hingga dirinya pun harus mengklarifikasi atas ucapannya. Yaqut menyatakan, hal Itu hanya bersifat internal di lingkungan Kemenag dan hanya untuk kegiatan berskala besar seperti Munas (musyawarah nasional).

• dep/es



Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI Foto: Oji/nvl



**RACHMAT GOBEL**  
WAKIL KETUA DPR RI  
BIDANG KORBISBAH



**M. AZIS SYAMSUDDIN**  
WAKIL KETUA DPR RI  
BIDANG KORPOLKAM



**PUAN MAHARANI**  
KETUA DPR RI



**SUFMI DASCO AHMAD**  
WAKIL KETUA DPR RI  
BIDANG KOREKKU



**A. MUHAIMIN ISKANDAR**  
WAKIL KETUA DPR RI  
BIDANG KORVESRA

SEGENAP PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DPR RI  
SERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

mengucapkan :

**Selamat Hari Raya**

*Idulfitri*

1 Syawal 1442 H

Minal aidin wal faizin

Mohon maaf lahir dan batin



@ DPR\_RI



DPR RI

[www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)



@ DPR\_RI



DPR RI